LPPD
Tahun 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang

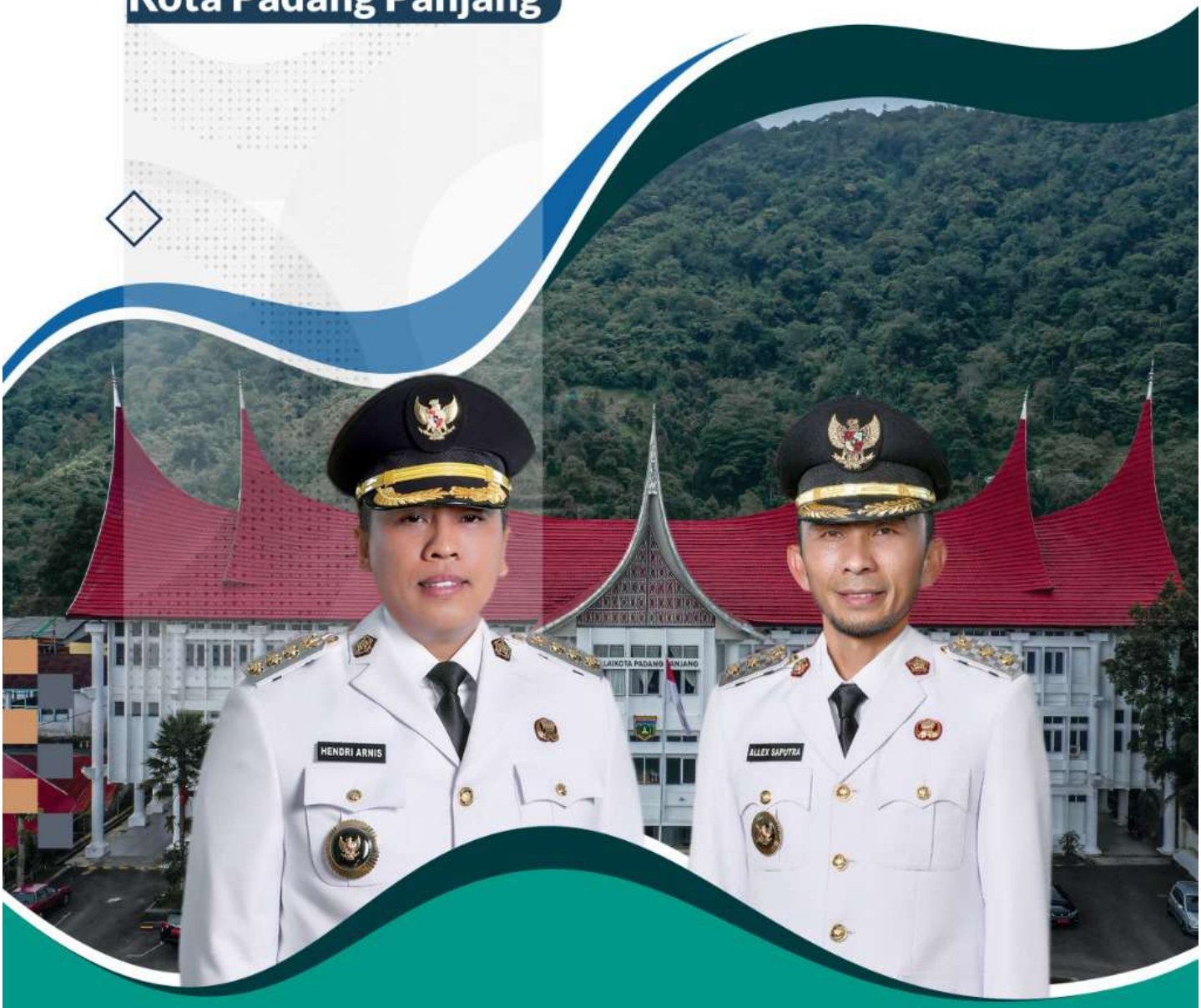

Hendri Arnis
Wali Kota Padang Panjang

Allex Saputra
Wakil Wali Kota Padang Panjang

Tahun 2024

Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat
Indonesia

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang termuat dalam LPPD sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LPPD telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam LPPD ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2025
Inspektur,

Dr. Syahril,SH,MH,CGCAE
NIP.19700405 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan tolok ukur indikator kinerja program-program pembangunan urusan Desentralisasi (urusan wajib dan pilihan) konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas, tugas pembantuan dan penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang dapat terselenggara dengan baik karena terbangunnya sinergitas antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kota Padang Panjang dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota dan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagai motivasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Padang Panjang dan warga masyarakat Kota Padang Panjang serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terbina selama ini sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 disampaikan, atas terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang diamanatkan kepada saya selaku Walikota Padang Panjang saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan bekerja sama demi kelancaran roda Pemerintahan di Kota Padang Panjang. Semoga segala upaya dan ikhtiar kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan senantiasa menjadi catatan amal ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin Ya Robbal Aalamiin.

Padang Panjang, 25 Maret 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**iii**
DAFTAR TABEL		**vi**
DAFTAR GAMBAR		**xii**
DAFTAR ISI GRAFIK		**xiii**
BAB I.	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.1.1	Penjelasan Umum	I-1
a	Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-2
b	Data Geografis Wilayah	I-2
c	Informasi Umum Data Kependudukan	I-5
d	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah	I-6
e	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	I-8
f	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	I-12
g	Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I-18
1.1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	I-23
a	Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	I-23
b	Visi dan Misi Kepala Daerah	I-34
c	Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-35
d	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024)	I-43
1.1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-53

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH II-1

2.1 Capaian Kinerja Makro II-1

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-1

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil II-2

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-6

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah II-7

BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III-1

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan III-1

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi III-2

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan III-2

3.4 Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan III-2

3.5 Saran dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan III-3

BAB IV. PENERAPAN DAN PERCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL IV-1

4.1 Urusan Pendidikan IV-1

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-1

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-1

4.1.3 Realisasi IV-1

4.1.4 Alokasi Anggaran IV-3

4.1.5 Dukungan Personil IV-3

4.1.6 Permasalahan dan Solusi IV-3

4.2 Urusan Kesehatan IV-4

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-4

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-4

4.2.3 Realisasi IV-5

4.2.4 Alokasi Anggaran IV-11

4.2.5 Dukungan Personil IV-12

4.2.6 Permasalahan dan Solusi IV-12

4.3 Urusan Pekerjaan Umum IV-13

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-13

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-13

4.3.3 Realisasi IV-13

4.3.4 Alokasi Anggaran IV-14

4.3.5 Dukungan Personil IV-15

4.3.6 Permasalahan dan Solusi IV-15

4.4 Urusan Perumahan Rakyat IV-15

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-15
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-16
4.4.3 Realisasi IV-16
4.4.4 Alokasi Anggaran IV-17
4.4.5 Dukungan Personil IV-17
4.4.6 Permasalahan dan Solusi IV-18
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat IV-18
4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran IV-18
4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-18
4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-19
4.5.1.3 Realisasi IV-19
4.5.1.4 Alokasi Anggaran IV-21
4.5.1.5 Dukungan Personil IV-21
4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi IV-22
4.5.2 BPBD dan Kesbangpol..... IV-23
4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-23
4.5.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-23
4.5.2.3 Realisasi IV-24
4.5.2.4 Alokasi Anggaran IV-25
4.5.2.5 Dukungan Personil IV-25
4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi IV-27
4.6 Urusan Sosial IV-27
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-27
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-28
4.6.3 Realisasi IV-28
4.6.4 Alokasi Anggaran IV-35
4.6.5 Dukungan Personil IV-36
4.6.6 Permasalahan dan Solusi IV-36
4.7 Program dan Kegiatan IV-38

BAB V. PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	I-3
Tabel 1.2	Tinggi Wilayah per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024	I-4
Tabel 1.3	Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan di Kota Padang Panjang 2024	I-4
Tabel 1.4	Nama - Nama Sungai/Batang Air di Kota Padang Panjang	I-4
Tabel 1.5	Jarak Antara Kota Padang Panjang dengan Beberapa Kota di Sumatera	I-5
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Per Kelurahan, Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	I-5
Tabel 1.7	Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024	I-6
Tabel 1.8	Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah	I-6
Tabel 1.9	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (per 31 Des 24)	I-8
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Padang Panjang Sesuai Pangkat Golongan Tahun 2024 (per 31 Des 24)	I-9
Tabel 1.11	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	I-9
Tabel 1.12	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Per Desember 2024	I-12
Tabel 1.13	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Per Desember 2024	I-13
Tabel 1.14	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Per Desember 2024	I-14
Tabel 1.15	Realisasi Anggaran Pada Masing - Masing OPD se - Kota Padang Panjang Pada Tahun 2024	I-14
Tabel 1.16	Capaian Kinerja Makro Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024	I-18
Tabel 1.17	Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I-18
Tabel 1.18	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	I-38
Tabel 1.19	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	I-39
Tabel 1.20	Program Prioritas Pencapaian Sasaran Pada Tujuan Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan	I-40

Tabel 1.21	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis.....	I-42
Tabel 1.22	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.....	I-42
Tabel 1.23	Prioritas, Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024	I-43
Tabel 1.24	Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ...	I-47
Tabel 1.25	Program Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024	I-47
Tabel 1.26	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	I-53
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro.....	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-2
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-6
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024.....	II-8
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibanding Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024.....	II-11
Tabel 2.6	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	II-13
Tabel 2.7	Pencapaian Penurunan Prevalensi Stunting periode Tahun 2021-2024.....	II-14
Tabel 2.8	Capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024	II-14
Tabel 2.9	Capaian Predikat Kota Layak Anak Kota Padang Panjang periode Tahun 2021-2024..	II-15
Tabel 2.10	Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.....	II-16
Tabel 2.11	Capaian Rata-rata Lama Sekolah	II-16
Tabel 2.12	Capaian Harapan Lama Sekolah	II-17
Tabel 2.13	Capaian Derajat Kesehatan Masyarakat.....	II-19
Tabel 2.14	Capaian Umur Harapan Hidup.....	II-19
Tabel 2.15	Capaian Prevalensi Stunting.....	II-21
Tabel 2.16	Capaian Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	II-22
Tabel 2.17	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-23
Tabel 2.18	Capaian Predikat Kota Layak Anak.....	II-24
Tabel 2.19	Capaian Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	II-25
Tabel 2.20	Capaian Status Kota Layak Pemuda	II-25

Tabel 2.21	Capaian Status Kota Layak Pemuda	II-26
Tabel 2.22	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	II-27
Tabel 2.23	Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024	II-28
Tabel 2.24	Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-29
Tabel 2.25	Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-30
Tabel 2.26	Capaian Nilai SAKIP	II-30
Tabel 2.27	Penilaian SAKIP tahun 2023 dan 2024	II-31
Tabel 2.28	Capaian Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	II-33
Tabel 2.29	Rincian Nilai IPKD pada tahun 2024	II-34
Tabel 2.30	Capaian Indikator Nilai Sistem Merit	II-36
Tabel 2.31	Capaian Indikator Maturitas SPIP	II-38
Tabel 2.32	Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kota Padang Panjang Tahun 2024	II-38
Tabel 2.33	Capaian Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	II-40
Tabel 2.34	Capaian Indeks SPBE	II-42
Tabel 2.35	Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024	II-44
Tabel 2.36	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-36
Tabel 2.37	Capaian Indeks Gini	II-47
Tabel 2.38	Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2021-2024	II-49
Tabel 2.39	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	II-49
Tabel 2.40	Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	II-51
Tabel 2.41	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) 2022-2024	II-53
Tabel 2.42	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	II-54
Tabel 2.43	Capaian Meningkatnya Investasi	II-57
Tabel 2.44	Realiasi Investasi di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.45	Capaian Menurunnya Kemiskinan Dan Pengangguran	II-59
Tabel 2.46	Capaian Menurunnya Kemiskinan	II-59
Tabel 2.47	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	II-64
Tabel 2.48	Capaian Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2021-2024	II-67
Tabel 2.49	Capaian Indeks Rasa Aman	II-70
Tabel 2.50	Capaian Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam	II-71

	Kehidupan Masyarakat	
Tabel 2.51	Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021-2024	II-71
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Pemajuan Kebudayaan Pada Tahun 2024	II-72
Tabel 2.53	Capaian Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan	II-77
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Mesjid Aktif yang melaksnakan Kegiatan Keagamaan Kota Padang Panjang Tahun 2024	II-77
Tabel 2.55	Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	II-80
Tabel 2.56	Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	II-80
Tabel 2.57	Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	II-83
Tabel 2.58	PPKS di Kota Padang Panjang	II-84
Tabel 2.59	Capaian Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	II-88
Tabel 2.60	Capaian Indeks Kualitas/Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	II-88
Tabel 2.61	Capaian Indeks Kualitas/Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	II-89
Tabel 2.62	Target konversi capaian IKLH Tahun 2023	II-90
Tabel 2.63	Capaian Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	II-91
Tabel 2.64	Capaian IKLI kePUan	II-92
Tabel 2.65	IKLI KePUan Kota Padang Panjang	II-93
Tabel 2.66	Capaian IKLI Perkim	II-93
Tabel 2.67	IKLI Perkim Kota Padang Panjang	II-94
Tabel 2.68	Capaian Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	II-95
Tabel 2.69	IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang	II-96
Tabel 2.70	Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	II-97
Tabel 2.71	Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Propinsi Sumatera Barat	II-98
Tabel 2.72	Capaian Persentase Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Padang Panjang	II-99
Tabel 2.73	Capaian Indeks Kualitas Air di Kota Padang Panjang	II-99
Tabel 2.74	Capaian IKU Perhitungan Lama dan Baru	II-101
Tabel 2.75	Capaian IKTL Perhitungan Lama dan Baru	II-103
Tabel 2.76	Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja per Program Tahun 2024	II-106
Tabel 2.77	Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2024	II-110
Tabel 4.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV-1
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pendidikan	IV-1

Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	IV-3
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IV-3
Tabel 4.5	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV-4
Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Kesehatan	IV-5
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	IV-11
Tabel 4.8	Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin SDM Kesehatan Tahun 2024	IV-12
Tabel 4.9	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-13
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pekerjaan Umum	IV-13
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	IV-14
Tabel 4.12	Daftar Pegawai Dinas PUPR Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenjang Pendidikan	IV-15
Tabel 4.13	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV-16
Tabel 4.14	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Perumahan Rakyat	IV-16
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat	IV-17
Tabel 4.16	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	IV-19
Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	IV-19
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	IV-21
Tabel 4.19	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan	IV-22
Tabel 4.20	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan	IV-22
Tabel 4.21	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Pendidikan	IV-22
Tabel 4.22	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	IV-23
Tabel 4.23	Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	IV-24
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	IV-25
Tabel 4.25	Data Tenaga pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	IV-26
Tabel 4.26	Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-28

Tabel 4.27	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial	IV-28
Tabel 4.28	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	IV-35
Tabel 4.29	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	IV-36
Tabel 4.30	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	IV-38
Tabel 4.31	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	IV-39
Tabel 4.32	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	IV-50
Tabel 4.33	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	IV-56
Tabel 4.34	Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas	IV-58
Tabel 4.35	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	IV-66

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Peta Administratif Kota Padang Panjang	I-3

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Perbandingan IPM Tahun 2024 Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang	II-13
Grafik 2.2	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 Kota Padang Panjang	II-17
Grafik 2.3	Perbandingan Harapan Lama Sekolah tahun 2024 Kota Padang Panjang	II-18
Grafik 2.4	Perbandingan Umur Harapan Hidup tahun 2024 Kota Padang Panjang	II-20
Grafik 2.5	Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2024 Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang	II-21
Grafik 2.6	Perbandingan Nilai Kepatuhan	II-41
Grafik 2.7	Perbandingan Indeks SPBE Kota Padang Panjang	II-43
Grafik 2.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-47
Grafik 2.9	Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang	II-48
Grafik 2.10	Perbandingan LPE Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang	II-50
Grafik 2.11	Perbandingan LPE Sektor Pertanian Kota Padang Panjang	II-52
Grafik 2.12	Perbandingan LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang	II-55
Grafik 2.13	Perbandingan Tingkat Kemiskinan tahun 2024	II-60
Grafik 2.14	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 Kota Padang Panjang	II-61
Grafik 2.15	Perbandingan Tingkat Pengganguran Terbuka tahun 2024	II-64
Grafik 2.16	Perbandingan tingkat Pengganguran Terbuka Tahun 2024	II-65
Grafik 2.17	Perbandingan Pengeluaran Kapita Tahun 2024	II-68
Grafik 2.18	Perbandingan pengeluaran perKapita Tahun 2024	II-68
Grafik 2.19	Perbandingan Realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun 2022 sd 2024	II-76
Grafik 2.20	Jenis dan Kasus Pelanggaran yang Terjadi Pada Tahun 2024	II-81
Grafik 2.21	Tabel Perbandingan Angka PPKS	II-85
Grafik 2.22	Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2019 – 2024	II-89
Grafik 2.23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	II-90
Grafik 2.24	Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024	II-100
Grafik 2.25	Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024	II-102
Grafik 2.26	Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2024	II-104

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1 Permendagri No.18 Tahun 2019). Lebih lanjut dijelaskan bahwa LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal selama satu tahun anggaran.

Memahami dan memenuhi amanat peraturan tersebut, maka disusunlah LPPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang formatnya mempedomani sistematika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA, tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

b. Data Geografis Wilayah

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara 100°20' - 100°30' Bujur Timur dan 0°27' - 0°32' Lintang Selatan. Kota ini berada di jalur perlintasan regional yang menghubungkan Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Batusangkar. Dengan posisi strategis tersebut, Kota Padang Panjang menjadi bagian dari jalur utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Secara topografis, Kota Padang Panjang didominasi oleh dataran tinggi yang bergelombang dengan jenis tanah andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Kota ini terletak pada ketinggian 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut, serta diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat, yang menyebabkan daerah ini memiliki iklim yang sejuk.

Dengan ketinggian tersebut, Kota Padang Panjang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, kota ini juga sering mengalami gempa bumi karena berada di kawasan pegunungan berapi.

Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah ±23 km² (2.300 ha), di mana seluruh batas wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar. Adapun batas-batas administratif Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan peta administratif Kota Padang Panjang:

Gambar 1.1
Peta Administratif Kota Padang Panjang

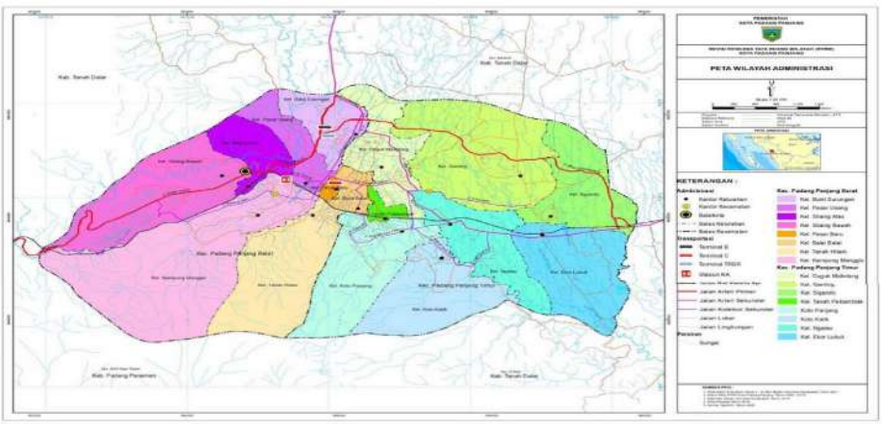

Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Secara administratif, Kota Padang Panjang terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat. Setiap kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
A.	**Kecamatan Padang Panjang Barat**	**975**	**42,39**
	1. Silaing Bawah	261	11,35
	2. Silaing Atas	54	2,35
	3. Pasar Usang	59	2,57
	4. Kampung Manggis	316	13,74
	5. Tanah Hitam	72	3,13
	6. Pasar Baru	23	1,00
	7. Bukit Surungan	121	5,26
	8. Balai – Balai	69	3,00
B.	**Kecamatan Padang Panjang Timur**	**1.325**	**57,61**
	1. Koto Panjang	133	5,78
	2. Koto Katik	101	4,39
	3. Ngalau	145	6,30
	4. Ekor Lubuk	280	12,17
	5. Sigando	140	6,09
	6. Ganting	310	13,48
	7. Guguk Malintang	190	8,26
	8. Tanah Pak Lambik	26	1,13
Jumlah/Total		**2.300**	**100,00**

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Ditinjau dari ketinggian, kedua Kecamatan di Kota Padang Panjang berada pada ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut, sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Tinggi Wilayah per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Padang Panjang Barat	750
Padang Panjang Timur	750
Padang Panjang	750

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Luas lahan di Kota Padang Panjang terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Berdasarkan Tabel 1.3, persentase pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian lebih besar, yaitu 58,7%, dibandingkan dengan lahan bukan pertanian yang sebesar 41,3%. Rincian luas tanah berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.3
Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan di Kota Padang Panjang 2024

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
I. Lahan Pertanian	1.350	58,7%
a. Sawah	552	24, 0%
b. Tegal/Kebun	264	11,5%
c. Ladang/Huma	95	4,1%
d. Hutan Rakyat	213	9,3%
e. Kolam/Tebet/Empang	87	3,8%
f. Sementara tidak diusahakan	139	6,0%
II. Lahan Bukan Pertanian	950	41,3%
Padang Panjang	**2.300**	**100,00%**

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Kota Padang Panjang dilintasi oleh 10 sungai/batang air. Di Kecamatan Padang Panjang Barat, terdapat 3 sungai/batang air, sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur, terdapat 7 sungai/batang air, sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.4
Nama - Nama Sungai/Batang Air di Kota Padang Panjang

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
Padang Panjang Barat	1. Batang Air Putih	1,56
	2. Batang Air Berkarek - Karek	3,73
	3. Sungai Andok	1,15
Kecamatan	**Nama Sungai**	**Panjang Sungai (km)**
Padang Panjang Timur	1. Sungai Talang	4,39
	2. Sungai Sibunian	4,45
	3. Sungai Jirek	1,10
	4. Sungai Sikareh	4,02
	5. Batang Arau	3,66
	6. Parik Rumpang	4,41
	7. Batang Air Sitabak	4,15

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Dengan letak geografis yang strategis sebagai jalur perlintasan antar-kota dan antar-provinsi, Kota Padang Panjang memiliki keuntungan karena berjarak relatif dekat dengan kota/kabupaten lain di Sumatera Barat. Begitu pula dengan jarak Kota Padang Panjang ke beberapa kota besar di Pulau Sumatera, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 1.5
Jarak Antara Kota Padang Panjang dengan Beberapa Kota di Sumatera

Rute	Jarak (Km)
1. Padang Panjang – Medan (via Sibolga)	740
2. Padang Panjang – Pekanbaru (via Payakumbuh)	236
3. Padang Panjang – Jambi	520
4. Padang Panjang – Palembang (via Muara Enim)	943
5. Padang Panjang – Banda Aceh (via Gunung Tua)	1.365
6. Padang Panjang – Bengkulu	709
7. Padang Panjang – Tanjung Karang	1.253

Sumber: BPS, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 63.895 jiwa dengan rincian 32.189 jiwa penduduk Laki - Laki dan 31.706 jiwa penduduk Perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang hingga semester II tahun 2024 adalah 19.102 KK. Rincian data jumlah penduduk Kota Padang Panjang per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024 dapat dlihat pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Per Kelurahan, Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ganting	1.784	1.738	3.522	994
2	Sigando	1.106	1.037	2.143	631
3	Ekor Lubuk	1.416	1.362	2.778	863
4	Ngalau	1.735	1.774	3.509	1.036
5	Guguk Malintang	3.635	3.695	7.330	2.113
6	Koto Panjang	2.551	2.439	4.990	1.506
7	Koto Katik	715	661	1.376	420
8	Tanah Pak Lambik	1.016	1.018	2.034	619
	Kecamatan Padang Panjang Timur	**13.958**	**13.724**	**27.682**	**8.182**
1	Bukit Surungan	1.360	1.414	2.774	834
2	Pasar Usang	2.010	1.995	4.005	1.236
3	Kampung Manggis	4.129	3.966	8.095	2.412
4	Silaing Bawah	3.338	3.275	6.613	1.962
5	Silaing Atas	1.271	1.253	2.524	761
6	Pasar Baru	879	860	1.739	512
7	Tanah Hitam	1.927	1.969	3.896	1.227
8	Balai – Balai	3.317	3.250	6.567	1.976
	Kecamatan Padang Panjang Barat	**18.231**	**17.982**	**36.213**	**10.920**
Kota Padang Panjang		**32.189**	**31.706**	**63.895**	**19.102**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2025

Selama tahun 2024, Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,86% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di Kelurahan Tanah Pak Lambiak, yaitu sebesar 4,31%. Di sisi lain, terdapat beberapa kelurahan yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif, yaitu penurunan jumlah penduduk dibandingkan tahun 2023. Perkembangan jumlah penduduk di setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK TAHUN 2023			PENDUDUK TAHUN 2024			PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
I	**PADANG PANJANG TIMUR**	**13.631**	**13.426**	**27.057**	**13.958**	**13.724**	**27.682**	**2,31**
1	GANTING	1.743	1.705	3.448	1.784	1.738	3.522	2,15
2	SIGANDO	1.093	1.033	2.126	1.106	1.037	2.143	0,80
3	EKOR LUBUK	1.411	1.335	2.746	1.416	1.362	2.778	1,17
4	NGALAU	1.686	1.703	3.389	1.735	1.774	3.509	3,54
5	GUGUK MALINTANG	3.570	3.638	7.208	3.635	3.695	7.330	1,69
6	KOTO PANJANG	2.462	2.377	4.839	2.551	2.439	4.990	3,12
7	KOTO KATIAK	693	658	1.351	715	661	1.376	1,85
8	TANAH PAK LAMBIAK	973	977	1.950	1.016	1.018	2.034	4,31
II	**PADANG PANJANG BARAT**	**17.907**	**17.767**	**35.674**	**18.231**	**17.982**	**36.213**	**1,51**
1	BUKIT SURUNGAN	1.316	1.364	2.680	1.360	1.414	2.774	3,51
2	PASAR USANG	1.959	1.999	3.958	2.010	1.995	4.005	1,19
3	KAMPUNG MANGGIS	4.057	3.912	7.969	4.129	3.966	8.095	1,58
4	SILAIANG BAWAH	3.292	3.239	6.531	3.338	3.275	6.613	1,26
5	SILAIANG ATAS	1.311	1.260	2.571	1.271	1.253	2.524	(1,83)
6	PASAR BARU	874	878	1.752	879	860	1.739	(0,74)
7	TANAH HITAM	1.911	1.951	3.862	1.927	1.969	3.896	0,88
8	BALAI-BALAI	3.187	3.164	6.351	3.317	3.250	6.567	3,40
JUMLAH		**31.538**	**31.193**	**62.731**	**32.189**	**31.706**	**63.895**	**1,86**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Tahun 2025, (data diolah)

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah

Berikut ini Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 1.8
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Walikota No 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Walikota No 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektorat Daerah	Peraturan Walikota No 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
		Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan	Peraturan Walikota No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Walikota No 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Walikota No 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Peraturan Walikota No 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Peraturan Walikota No 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Walikota No 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Perhubungan	Peraturan Walikota No 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Walikota No 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Walikota No 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Walikota No 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Walikota No 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Walikota No 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Pangan dan Pertanian	Peraturan Walikota No 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Walikota No 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peraturan Walikota No 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
19	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Peraturan Walikota No 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Walikota No 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang
22	Kecamatan Padang Panjang Barat	Peraturan Walikota No 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan
23	Kecamatan Padang Panjang Timur	Peraturan Walikota No 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Sumber: Bagian Hukum Setdako padang Panjang, Tahun 2025

e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki 1.785 Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri atas 663 PNS laki-laki dan 1.122 PNS perempuan. Para PNS ini tersebar di 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS terbanyak terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena didominasi oleh guru yang tersebar di berbagai SD dan SMP di Kota Padang Panjang.

Sebaran jumlah PNS berdasarkan OPD di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (per 31 Des 24)

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Daerah	56	40	96
2	Sekretariat DPRD	12	11	23
3	Inspektorat	20	11	31
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	16	31
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	20	35
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106	343	449
7	Dinas Kesehatan	21	169	190
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	21	22	43
9	Dinas Pangan dan Pertanian	27	15	42
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	14	46
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	15	45
12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	24	34
13	Dinas Perhubungan	41	10	51
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	27	19	46
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	9	16
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	9	17	26
17	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	30	7	37
18	Rumah Sakit Umum Daerah	48	238	286
19	Kecamatan Padang Panjang Barat	35	24	59
20	Kecamatan Padang Panjang Timur	41	24	65
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	18	10	28
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	10	21
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	11	24
24	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	17	9	26
	TOTAL	**663**	**1.122**	**1.785**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Tahun 2025

Di Kota Padang Panjang, terdapat 284 PNS dengan golongan IV, yang terdiri atas 110 PNS laki-laki dan 174 PNS perempuan. Sementara itu, jumlah PNS terbanyak berada pada

golongan III, dengan total 1.297 orang, yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan dalam golongan III tersebut.

Secara rinci, komposisi PNS Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.10 di bawah ini:

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Padang Panjang
Sesuai Pangkat Golongan Tahun 2024 (per 31 Des 24)

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	IV/e	0	0	0
	IV/d	1	0	1
	IV/c	25	20	45
	IV/b	34	71	105
	IV/a	50	83	133
	Total	**110**	**174**	**284**
2	III/d	142	347	489
	III/c	88	184	272
	III/b	103	204	307
	III/a	112	117	229
	Total	**445**	**852**	**1297**
3	II/d	46	53	99
	II/c	42	38	80
	II/b	7	2	9
	II/a	6	2	8
	Total	**101**	**95**	**196**
4	I/d	7	1	8
	I/c	0	0	0
	I/b	0	0	0
	I/a	0	0	0
	Total	**7**	**1**	**8**
Total		**663**	**1.122**	**1.785**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Tahun 2025

Berikut ini Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah, yaitu:

Tabel 1.11
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	PPPK	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	Pendukung	15	26	4	55	100
2	SEKRETARIAT DPRD	Pendukung	5	3	2	15	25
3	INSPEKTORAT	Penunjang	5	23		3	31
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penunjang	6	12	1	13	32
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penunjang	4	8	2	23	37
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelayanan Dasar	5	8	1	23	37
7	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Pelayanan Dasar	0	6		1	7

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	PPPK	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	SLTP I	Pelayanan Dasar	0	35	6	2	43
9	SLTP II	Pelayanan Dasar	0	18	6	1	25
10	SLTP III	Pelayanan Dasar	0	25	3	1	29
11	SLTP IV	Pelayanan Dasar	0	23	7	0	30
12	SLTP V	Pelayanan Dasar	0	36	3	0	39
13	SLTP VI	Pelayanan Dasar	0	24	4	1	29
14	SD NEGERI 1 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	9		1	10
15	SD NEGERI 2 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
16	SD NEGERI 3 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	6	2	1	9
17	SD NEGERI 4 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
18	SD NEGERI 5 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	6	3	0	9
19	SD NEGERI 6 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	1	10
20	SD NEGERI 7 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	9	3	1	13
21	SD NEGERI 8 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
22	SD NEGERI 9 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	9	1	0	10
23	SD NEGERI 10 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
24	SD NEGERI 11 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	1	0	8
25	SD NEGERI 12 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
26	SD NEGERI 13 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	5	3	0	8
27	SD NEGERI 14 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	7	2	1	10
28	SD NEGERI 15 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	8	1	1	10
29	SD NEGERI 16 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	9		1	10
30	SD NEGERI 17 PADANG PANJANG BARAT	Pelayanan Dasar	0	6	3	1	10
31	SD NEGERI 1 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
32	SD NEGERI 2 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	7	3	1	11
33	SD NEGERI 3 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	6	3	1	10
34	SD NEGERI 4 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	6	3	1	10
35	SD NEGERI 5 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	8	1	0	9
36	SD NEGERI 6 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	6	3	0	9
37	SD NEGERI 7 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	8	1	0	9
38	SD NEGERI 8 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	7	2	1	10
39	SD NEGERI 9 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	7	3	1	11
40	SD NEGERI 10 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	7	1	0	8
41	SD NEGERI 11 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	5	2	1	8
42	SD NEGERI 12 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	9	1	1	11
43	SD NEGERI 13 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	7	2	0	9
44	SD NEGERI 14 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	5	3	1	9
45	SD NEGERI 15 PADANG PANJANG TIMUR	Pelayanan Dasar	0	6	3	0	9
46	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Dasar	5	15	2	16	38
47	UPTD PUSKESMAS GUNUNG	Pelayanan Dasar	0	37	4	2	43
48	UPTD PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	Pelayanan Dasar	0	38	4	1	43
49	UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK	Pelayanan Dasar	0	31	4	1	36
50	UPTD INSTALASI FARMASI	Pelayanan Dasar	2	3		0	5
51	UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	Pelayanan Dasar	0	38	7	1	46
52	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pelayanan Dasar	7	16	7	10	40
53	UPTD RUMAH POTONG HEWAN	Pelayanan Dasar	2	0		1	3
54	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	Pelayanan Dasar	2	0		2	4
55	UPTD BALAI BENIH IKAN	Pelayanan Dasar	1	0		1	2
56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Penunjang	7	12	3	24	46

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	PPPK	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelayanan Dasar	7	16	3	23	49
58	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Non pelayanan Dasar	6	7	2	20	35
59	UPTD PENGOLAHAN KULIT	Non pelayanan Dasar	2	0		1	3
60	UPTD PENGELOLAAN DANA BERGULIR	Non pelayanan Dasar	2	0		2	4
61	UPTD METROLOGI LEGAL	Non pelayanan Dasar	2	0		3	5
62	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pelayanan Dasar	6	9	2	19	36
63	DINAS PERHUBUNGAN	Non pelayanan Dasar	9	2		35	46
64	UPTD PKB	Non pelayanan Dasar	2	1		2	5
65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan Dasar	6	11		24	41
66	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan Dasar	2	0		3	5
67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Non pelayanan Dasar	5	3	2	8	18
68	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Non pelayanan Dasar	5	7		14	26
69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	Pelayanan Dasar	5	5	24	27	61
70	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pelayanan Dasar	10	251	85	25	371
71	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	Kewilayahan	8	0		9	17
72	KELURAHAN SILAING BAWAH	Kewilayahan	5	0		1	6
73	KELURAHAN SILAING ATAS	Kewilayahan	5	0		1	6
74	KELURAHAN PASAR USANG	Kewilayahan	4	0		0	4
75	KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS	Kewilayahan	5	0		0	5
76	KELURAHAN TANAH HITAM	Kewilayahan	5	0		0	5
77	KELURAHAN BALAI-BALAI	Kewilayahan	4	0		1	5
78	KELURAHAN PASAR BARU	Kewilayahan	5	0		0	5
79	KELURAHAN BUKIT SURUNGAN	Kewilayahan	5	0		1	6
80	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	Kewilayahan	5	0		16	21
81	KELURAHAN NGALAU	Kewilayahan	5	0		0	5
82	KELURAHAN KOTO PANJANG	Kewilayahan	3	0		2	5
83	KELURAHAN GUGUK MALINTANG	Kewilayahan	5	0		0	5
84	KELURAHAN TANAH PAK LAMBIAK	Kewilayahan	5	0		1	6
85	KELURAHAN SIGANDO	Kewilayahan	5	0		0	5
86	KELURAHAN EKOR LUBUK	Kewilayahan	5	0		1	6
87	KELURAHAN GANTING	Kewilayahan	4	0		2	6
88	KELURAHAN KOTO KATIK	Kewilayahan	5	0		1	6
89	TK NEGERI PEMBINA	Pelayanan Dasar	0	10		1	11
90	GURU DPK TK	Pelayanan Dasar	0	20		0	20
91	GURU DPK SD	Pelayanan Dasar	0	3		0	3
92	GURU DPK SLTP	Pelayanan Dasar	0	1		0	1
93	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelayanan Dasar	6	9	5	13	33
94	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Non pelayanan Dasar	3	8	1	10	22
95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Non pelayanan Dasar	5	8	4	11	28
96	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Non pelayanan Dasar	6	10		10	26
TOTAL			**243**	**1042**	**262**	**500**	**2047**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.624.270.615.623,00. Target ini terealisasi sebesar Rp.583.202.667.534,88 atau 93,42%.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), target yang direncanakan sebesar Rp.121.417.303.824,00, sementara realisasinya mencapai Rp.94.688.742.631,00 atau 77,72%. PAD ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Untuk Dana Perimbangan, yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp502.853.311.799,00 dengan realisasi Rp.488.770.713.144,00 atau 97,20%. Dana ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Sementara itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki realisasi sebesar Rp.60.387.584,00, yang bersumber dari pengembalian hibah tahun 2023, serta dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non-BLUD.

Rincian realisasi pendapatan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Per Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**	**624.270.615.623,00**	**583.202.667.534,88**	**93,42**	**41.067.948.088,12**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**121.417.303.824,00**	**94.688.742.631,00**	**77,72**	**27.045.737.017,12**
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	12.233.166.000,00	9.688.742.631,00	79,20	2.544.423.369,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	83.337.725.350,00	64.870.692.621,00	77,84	18.467.032.728,50
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.922.888.824,00	7.922.888,824,00	100,00	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	17.923.523.650,00	11.889.242.730,38	66,33	6.034.280.919,62
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**502.853.311.799,00**	**488.770.713.144,00**	**97,20**	**14.082.598.655,00**
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	467.617.472.040,00	459.088.864.897,00	98,18	8.528.607.143,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.235.839.759,00	29.681.848.247,00	84,24	5.553.991.512,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**60.387.584,00**	**0,00**	**(60.387.584,00)**
4.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	60.387.584,00	0,00	(60.387.584,00)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2024, belanja daerah Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar Rp673.273.185.861,66 dengan realisasi Rp625.753.832.103,60 atau 92,94% dari total anggaran belanja yang tersedia.

Realisasi belanja berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasional

- Anggaran: Rp575.104.076.294,66
- Realisasi: Rp553.232.938.495,14
- Persentase capaian: 96,20%

b. Belanja Modal

- Anggaran: Rp96.968.820.067,00
- Realisasi: Rp71.751.888.415,46
- Persentase capaian: 73,99%

c. Belanja Tak Terduga

- Anggaran: Rp1.100.289.500,00
- Realisasi: Rp769.005.193,00
- Persentase capaian: 69,89%

Rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Per Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/(Kurang)
5.	**BELANJA**	**673.273.185.861,66**	**625.753.832.103,60**	**92,94**	**47.519.353.758,06**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**575.104.076.294,66**	**553.232.938.495,14**	**96,20**	**21.871.137.799,52**
5.1.1.	Belanja Pegawai	315.904.492.272.,65	311.212.828.135,00	98,51	4.691.664.137,65
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.003.982.224,01	214.426.378.424,14	93,23	15.577.903.799,87
5.1.4.	Belanja Subsidi	465.000.000,00	4.456.800,00	0,96	460.543.200,00
5.1.5.	Belanja Hibah	17.752.457.198,00	17.174.049.136,00	97,73	398.408.062,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	11.158.144.600,00	10.415.226.000,00	93,34	742.918.600,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**96.968.820.067,00**	**71.751.888.415,46**	**73,99**	**25.246.651,54**
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.055.454.434,00	14.731.124.143,00	66,79	7.324.330.291,00
5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.448.915.848,00	39.342.022.232,00	73,61	14.106.893.616,00
5.2.3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	19.857.745.661,00	16.570.946.513,46	83,45	3.286.799.147,54
5.2.4.	Belanja Modal Aset tetap lainnya	1.011.704.124,00	1.004.874.127,00	99,32	6.829.997,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.100.289.500,00**	**769.005.193,00**	**69,89**	**331.284.307,00**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	1.100.289.500,00	769.005.193,00	69,89	331.284.307,00

Sumber: BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025

Pembiayaan merupakan konsekuensi dari selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang dapat berbentuk surplus atau defisit. Secara keseluruhan, pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023. Pengeluaran Pembiayaan merupakan alokasi untuk penyertaan modal pada entitas tertentu sesuai kebijakan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.50.002.570.238,66, yang berasal dari SiLPA Tahun 2023; Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,00, yang dialokasikan untuk penyertaan modal; dan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.6.451.405.669,94.

Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Per Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Lebih/(Kurang)
6.	**PEMBIAYAAN**	**49.002.570.238,66**	**49.002.570.238,66.**	**100,00**	**-**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.002.570.238,66**	**50.002.570.238,66**	**100,00**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.002.570.238,66	50.002.570.238,66	100,00	
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	**-**
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50.002.570.238,66**	**50.002.570.238,66**	**100,00**	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	
	PEMBIAYAAN NETTO	**49.002.570.238,66**	**49.002.570.238,66**	**100,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	**-**	**6.451.405.669,94**	**0,00**	**(6.451.405.669,94)**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, Tahun 2025

Tabel 1.15
Realisasi Anggaran Pada Masing - Masing OPD
se - Kota Padang Panjang Pada Tahun 2024

NO.	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	41.021.330.490,00	39.414.915.957,00	96,08
2	Sekretariat DPRD	42.658.218.994,00	39.194.795.777,00	91.88
3	Inspektorat	7.031.135.623,00	6.940.832.662,00	98,72
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.160.020.196,00	6.056.879.013,00	98,33
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	11.164.852.298,00	10.251.420.772,00	91,82
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.717.179.567,65	9.333.468.956,00	96,05
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	20.703.823.668,00	20.444.848.907,00	98,76
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.193.194.828,00	115.444.454.614,86	95,26
9	Dinas Kesehatan	189.641.070.463,00	167.225.424.920,13	88,18
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.170.661.719,01	21.368.287.487,47	96,38
11	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.448.625.817,00	12.624.516.828,00	93,87
12	Dinas Pangan dan Pertanian	12.746.814.330,00	12.595.336.661,55	98,96
13	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	32.916.987.291,00	28.988.237.175,00	88,06
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.057.628.019,00	3.912.943.036,00	96,43
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.824.813.783,00	8.432.293.664,00	95,55
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil & Menengah	22.503.182.232,00	20.680.885.509,46	91,90
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.759.066.718,00	6.506.069.935,00	96,26
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.251.964.679,00	5.105.101.957,00	97,20
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	32.951.289.024,00	30.070.947.060,13	91,26
20	Dinas Perhubungan	12.218.461.373,00	12.025.092.411,00	98,42
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.002.203.493,00	11.932.322.299,00	99,42

NO.	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5
22	Kecamatan Padang Panjang Barat	19.381.125.944,00	18.719.714.527,00	96,59
23	Kecamatan Padang Panjang Timur	18.749.535.312,00	18.516.344.374,00	98,76
	JUMLAH	**673.273.185.861,66**	**625.753.832.103,60**	**92,94**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, Tahun 2025

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026. Dokumen RPD memuat sejumlah indikator kinerja makro daerah yang harus dievaluasi pencapaiannya setiap tahun.

Tahun 2024 bertepatan dengan tahun pesta demokrasi, yakni Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Momentum ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan transaksi belanja properti serta pengadaan sarana dan prasarana pemilu dan pilkada. Namun, di sisi lain, pemilu dan pilkada juga memberikan tantangan tersendiri terhadap iklim investasi, karena para investor cenderung bersikap "wait and see" hingga proses pemilu dan pilkada selesai untuk memastikan kepastian kebijakan. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan capaian kinerja makro di Indonesia.

Selain faktor politik, Kota Padang Panjang juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan capaian kinerja makro daerah. Salah satu peristiwa besar yang terjadi adalah bencana alam banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi pada 11 Mei 2024. Bencana ini mengakibatkan robohnya Jembatan Tanjung, terputusnya akses jalan nasional di Lembah Anai, serta terputusnya ruas jalan Lubuk Mata Kucing yang menghubungkan Kota Padang Panjang dengan Nagari Singgalang. Kerusakan infrastruktur ini berdampak pada terganggunya rantai pasok distribusi pangan dan berkurangnya jumlah kunjungan ke Kota Padang Panjang. Akibatnya, sektor perdagangan, pariwisata, akomodasi, serta makanan dan minuman mengalami penurunan selama lebih kurang tiga bulan selama proses perbaikan jalan di Lembah Anai. Selain itu, bencana ini juga menyebabkan kerusakan lahan pertanian seluas kurang lebih 21 hektar di sepanjang aliran sungai yang berada di Kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Koto Katik, Guguk Malintang, Pasar Usang, dan Silaing Bawah.

Pada tahun yang sama, serangan hama tikus juga melanda sejumlah lahan sawah di Kota Padang Panjang serta daerah hinterland seperti Batipuh dan X Koto, yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, pengaruh iklim ekstrem yang melanda Indonesia turut mempengaruhi perekonomian Kota Padang Panjang, khususnya di sektor pertanian dan pasokan komoditas hasil pertanian.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak serta memitigasi dampak

bencana terhadap lahan pertanian. Berbagai langkah konkret telah dilakukan, antara lain menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana, serta mengoptimalkan lahan pertanian yang terdampak. Melalui Dinas Pangan dan Pertanian, Pemerintah Kota Padang Panjang juga telah mengidentifikasi lahan pertanian yang terdampak bencana dan membangun saluran irigasi di Kelurahan Ekor Lubuk, yang akan dilanjutkan dengan perbaikan irigasi di kelurahan lainnya.

Sepanjang tahun 2024, berbagai program strategis juga telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja makro ekonomi, di antaranya pengendalian inflasi melalui pengawasan pasokan dan ketersediaan pangan, gerakan tanam cabai, serta pemberian bantuan sosial berupa sarana dan prasarana pertanian. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Kota Padang Panjang untuk menekan angka pengangguran, salah satunya dengan menyelenggarakan job fair yang menawarkan lebih dari 500 lowongan pekerjaan. Selain itu, diberikan pula bantuan wirausaha serta bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berbagai upaya ini telah menunjukkan hasil yang tercermin dalam capaian indikator makro daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,52%, mengalami penurunan sebesar 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,84%. Meskipun demikian, angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%. Dengan capaian tersebut, Kota Padang Panjang berada di peringkat kelima tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang mencatat angka pertumbuhan yang sama.

Meskipun mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Padang Panjang tetap mengalami peningkatan sebesar 3,7%. PDRB per kapita naik dari Rp.76.314,40 juta pada tahun 2023 menjadi Rp.80.012,14 juta pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam produktivitas dan daya beli masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, IPM tercatat sebesar 79,76, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 80,17. Dengan angka ini, Kota Padang Panjang menempati peringkat keempat dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan masuk dalam kategori "tinggi." Peningkatan IPM ini didukung oleh peningkatan pada komponen-komponen pembentuknya, di antaranya: Angka Harapan Hidup meningkat dari 73,23 tahun pada tahun 2023 menjadi 73,61 tahun pada tahun 2024; Harapan Lama Sekolah naik dari 15,29 tahun pada tahun 2023 menjadi 15,47 tahun pada tahun 2024; Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 11,94 tahun pada tahun 2023 menjadi 12,00 tahun pada tahun 2024; Pengeluaran per kapita naik dari Rp11.310.000 pa3da tahun 2023 menjadi Rp.11.840.000 pada tahun 2024. Peningkatan ini

mencerminkan bahwa berbagai program pembangunan manusia yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 5,49% pada tahun 2023, angka ini turun menjadi 4,94% pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program strategis yang dilakukan pemerintah, seperti pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan Bursa Kerja Khusus (BKK), serta kerja sama dengan berbagai perusahaan dan penyedia lowongan kerja dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Koefisien Gini juga mengalami penurunan dari 0,273 pada tahun 2023 menjadi 0,266 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang berada dalam kategori "rendah." Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan, seperti bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM dan pemberian pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di tengah berbagai pencapaian positif, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,24%, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 5,31%. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, bantuan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, serta program perbaikan rumah tidak layak huni. Namun, hasilnya belum cukup signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah terobosan yang lebih inovatif dan efektif guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Padang Panjang.

Secara keseluruhan, Kota Padang Panjang terus menunjukkan perkembangan yang positif dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Meskipun terdapat tantangan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan sedikit peningkatan angka kemiskinan, berbagai indikator lainnya menunjukkan tren yang baik. Pemerintah Kota Padang Panjang akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai program pembangunan, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Capaian kinerja makro daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Capaian Kinerja Makro Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO.	INDIKATOR		2023	2024	NAIK / (TURUN)
1	2		3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi		4,84%*	4,52%	0,32%
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)		76,31	80,01	3,7%
3	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)		2.980	3.060	80
4	Angka Kemiskinan (%)		5,24	5,31	0,07
5	Angka Pengangguran (%)		5,49	4,94	(0,55)
6	Gini Rasio		0,273	0,266	(0,007)
7	Indeks Pembangunan Manusia		79,76	80,17	0,41
	a.	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,23	73,61	0,38
	b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,29	15,47	0,18
	c.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,94	12,00	0,06

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2025

g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Berikut ini pelaksanaan program berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan yang memuat alokasi anggaran dan realisasi belanja, yaitu:

Tabel 1.17
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	77.336.003.249	76,353,339,173
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43,515,715,579	38,762,752,447
2	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.486.412.860	143.288.401.729
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.263.597.161	22.301.989.309,13
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.090.900.150	921.366.912
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	377.962.100	347.799.550
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	422.198.200	364.269.500
3	PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.679.798.606	7.523.111.575
		PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.738.737.021,00	3.679.252.978,65
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	157.960.000,00	156.821.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	442.803.350,00	418.292.450,00

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.205.192.250,00	3.078.503.638,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	466.948.000,00	447.303.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN	5.915.555.842,01	5.571.916.025,81
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	52.163.250,00	46.338.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	511.503.400,00	446.748.320,01
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.986.073.979	7.747.048.145
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	562.552.876	435.172.992
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	98.709.750	81.462.350
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.049.192.250	3.001.712.900
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.960.702.273	6.758.232.801
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.643.655.293	6.595.194.649
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.260.508.500	4.252.673.364
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.098.039.700	1.084.454.288
6	SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.763.481.066	6.707.350.978
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.366.916.000	1.363.089.575
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	828.488.000	800.960.807
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	488.331.100	463.563.903
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	182.809.351	165.138.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	24.590.000	24.542.000
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
1	TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.379.671.767	4.275.163.051
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	388.965.600	344.354.058
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	220.751.200	189.634.100
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	716.301.600	716.301.600
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	171.273.750	161.100.162
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	367.468.450	262.779.926
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	157.368.600	141.884.885
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	453.150.400	257.745.387
3	PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.180.996.560	8.128.596.307
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	307.086.580	303.007.070
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	9.189.900	9.070.975
4	PERTANAHAN	Tahun 2024 tidak ada di Kota Padang Panjang		
5	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	118.244.300	116.392.730

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	427.000.423	357.068.145
		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.072.617.850	1.999.651.732
		PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	18.887.300	15.782.375
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	19.385.300	16.738.805
		PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	0
		PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	138.727.800	131.700.525
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75.340.200	70.875.750
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.983.500	427.000
		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.387.569.490	8.255.970.925
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,577,450,519	3,480,541,758
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	185,961,100	156,675,700
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	122,286,800	119,053,904
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	153,559,600	141,480,374
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	18,370,000	15,191,300
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tahun 2024 tidak ada di Kota Padang Panjang		
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	92.995.100	6.664.235
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.482.074.000	1.171.506.159
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.069.680.000	1.018.190.811
9	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.533.669.173	7.390.667.52
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.684.792.200	4.634.424.883
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.520.170.583	4.371.734.883
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.398.239.200	1.959.718.688
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.846.011.000	1.826.649.501
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.664.329.082	8.369.744.997
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	5.659.400	5.230.450
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	22.484.200	18.059.850
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	1.604.114.000	1.007.943.675
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.919.607.400	4.385.318.850

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
12	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	0
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	573.882.651	528.953.232
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	479.493.900	451.663.894
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.136.494.008	4.997.903.174
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	174.913.600	169.109.584
		PROGRAM PENGEMBAGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000	107.840.507
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.721.092.266	23.075.137.559.13
14	STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	7.068.000	6.088.750
15	PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11.937.000	11.485.875
16	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	341,476,000	333,466,995
17	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.449.610.129	4.404.395.251
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	573.906.800	477.811.271
18	KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	137.979.250	133.664.305
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	90.468.500	89.231.130
URUSAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	552.350.000	531.452.349,55
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	61.986.260	59.077.578
2	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.357.221.600	1.333.764.732
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	175.360.500	173.355.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	103.177.000	92.704.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	133.030.050	121.131.504
3	PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.779.687.320	2.752.954.973
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	113.154.300	109.429.025
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	364.530.100	353.873.161
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	54.878.250	50.687.980
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	322.955.060	297.117.243
4	KEHUTANAN	Tahun 2024 tidak ada di Kota Padang Panjang		
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Tahun 2024 tidak ada di Kota Padang Panjang		
6	PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	77.459.300	67.976.250
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.624.419.650	5.391.961.975,46
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	184.254.400	156.785.600

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	189.609.050	138.203.255
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGER	461.611.000	437.824.507
7	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	749.634.750	701.836.100
8	TRANSMIGRASI	Tahun 2024 tidak ada di Kota Padang Panjang		
PENUNJANG URUSAN				
1	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,286,506,723	6,286,506,723
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	524,769,000	517,038,800
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	158,682,000	138,759,595
2	BAPPEDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,573,652,844	5,503,276,027
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	430,669,952	395,448,701
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	82,814,850	77,961,250
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	84,367,900	80,193,035
3	BPKD	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,727,077,997	8,341,386,639
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,991,333,900	1,546,286,529
		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	159,645,000	112,823,300
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	274,005,850	1,049,258,790
4	BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,873,944,568	7,606,432,608
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	602,013,800	567,475,272
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,241,221,200	1,132,561,036
URUSAN PENDUKUNG				
1	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	28.093.102.840	27.194.446.948
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.775.839.900	11.769.433.065
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	494.880.950	451.035.944
2	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	21.048.195.494	19.489.571.740
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.610.023.500	19.705.224.037
URUSAN KEWILAYAHAN				
1	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.265.837.780	10.034.868.419
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.224.074.700	4.107.797.302
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.782.219.650	3.482.027.970
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.780.800	15.424.550
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.852.450	41.105.250

No	Urusan Pemerintah Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4	5
2	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.725.994.112	11.643.353.546
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.573.679.600	3.530.639.653
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.174.936.900	3.090.042.550
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.750.000	7.750.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	267.174.700	244.558.625
URUSAN BPBD, KESATUAN BANGSA & POLITIK				
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.295.953.080	5.247.945.626
		PROGRAM PENANGGULANGAN BNCANA	1.274.223.434	1.110.737.374
		PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.043.115.600	1.037.869.569
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMABAGA PENDIDKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	12.197.636.798	12.162.085.039
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	0
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	132.025.700	123.547.100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	535.049.250	49.710.898

Sumber: LKPJ Padang Panjang Tahun 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

a. Masalah Kemiskinan dan Pengangguran

Kota Padang Panjang masih menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,24%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,14%. Meskipun lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera Barat (5,95%) dan nasional (9,36%), tren kenaikan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ekstrem juga mengalami kenaikan dari 0% pada tahun 2022 menjadi 1,07% atau sekitar 610 jiwa pada tahun 2023. Perubahan metode pengukuran dan indeks kemahalan daerah berkontribusi pada lonjakan ini. Di sisi lain, pengangguran juga menjadi isu krusial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 mencapai 5,49%, meningkat dari target 4,84%, dengan jumlah angkatan kerja yang bertambah 2.434 jiwa (9,3%) dari tahun sebelumnya. Penyebab utama pengangguran adalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta minimnya investasi baru yang menciptakan lapangan

kerja. Kurangnya integrasi data antara DTKS dan P3KE juga menjadi hambatan dalam efektivitas penyaluran bantuan sosial, sehingga program penanggulangan kemiskinan belum memberikan dampak yang optimal.

b. Tantangan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berdaya Saing

Pendidikan di Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan positif, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan akses. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 mencapai 11,94 tahun, sedikit di bawah target 12,28 tahun, sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 15,29 tahun. Meskipun angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP 0%, masih terdapat ketimpangan dalam standar pendidikan, terutama dalam akreditasi sekolah. Dari 38 SD, masih ada 7 SD berakreditasi B dan 1 SD belum terakreditasi. Sedangkan dari 13 SMP, masihada 2 SMP berakreditasi C dan 1 SMP belum terakreditasi.. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan mutu pendidikan di beberapa institusi. Selain itu, tingkat literasi dan numerasi siswa masih belum optimal dengan indeks SPM Pendidikan 77,98 dalam rapor pendidikan. Tantangan lain adalah belum meratanya digitalisasi pembelajaran, yang menghambat inovasi dan adaptasi terhadap era teknologi. Pendidikan karakter juga belum diterapkan secara konsisten, terutama di sekolah negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, menyeimbangkan pendidikan akademik dan karakter, serta memperluas akses pendidikan berbasis digital.

c. Permasalahan Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan di Kota Padang Panjang mengalami kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menangani kasus stunting dan meningkatkan indeks kesehatan keluarga. Tahun 2023, angka stunting meningkat menjadi 14,09%, naik 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan masih perlunya intervensi lebih besar dalam gizi anak dan ibu hamil. Selain itu, Indeks Keluarga Sehat (IKS) hanya mencapai 0,46, yang menunjukkan bahwa banyak keluarga masih berada dalam kategori tidak sehat. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Kurangnya tenaga kesehatan di beberapa fasilitas pelayanan juga memperburuk situasi ini. Program seperti Indonesia Sehat dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu diperkuat agar angka stunting dapat ditekan dan indeks kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

d. Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah Belum Maksimal

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami peningkatan, tetapi Kota padang Panjang menghadapi berbagai tantangan serius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tercatat sebesar 4,84%, meningkat dari 4,39% di tahun 2022. Namun, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019 yang

mencapai 5,56%, sebelum pandemi COVID-19 melanda dan menyebabkan kontraksi ekonomi hingga -1,44% pada tahun 2020. Selama periode 2019-2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang hanya 3,36% per tahun, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat (3,14%) dan nasional (3,40%).

Salah satu tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah ketergantungan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yang menyumbang 18,04% terhadap PDRB. Sektor ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama akibat inflasi dan daya beli masyarakat yang belum stabil. Sektor Transportasi dan Pergudangan (12,12%) juga mengalami tantangan besar akibat kenaikan biaya operasional, bahan bakar, serta fluktuasi permintaan jasa logistik. Sektor Informasi dan Komunikasi (9,52%) tumbuh cukup baik, tetapi belum cukup besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, sektor yang berpotensi besar justru mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang rendah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang memiliki luas lahan pertanian sekitar 60% dari total wilayah kota, hanya menyumbang sekitar 5,05% – 5,14% terhadap PDRB. Hal ini mencerminkan rendahnya produktivitas pertanian akibat keterbatasan inovasi, minimnya diversifikasi produk, serta alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang berperan penting dalam mendukung pariwisata, masih belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Pada tahun 2023, sektor ini hanya tumbuh sebesar 3,91%, masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekznomi kota secara keseluruhan.

Tantangan lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya investasi dan kurangnya industri manufaktur. Hingga tahun 2023, belum banyak investasi baru yang masuk ke Kota Padang Panjang, yang mengakibatkan kurangnya penciptaan lapangan kerja baru dan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi berbasis industri. Indikator lain yang menjadi perhatian adalah laju inflasi yang fluktuatif, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,76%, jauh di atas inflasi nasional sebesar 5,51%, yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan bahan pangan lainnya.

Dengan kondisi ini, Kota Padang Panjang masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan merata. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi yang lebih kuat, peningkatan daya saing sektor pertanian dan industri kreatif, serta kebijakan yang lebih menarik bagi investor untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Tanpa upaya konkret dalam mengatasi tantangan ini, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berisiko stagnan dan sulit untuk mencapai target pembangunan jangka panjang.

e. Tantangan Implementasi Kinerja Pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Kota Padang Panjang telah mengalami kemajuan dalam reformasi birokrasi, tetapi masih menghadapi kendala dalam implementasi

perubahan. Salah satu tantangan utama adalah kurang optimalnya penerapan 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi, yang menghambat peningkatan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Selain itu, dari berbagai rekomendasi inspektorat yang diberikan kepada pemerintah daerah, baru 80,21% yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023, menunjukkan masih ada aspek dalam pengelolaan pemerintahan yang perlu diperbaiki. Digitalisasi pemerintahan juga belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mengadopsi teknologi, serta memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

f. Masalah Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kota Padang Panjang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,91%, melampaui target 1,50% yang ditetapkan dalam RKPD. Meskipun menunjukkan perbaikan, beberapa aspek layanan infrastruktur masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam akses air minum yang baru mencapai 90,72%, serta cakupan layanan sanitasi layak yang masih di angka 89,55%. Selain itu, sistem drainase di beberapa titik masih mengalami kendala, dengan 92% sistem drainase belum mampu mengatasi genangan air saat hujan, yang berisiko menimbulkan banjir di wilayah tertentu.

Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang pada tahun 2023 tercatat sebesar 68,44, lebih rendah dari target 72,87, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya Indeks Kualitas Air, yang hanya mencapai 47,21, masih tergolong buruk akibat tingginya kandungan bakteri coli di hampir tujuh aliran sungai di kota ini. Masalah ini diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar hulu sungai berasal dari Kabupaten Tanah Datar, sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang mengalami kesulitan dalam mengendalikan pencemaran air. Selain itu, meskipun tingkat pengelolaan sampah cukup tinggi, yaitu 98,48%, tingkat pengurangan sampah oleh masyarakat masih rendah, hanya 16,28%, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya 4,18% dari luas wilayah terbangun, jauh di bawah standar ideal 10% yang ditetapkan Kementerian PUPR. Minimnya lahan untuk penghijauan menyebabkan menurunnya kualitas udara dan berkurangnya area resapan air, yang dapat memperburuk dampak perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi terpadu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, termasuk peningkatan investasi dalam pengelolaan air bersih, optimalisasi sistem drainase,

serta kebijakan yang lebih ketat dalam pengendalian pencemaran sungai dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

g. Permasalahan Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Kota Padang Panjang cukup harmonis, tetapi masih terdapat tantangan dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan. Kota Padang Panjang masih menghadapi tantangan dalam pelestarian budaya, peningkatan ketertiban umum, serta kesejahteraan sosial. Perkembangan urusan kebudayaan dapat dilihat dari indikator jumlah pameran/expo, festival seni dan budaya, serta jumlah benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2023, jumlah pameran/expo yang diadakan tetap 1 kali, sama seperti tahun 2022. Penyelenggaraan festival seni dan budaya juga masih stagnan, hanya 1 kali dalam setahun sejak tahun 2021, menurun drastis dibandingkan 5 kali pada tahun 2019. Dari segi pelestarian, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tetap 14 lokasi, tanpa ada peningkatan sejak tahun 2022.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada program pelestarian budaya, perkembangannya masih minim. Hal ini menandakan bahwa perlu ada peningkatan dalam program pembinaan seni, budaya, serta dukungan lebih lanjut untuk komunitas kesenian agar pelestarian budaya daerah dapat berkembang lebih baik.. Generasi muda lebih terpapar budaya global dibandingkan budaya lokal, sementara pemahaman dan pengamalan ajaran agama masih cenderung bersifat simbolik. Di sisi lain, ketertiban umum juga menjadi perhatian. Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) di Kota Padang Panjang masih menghadapi tantangan meskipun telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran Perda tercatat sebanyak 134 kasus, yang terdiri dari 12 kasus pelanggaran Perda Pekat (Penyakit Masyarakat) dan 122 kasus pelanggaran Perda lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatat 134 kasus pelanggaran, jumlah ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, satu kemajuan yang dicapai adalah bahwa 100% dari kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 telah tertangani sepenuhnya.

Meski Satpol PP dan Linmas terus berperan dalam menjaga ketertiban, jumlah personel yang terbatas menghambat efektivitas pengawasan.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, capaian kinerja urusan sosial Kota Padang Panjang pada tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari 3.285 orang pada tahun 2022 menjadi 2.756 orang pada tahun 2023, menandakan efektivitas berbagai program kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah. Penurunan ini didukung oleh optimalisasi berbagai sumber daya kesejahteraan sosial, termasuk keberadaan 92 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif di berbagai wilayah.

Selain itu, validitas dan integrasi data antara DTKS, P3KE, dan Regsosek masih perlu ditingkatkan agar program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Untuk memperbaiki layanan kesejahteraan sosial, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal dan memperluas cakupan jaminan sosial berbasis data elektronik yang lebih akurat dan terintegrasi. program rehabilitasi sosial bagi anak telantar, lansia terlantar, serta tuna sosial telah mencapai 100%, namun penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala akibat ketidaksesuaian data antara DTKS, P3KE, dan Regsosek. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan strategi terpadu yang mencakup penguatan peran lembaga adat dan agama, optimalisasi sosialisasi dan penegakan hukum, serta integrasi sistem data kesejahteraan sosial agar bantuan lebih tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintah merupakan penjelasan terhadap masalah yang perlu ditindaklanjuti melalui strategi dan kebijakan yang dijabarkan oleh perangkat daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Permasalahan sebagaimana dimaksud menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi seluruh Perangkat Daerah berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Padang Panjang. Adapun permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Belum terpenuhinya kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Kompetensi Literasi dan Numerasi);
b. Belum terpenuhi standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan sertifikat dari Diklat Teknis relatif rendah;
c. Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 tahun masih rendah;
d. Tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah dasar swasta sehingga tidak terpenuhinya rombel pada sekolah dasar negeri;
e. Masih terdapat beberapa sekolah yang terbengkalai beserta kelengkapan sarana prasarana belum memadai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Masih tingginya kasus stunting;
b. Tingginya kasus rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Rumah Sakit;
c. Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
d. Masih terdapatnya peningkatan kasus penyakit menular;
e. Masih adanya kasus kematian ibu hamil;

f. Masih adanya kasus kematian bayi;
g. Rendahnya indeks keluarga sehat;
h. Belum tersedianya fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Poskeskel) yang memenuhi standar mutu;
i. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum tercapai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya layanan infrastruktur drainase (drainase berkualitas baik baru mencapai 92% dan seringnya terjadi genangan saat hujan);
b. Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan;
c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur SDA (rasio jaringan irigasi baru mencapai 0.0039%);
d. Belum optimalnya layanan infrastruktur air minum kota (cakupan layanan air minum baru mencapai 86,40%);
e. Belum optimalnya Layanan infrastruktur air limbah (cakupan sanitasi layak baru mencapai (89,55%);
f. Belum optimalnya implementasi aturan bangunan gedung;
g. Kurangnya kompetensi penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan bangunan (tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru mencapai 61%);
h. Belum optimalnya implementasi tata ruang (Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai tata ruang baru 96,83%).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh (persentase pengurangan kumuh baru mencapai 81,74%);
b. Belum memadai ketersediaan rumah layak huni (rasio rumah layak huni baru mencapai 96,30%);
c. Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU 84,74%);
d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas;
b. Masih adanya kasus penyakit masyarakat;
c. Belum optimalnya penegakan perda;
d. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda;
e. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan terhadap bencana alam dan kebakaran.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a. Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
c. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan;
d. Belum optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Keterbatasan lapangan kerja di Kota Padang Panjang;
b. Kurangnya kompetensi pencari kerja;
c. Rendahnya jiwa wirausaha masyarakat terutama kawula muda;
d. Rendahnya serapan tenaga kerja yang sudah dilatih (serapan tenaga kerja yang dilatih baru 49%);
e. Belum optimalnya jalinan kerja sama dengan mitra jaringan kerja sama tenaga kerja.
f. Belum optimalnya perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja sektor formal;
g. Belum terlindunginya seluruh pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori fakir dan miskin (persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapat BPJS ketenagakerjaan baru 83%).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan;
b. Belum optimalnya pemenuhan terhadap hak anak;
c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

a. Belum optimalnya Pola Pangan Harapan (skor PPH masih berada di angka 87,4);
b. Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi;
c. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Masih rendahnya database pertanahan;
b. Masih belum optimalnya penyertifikatan Tanah Milik Daerah.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan (Persentase penanganan sampah 82,20% dan pengurangan sampah masih 16,28%);
b. Daya tampung TPA Sungai Andok yang sudah penuh (Kondisi TPA Sungai andok sudah *overload* pada tahun 2024);
c. Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
d. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan (Pelaku usaha yang mengurus dan mematuhi ketentuan rekomendasi izin lingkungan baru 55,6%);

e. Belum adanya Kerja sama dengan daerah *interland* dalam penanganan sampah dan pencemaran sungai;
f. Belum optimalnya pengendalian dan penegakan Perda lingkungan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum optimalnya proses pengelolaan dan dokumentasi kependudukan;
b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan masih 39%);
b. Belum optimalnya penguatan lembaga masyarakat di tingkat kota dan kecamatan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Belum optimalnya penyelenggaraan upaya pengendalian penduduk;
b. Masih tingginya *Unmeet Need*;
c. Belum optimalnya penyelenggaraan Program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. Belum optimalnya penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat (jumlah angkutan umum tidak bertambah dari tahun ke tahun hanya 110 armada);
b. Belum Optimalnya layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat (ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas baru mencapai 84,30%);
c. Belum optimalnya pengoperasian UPTD PKB (persentase kendaraan yang melakukan keur baru 77,43%).

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan layanan informasi publik;
c. Belum optimalnya kerja sama dengan media dan mitra strategis lainnya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Belum optimalnya tata kelola koperasi (persentase koperasi sehat hanya 40,00%);
b. Belum optimalnya produktivitas UMKM.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Kurangnya informasi potensi investasi;
b. Promosi yang terbatas;
c. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
d. Tingkat kesadaran pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga

a. Belum optimalnya prestasi atlet di Kota Padang Panjang;

b. Daya saing keolahragaan masih rendah;
c. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan;
d. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan sebagai wahana kreativitas pemuda;
e. Belum optimalnya aktivitas organisasi kepemudaan.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas;
b. SDM bidang Statistik tidak ada yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;
c. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Masih rendahnya pengamanan informasi pemerintah daerah (tingkat keamanan informasi daerah sebesar 222);
b. Belum optimalnya antisipasi dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
b. Belum optimalnya penguatan lembaga adat dalam pembentukan tatanan kehidupan sosial masyarakat.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Masih rendahnya minat baca dan literasi masyarakat;
b. Belum optimalnya pemanfaatan koleksi *e-book*.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

a. Belum efektifnya pengelolaan arsip di OPD;
b. Masih rendahnya minat dan terbatasnya sumber daya aparatur di bidang arsiparis.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Rendahnya kunjungan wisata di Kota Padang Panjang (jumlah kunjungan wisata pada tahun 2023 sebanyak 500.807 orang)
b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata;
c. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan pariwisata (persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD baru 2,08%);
d. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif (sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina baru berjumlah 14 sub sektor);

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan (produktivitas tanaman pangan masih berkisar antara 0,85% - 21,3%);
b. Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan (produksi daging sapi tahun 2023 sebanyak 773.532 ton);
c. Belum Optimalnya Produktivitas Perikanan;
d. Masih Terbatasnya Adopsi Inovasi Teknologi (Persentase Kelompok yang Menerapkan Teknologi);

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Menurunnya kunjungan masyarakat ke pasar pusat;
b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pasar pusat;
c. Belum optimalnya penataan pasar baik pasar pusat maupun pasar kuliner sebagai pusat perdagangan;
d. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor perdagangan;
e. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Perdagangan;

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor industri;
b. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku industri;
c. Belum optimalnya pemasaran produk hasil industri (persentase peningkatan produktivitas IKM baru 18%).

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Belum Optimal;
b. Pengendalian dan Evaluasi belum Optimal;
c. Pengelolaan data dan Informasi Pembangunan belum Optimal;

2. Keuangan Daerah

a. Belum Optimalnya Kualitas Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran;
b. Belum Optimalnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
c. Pendapatan Daerah tidak terealisasi secara optimal;
d. Rendahnya akurasi Laporan Barang Milik Daerah;

3. Kepegawaian

a. Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal;
b. Belum optimalnya penetapan sistem tunjangan kinerja yang sesuai dengan kinerja ASN;
c. Belum optimalnya manajemen ASN;
d. Masih rendahnya profesionalisme ASN;

4. **Pendidikan dan Pelatihan**
   a. Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya;
   b. Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat;
5. **Penelitian dan Pengembangan**
   a. Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan masih kurang;
   b. Pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah Belum Optimal;
6. **Pengawasan**
   a. Belum maksimalnya Pengawasan Internal Pemerintah;
   b. Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan dan Kapabilitas APIP;

e. Unsur Kewilayahan

1. **Kecamatan**
   a. Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah;
   b. Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik;
   c. Belum optimal partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan publik (Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan baru 39,00%).

f. Unsur Pemerintahan Umum

1. **Kesatuan Bangsa dan Politik**
   a. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik;
   b. Masih Kurangnya Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, serta Kerukunan Umat Beragama;
   c. Masih Rendahnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
   d. Masih belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 yang tertuang dalam dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah **"UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT"**.

Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang periode 2018-2023, yaitu Fadly Amran - Drs. Asrul, berakhir pada 9 Oktober 2023. Setelah itu, kepemimpinan Kota Padang Panjang diisi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4102 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada 7 Oktober 2023.

Jabatan Penjabat Wali Kota dipercayakan kepada Sony Budaya Putra, AP., M.Si. Kemudian, terbit kembali SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4250 Tahun 2024 tertanggal 9 Oktober 2024, yang memperpanjang masa jabatan Penjabat Wali Kota Padang Panjang dengan pejabat yang sama.

Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya atau karena kepala daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri juga dapat ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Berbeda dengan kepala daerah definitif, Penjabat Wali Kota tidak memiliki visi dan misi secara politis, karena diangkat langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, acuan utama dalam menjalankan tugasnya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang menjadi pedoman dalam melanjutkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Padang Panjang.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2018-2023 berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, dan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018- 2023 berakhir pada tahun 2023 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang yang akan berakhir tahun 2023.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024- 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025-2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

4. RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1. Tujuan RPD

Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.
b. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel.
c. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan.
d. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertram dan agamis
e. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah di atas maka disusunlah sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Sasaran merupakan rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya suatu tujuan.

2. Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah di atas maka disusunlah sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Sasaran merupakan rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya sasaran dari masing- masing tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) yang berdaya saing untuk menghadapi tantangan zaman merupakan salah satu prioritas Kota Padang Panjang. Pembangunan SDM ini tidak hanya menyentuh sisi pendidikan saja, akan tetapi juga menyentuh sisi kesehatan, ekonomi serta peran serta dan keaktifan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing yang kuat.

Pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan lulusan menjadi tujuan utama yang harus dicapai. Sarana dan prasarana, menjadi tujuan utama yang harus ditingkatkan untuk mencapai standar dan mutu pendidikan, disamping itu peningkatan adopsi teknologi informasi dan komunisasi dalam pelaksanaan pendidikan atau digitalisasi proses pendidikan menjadi sesuatu yang hendak diwujudkan dalam rangka peningkatan standar dan mutu pendidikan untuk memacu mewujudkan SDM yang berdaya saing.

Pada sektor kesehatan, optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing menjadi hal yang penting diupayakan. Melalui optimalisasi penekanan angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, optimalisasi pelayanan maternal dan neonatal, penurunan angka stunting, penguatan layanan primer dan rujukan, peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan imunisasi dasar lengkap (IDL) untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskeskel.

Peran serta pemuda dalam pembangunan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan daya saing SDM. Ada 2 sektor yang akan ditingkatkan melalui pemuda yaitu peningkatan daya saing pemuda dari sektor peran pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan.

Peningkatan peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menjadi salah satu tanda menurunannya tingkat kesenjangan akses dan kesempatan antara perempuan dengan laki-laki dalam pembangunan, Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendorong dan meningkatkan keaktifan organisasi- organiasasi perempuan dalam pembangunan.

Sisi lain yang juga perlu di sentuh adalah peningkatan infrastruktur kota menuju Kota Layak Anak, sehingga dapat menjamin terciptanya suasana yang kondusif bagi anak dalam melaksanakan aktifitas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) yang berdaya saing perlu dilakukan upaya yang komprehensif sehingga daya saing tersebut tercipta secara merata.

Indikasi tercapainya Tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang bedaya saing dapat di lihat melalui 4 (empat) rumusan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak ;
4. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas akan dicapai dengan 13 program oleh 6 OPD seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian standar pelayanan minimal kependidikan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Pustaka	OPD yang menangani Urusan Bidang perpustakaan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemerintahan Umum
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	OPD yang menangani Urusan Bidang Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	OPD yang menangani Urusan Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender,pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	● Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD ● Persentase organisasi perempuan yang aktif	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya daya saing kepemudaan dankeolahragaan	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	OPD yang menangani Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	OPD yang menangani Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Membangun tatakelola Pemerintahan yang professional, bersih dan akuntabel tidak hanya semata menciptakan regulasi yang baik saja, akan tetapi lebih kepada mewujudkan budaya kerja yang baik dengan meningkatkan kualitas kompetensi ASN sebagai pelaksana, peningkatan infrastruktur penunjang serta meningkatkan loyalitas serta kepatuhan terhadap regulasi.

Transformasi digital menjadi isu yang penting dalam menciptakan layanan kepada masyarakat. Transformasi digital tidak hanya sekedar merubah layanan konvensinal menjadi layanan digital atau online saja, akan tetapi lebih kepada menciptakan layanan yang terintegrasi terhadap seluruh area pelayanan sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani.

ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien, efektif dari segi birokrasi dan efisien dari segi waktu dan tempat layanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan layanan yang baik adalah mempercepat implementasi transformasi digital dalam rangka menciptakan good governance. Di lain sisi disamping mempercepat implementasi transformasi untuk membentuk tatakelola pemerintahan baik, aspek pengelolaan keuangan daerah juga harus di menjadi perhatian, tidak hanya pada fase perencanaan keuangan akan tetapi juga mencakup pada penatausahaan dan pelaporan. Pengelolaan keuangan yang baik bersih dan transparan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang menjadi tujuan dalam implementasi tatakelola pemerintahan yang professional bersih dan akuntabel.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daearah di ukur dengan capaian nilai sakip, opini laporan keuangan, indeks merit sistem, maturitas SPIP, nilai penyelenggaran pemerintah daerah dan Indeks SPBE. Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah yang professional akan di upayakan melalui 10 program oleh 7 OPD. Program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemerintahan Umum
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	OPD yang menangani Urusan Bidang Perencanaan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	OPD yang menangani Urusan Bidang Keuangan
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	OPD yang menangani Urusan Bidang Kepegawaian
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek dan sosialisasi	OPD yang menangani Urusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	Program Penyelenggaran Pengawasan	Persentase pengawasan yang tuntas dilaksanakan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pengawas
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian aksi pada Aplikasi MCP	OPD yang menangani Urusan Bidang Pengawas
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	OPD yang menangani Urusan Bidang Pemerintahan Umum
	Program Pengelolaan aplikasi informatika	Indeks domain tata kelola SPBE	OPD yang menangani Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoratl	Indeks KAMI	OPD yang menangani Urusan Bidang Statistik

c. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun di latar belakangi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda, hampir seluruh sektor terdampak oleh Pandemi Covid-19 ini, pembatasan ruang gerak masayarakat menjadi faktor utama dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Sulitnya bertransaksi di pasar tradisional, sulitnya mendapatkan bahan baku, menurunnya daya beli masyarakat merupakan aspek- aspek kunci yang membuat roda perekonomian menjadi melambat. Maka untuk meningkatkan daya saing perekonomian yang dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya konkrit sesuai

dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan produksi dan pemasaran produk unggulan Kota Padang Panjang

Salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat berbasis pada sektor ekonomi unggulan daerah. Peningkatan daya saing perekonomian dilakukan dengan metode peningkatan nilai tambah secara berkesinambungan, nilai tambah yang dimaksud erat kaitannya dengan produktifitas sektor perekonomian.

Dalam upaya peningkatan daya saing perekonomian ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah peningkatan produksi produk unggulan melalui UMKM Kota Padang Panjang, meningkatkan nilai investasi di Kota Padang Panjang, menciptakan stabilitas ekonomi melalui upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara peningkatan omset dan peningkatan kompetensi pelaku usaha.

Merujuk kepada uraian pada Bab IV, ada beberapa sektor ekonomi yang dapat dikembangkan dan menjadi unggulan Kota Padang Panjang yaitu sektor perdagangan jasa, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Untuk peningkatan daya saing dari sektor unggulan ini perlu dilakukan upaya lebih untuk menigkatkan akses terhadap perdagangan dan jasa seperti peningkatan infrastruktur pasar menuju pasar ber SNI, peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai media promosi produk, peningkatan produksi UMKM Kota Padang Panjang.

Dalam pencapaian sasaran pada tujuan Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan akan di upayakan melalui .. program, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.20
Program Prioritas Pencapaian Sasaran Pada Tujuan Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar berSNI	OPD yang menangani Urusan Bidang Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	OPD yang menangani Urusan Bidang Perdagangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Bidang Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	OPD yang menangani Urusan Bidang Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor Ekonomi kreatif yang sudah dibina	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
Meningkatnya investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Promosi penanaman modal	Nilai investasi	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pengembangan UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM yang dibantu	OPD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	OPD yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
			Permukiman
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pertanian
	Program Pelatiha Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	OPD yang menangani Urusan Penanaman Modal
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	OPD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	OPD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penyedian dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pertanian
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	OPD yang menangani Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina.	OPD yang menangani Urusan Pariwisata

d. Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis.

Terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang tentram dan agamis merupakan tujuan berkelanjutan yang harus di upayakan. Perubahan zaman akan menyebabkan tatanan kehidupan juga akan berubah, penyesuaian dan adaptasi semestinya tidak merubah kaedah-kaedah dasar yang menjadi pondasi dalam kehidupan. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota Kecil di Sumatera Barat merupakan Kota yang dijuluki dengan Kota Serambi Mekah dan menganut kepada falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basndi Kitabullah”. Maka dari itu keberlanjutan menjaga dan melestari nilai agama, adat dan budaya harus menjadi perhatian penuh.

Disamping menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur agama, adat dan budaya, untuk memperkokoh tatanan sosial maka perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, menjaga dan melindungi masyarakat dari dampak pelanggaran perda yang akan mengganggu stabilitas sosial masyarakat seperti tindak kriminalitas, prilaku menyimpang seperti perjudian, pencurian dan lain-lain.

Peningkatan upaya penaganan masalah penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang tertram dan agamis, permasalahan yang menjadi focus Padang Panjang terkait PPKS diantaranya adalah penanganan lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi serta jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Dalam pencapaian sasaran pada tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis akan di upayakan melalui 5 program oleh 4 OPD. Program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	OPD yang menangani Urusan kebudayaan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran Perda dan Trantibum	OPD yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	OPD yang menangani Urusan Bidang Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	OPD yang menangani Urusan Bidang Sosial

e. Terwujudnya Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas.

Untuk mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ada dua hal yang perlu diperhatikan secara umum yaitu infrastruktur dasar perkotaan dan kondisi lingkungan hidup. Infrastruktur dasar mencakup kepada layanan infrastruktur kota terkait kualitas layanan infrastruktur ke PU an, kualitas layanan infrastruktur perumahan dan permukiman serta kualitas layanan infrastruktur perhubungan. Sedangkan untuk lingkungan hidup mencakup kepada kualitas air, udara dan tutupan lahan. Infrastruktur dasar dan lingkungan hidup merupakan hal yang penting di perhatikan secara berkelanjutan, karena hal ini menyangkut kepada salah satu kebutuhan dan layanan dasar msyarakat.

Pencapaian Tujuan dan sasaran ini akan dicapai melalui 10 program prioritas pada tiga OPD. Gambaran tentang program prioritas pada tujuan dan sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.22
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal yang bersanitasi Layak	OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	OPD yang menangani Urusan Perumahan, Permukiman Penduduk
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	OPD yang menangani Urusan Perumahan, Permukiman Penduduk
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Persentase layanan angkutan darat • Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor • Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	OPD yang menangani Urusan Perhubungan
Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan	Persentase ketaatan pelaku	OPD yang menangani Urusan

Sasaran	Program	Indikator Program	OPD
	Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	OPD yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024)

Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, maka tahun 2024 arah kebijakan yang dilaksanakan adalah penuntasan pencapaian target pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan pencapaian target RPD Tahun 2024-2026. Adapun program prioritas pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.23
Prioritas, Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	PRIORITAS	FOKUS		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
I	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	1	Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan	1	Pemenuhan Sarana prasarana Pasar
		2	Meningkatkan produktifitas sektor pertanian	2	Penguatan kapasitas SDM Pengelola Perdagangan
		3	Meningkatkan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	3	Penguatan Regulasi perdagangan
				4	Melakukan Edukasi pedagang
				5	Perluasan pangsa pasar/ memperluas jejaring perdagangan
				6	Perluasan jaringan kerjasama
				7	Penguatan SDM koperasi dalam mengelola Usaha
				8	Penumbuhan Koperasi berbasis Masyarakat
				9	Membangun jejaring produksi dan pemasaran
				10	Adopsi Teknologi Informasi dalam meningkatkan daya saing UMKM
				11	Menumbuh kembangkan jiwa enterpereneurship
				12	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tanaman pangan
				13	Meningkatkan SDM pengelola Tanaman Pangan
				14	Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
				15	Pengendalian hama dan penyakit tumbuhan
				16	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peternakan
				17	Meningkatkan SDM pengelola Peternakan
				18	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
				19	Melaksanakan Pemantaua harga
				20	Kerjasama antara daerah dalam pemenuhan pasokan pangan
				21	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi ketersediaan pangan
				22	Memperkuat kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian
				23	Identifikasi potensi olahraga rekreasi
				24	Pembinaan olahraga rekreasi
				25	Optimalisasi Pengembangan Wisata halal
				26	Mewujudkan zona KHAS (kuliner halal dan sehat, aman dan sehat)

NO	PRIORITAS	FOKUS		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
				27	Meningkatkan pemenuhan standarisasi pariwisata
				28	Memperkuat aspek amenitas, akses dan atraksi pada kawasan, destinasi dan daya tarik pariwisata
				29	Peningkatan Even berkualitas
				30	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata
				31	Penguatan promosi dan pemasaran kepariwisataan
				32	Pengembangan produk ekonomi kreatif berkualitas berbasis potensi dan budaya lokal
				33	Penguatan Kualitas pemasaran produk ekonomi kretif
				34	Fasilitasi kemudahan Investasi
				35	Peningkatan Promosi Investasi
				36	Membangun Jejaring Investasi
II	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1	Identifikasi tipologi kemiskinan
		2	Meningkatkan kompetensi pencari kerja	2	Koordinasi lintas sektor
		3	Meningkatkan kesempatan kerja	3	Pemberian bantuan Pendidikan siswa tidak mampu
				4	Pemberian jaminan Kesehatan masyarakat miskin
				5	Rehab rumah tidak layak huni
				6	Pemberian stimulan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal
				7	Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin
				8	Meningkatkan enterprenuership pencari kerja
				9	Peningkatan kompetensi pencari kerja
				10	Meningkatkan promosi dan jejaring kerja
III	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1	Permenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai standar	1	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan
		2	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	2	Implementasi kurikulum merdeka belajar
		3	Peningkatan daya saing kepemudaan dan olahraga	3	Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				4	Mengembangkan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan digital
				5	Peningkatan literasi berbasis masyarakat
				6	Pemberian program beasiswa bagi anak berprestasi
				7	Penguatan Kapasitas Kepemudaan
				8	Peningkatan Kompetisi Kepemudaan berkualitas
				9	Pembinaan Olahraga berkelanjutan
				10	Peningkatan sarana dan prasaran olahraga
				11	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan
IV	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Percepatan penurunan stunting	1	Peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak
		2	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2	Penguatan program imunisasi dasar lengkap
		3	Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan	3	Peningkatan upaya promotif gizi anak, remaja dan ibu
				4	Peningkatan upaya promotif dan prefentif melalui UKBM dengan pendekatan keluarga
				5	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit
				6	Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang
				7	Pengembangan dan perluasan program Imunisasi Dasar Langsung
				8	Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat
				9	Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				10	peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan

NO	PRIORITAS	FOKUS		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
					pemberdayaan masyarakat
				11	Peningkatan kapasitas SDM TPK dan kader BKR dalam pendampingan dan pembinaan keluarga rawan stunting
				12	Peningkatan edukasi bagi PUS tentang 1000 HPK
V	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1	Penanganan banjir	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana
		2	Penanganan sampah	2	Peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
		3	Penanganan air limbah	3	Peningkatan drainase perkotaan
		4	Peningkatan infrastruktur kota	4	Pemeliharaan jaringan drainase perkotaan
				5	Penyediaan drainase perkotaan
				6	Pembangunan/ pemeliharaan IPAL komunal
				7	Rehab/ pemeliharaan IPLT
				8	Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah
				9	Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan air limbah
				10	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana air limbah
				11	Penyediaan Jaringan Jalan Perkotaan
				12	Pemeliharaan jalan perkotaan
				13	Rehabilitasi jaringan Jalan perkotaan
				14	Penyediaan Jaringan Irigasi Permukaan
				15	Pemeliharaan Irigasi permukaan
				16	Rehabilitasi jaringan Irigasi permukaan
				17	Fasilitasi perizinan bangunan Gedung
				18	Fasilitasi Penataan Bangunan dan gedung
				19	Penguatan regulasi kawasan permukiman
				20	Penguatan koordinasi/ kolaborasi lintas sektor penanganan kumuh
				21	Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan
				22	Penyediaan dan pemeliharaan drainase lingkungan
				23	Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman
				24	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana LLAJ
				25	Pembenahan rekayasa lalu lintas
				26	Penegakan Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
				27	Sosialisasi/ Kampanye Kesadaran berlalu Lintas
				28	Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
				29	Penyediaan dan penataan Tempat Parkir
				30	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan
				31	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
				32	Kerjasama pengelolaan sampah
				33	Penyusunan regulasi perencanaan, pemanfaataan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				34	Optimalisasi sosialisasi produk tata ruang
				35	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				36	Penguatan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan
				37	Penguatan kerjasama dengan daerah tetangga
				38	Optimalisasi pengawasan pencemaran lingkungan
				39	Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan

NO	PRIORITAS	FOKUS		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
				40	Pembinaan kampung iklim
				41	Penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
VI	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)	1	Peningkatan kompetensi ASN	1	Meningkatkan implementasi SAKIP
		2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		3	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	3	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
				4	Meningkatkan kualitas implementasi sistem merit
				5	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
				6	Peningkatan kualitas pelaksanaan PBJ
				7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
				8	Penyusunan regulasi pemanfaatan aplikasi
VII	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	1	Meningkatkan trantibum	1	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
		2	Percepatan penanganan bencana	2	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hukum anak
		3	Peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat	3	Peningkatan keterlibatan seluruh pihak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		4	Peningkatan kegiatan kebudayaan di masyarakat	4	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak
		5	Penanganan masalah kesejahteraan social	5	Penguatan koordinasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai agama
				6	Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama
				7	Pemberdayaan lembaga resmi pengelola zakat dan wakaf milik pemerintah
				8	Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini
				9	Penindakan atas gangguan trantibum
				10	Peningkatan pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan waktu tanggap kurang dari 15 menit
				11	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan bagi penduduk rentan sosial serta peningkatan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas
				12	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan dan keluarga dan pilar-pilar sosial
				13	Meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial dan pendampingan bantuan stimulan program nasional penanggulangan kemiskinan

Disamping itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi prioritas dan tema pembangunan nasional, provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.24
Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas RKPD Kota Padang Panjang
1	2	3
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PD 1 Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah
	PP4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
	PP5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1 Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	PD 2 Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
		PD 3 Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing
		PD 4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 7 Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	PP7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 6 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 serta sinergitas pembangunan nasional, Provinsi dan Kota Padang Panjang, maka tema pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah: "Peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM Berkarakter dan Berdaya Saing"

Untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunan tersebut serta dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, maka dirumuskan program yang lebih konkrit, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Berikut dijabarkan prioritas serta rencana program pembangunan daerah tahun 2024.

Tabel 1.25
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target	Pagu RKPD	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**LPE sektor Perdagangan**	**6,36**	**10.117.040.609**	
		LPE sektor pertanian	**5,64**		
		LPE sektor penyediaan makan dan minum	**10,95**		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin yang dikeluarkan Sesuai SOP	96,86%	125.300.000	DPMPTSP
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22%	5.789.500	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	18%	6.850.000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target	Pagu RKPD	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Usaha di Bidang Perdagangan	34%	69.171.000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Ber-SNI	90%	4.801.631.300	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasaan Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah	60%	201.554.100	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya Melalui Digital	15%	352.886.785	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Difasilitasi Mendapatkan Sertifikat dan Standarisasi Produk Industri (Sertifikat Halal,MD,GMP.SNI dan Merk)	5%	865.023.103	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100%	201.521.500	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100%		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Budidaya Ikan	751 ton/ tahun	546.195.400	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 jenis	83.275.600	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	77%	129.861.801	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75%		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	8,50%	439.912.820	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama Kunjungan Wisata	1,15	1.618.165.700	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	600000 orang	244.990.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		PAD Sektor Pariwisata	300.000.000 Rupiah		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah Dibina	14 Sub sektor	39.912.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terselenggaranya Kebijakan /Kegiatan Pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan	60%	385.000.000	Sekretariat Daerah
2	**Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**	**Persentase Penduduk Miskin**	**4,24**	**18.424.462.387**	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	**4,6**		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha	5%	366.275.000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang Di Bantu	40%	4.392.333.000	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	77%	1.699.346.801	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	75%		
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	13,80%	167.900.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Aktif	32%	587.020.800	DPMPTSP
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	2,39%	337.409.200	DPMPTSP
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang Tertangani	100%	387.554.786	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target	Pagu RKPD	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	89,36%	135.622.800	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	10.351.000.000	Sekretariat Daerah
3	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**Rata-rata Lama Sekolah**	**11,94**	**38.254.882.524**	
		Harapan Lama Sekolah	**15,09**		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	24.832.772.997	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Pustaka	3200 Orang	728.974.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan Indikator Kota Layak Pemuda	3 indikator	180.316.600	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	44 cabang	1.402.593.950	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dibina	1 organisasi	100.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif	100%	163.928.400	Dinas Sosial P2KBP3A
		Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD	20%		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Indikator KLA yang Terpenuhi	80%	100.029.675	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	100 BTJ	147.229.290	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	100 BTJ	248.037.612	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	10.351.000.000	Sekretariat Daerah
4	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**Umur Harapan Hidup**	**73,04**	**11.643.691.492**	
		Prevelansi Stunting	**14**		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKP dan UKM Pada Fasilitas Kesehatan	88%	10.388.939.242	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	62%	699.639.000	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100%	235.955.000	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR	62%	319.158.250	Dinas Sosial P2KBP3A
5	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**91,36**	**38.247.530.759**	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**66,6**		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik	76,83%	1.133.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Sungai yang dikonservasi	22,42%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	86,57%	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	85,16%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak	90%	678.071.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase sarana air limbah dalam kondisi baik	94,45%		

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target	Pagu RKPD	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	87,34%	7.038.232.650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	46,10%	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan yang mendapatkan advice dari Tim Penguji Ahli	90%		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Infrastruktur Trotoar dalam Kondisi Baik	85,67%	1.134.990.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	88,01%		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Bersertifikat	61%	69.167.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Per Tahun	0,21%	474.999.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	86,24%	5.117.375.043	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100%	267.465.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	443.900.650	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	4,23%	2.076.565.550	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan/Verifikasi Lapangan Terhadap Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%	20.963.900	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan Terhadap Dokumen Persetujuan Lingkungan	55%	23.585.500	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 jenis	93.362.850	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	98%	12.118.826.045	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga yang Mendapat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1.558.289.050	BPBD Kesbangpol
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	238.668.971	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang Dipelihara	100%	22.375.000	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor	68%	4.702.692.350	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	0,06%		
		Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	85%		
		Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87%		
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,003700 angka		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terselenggaranya Kebijakan /Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan	60%	385.000.000	Sekretariat Daerah
6	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**61,8**	**62.807.165.613**	

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target	Pagu RKPD	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	pemerintahan daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)				
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	35%	30.020.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%		
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	44%	1.321.391.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Implementasi Layanan SPBE	2,8 Indeks	2.252.442.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,60 Indeks		
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	456	11.960.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	100%	235.955.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	100%	180.824.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	205.447.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen	24.998.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku	50%	25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan/Jumlah Arsip yang Tersimpan Pada LKD	5000 dokumen	92.471.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	82%	713.778.364	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik	85%	130.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu	2.851.013.800	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Penyusunan Produk Anggaran yang Tertib Efisien dan Tepat Waktu	Tepat waktu		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2%	290.178.476	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	330	703.463.500	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi Melalui Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	7,60%	1.461.750.000	BKPSDM
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas dilaksanakan	88%	380.604.060	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	91%	134.042.800	Inspektorat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan	100%	7.948.926.602	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	39,98%	6.237.959.000	Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum	10 laporan	30.200.000	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	61.000.000	Kecamatan
	Program Penunjang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	25.660.245.761	Sekretariat Daerah

No	Prioritas/ Program	Indikator	Target	Pagu RKPD	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi (SETDAKO)	100%		
		Nilai Evaluasi SAKIP Setdako	Indeks		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Kelembagaan Sebagai Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Legislasi	90%	11.703.492.250	Sekretariat DPRD
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dihasilkan	6 dokumen	120.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Inovasi Daerah yang Memiliki Nilai Kematangan di Atas 90	72%		
7	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Indeks Rasa Aman**	**Aman (86,39)**	**28.964.682.697**	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terselenggaranya Kebijakan / Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	10.351.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2 Objek	211.476.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	724.939.000	BPBD Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100%	8.890.816.630	BPBD Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Konflik yang Tertangani	100%	177.525.700	BPBD Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Terlindungi dari Dampak Pelanggaran Perda dan Trantibum	100%	4.195.073.200	Satpol PP Damkar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	1.308.560.750	Satpol PP Damkar
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan Nasional yang Tertangani di Daerah	100%	682.988.950	BPBD Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentasi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Sosial yang Aktif	75%	1.454.440.176	Dinas Sosial P2KBP3A
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	80%	967.862.291	Dinas Sosial P2KBP3A
Total				**208.459.456.081**	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan Upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan

sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yakni Perencanaan Strategis, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing–masing misi, berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing–masing Urusan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dijelaskan bahwa Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman: ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 1.26
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
1	2	3	4	5	6
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
2	Pendidikan kesetaraan	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	
3	Pendidikan Dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka putus Sekolah SD	
		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka Putus Sekolah SMP	
		Program Bantuan Pendidikan	1	Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	
			2	Angka putus sekolah SMP	
			3	Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	
			4	Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan	
SPM KESEHATAN					
1	Kesehatan Ibu Bersalin	Program Kesehatan Masyarakat	1	Masalah Gizi Buruk	Penanggung Jawab

No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan Kesehatan		2	Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada bayi, balita, anak, remaja, ibu dan lansia	Urusan Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir				
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar				
6	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut				
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendlaian penyakit	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus				
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkolosis				
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	
			2	Persentase penanganan penderita penyakit menular	
			3	Universal Child Immunization (UCI)	
			4	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa 24 jam	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program penataan kawasan pemukiman	1	Cakupan layanan air bersih	Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		2	Persentase pengolahan air limbah rumah tangga	
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan	1	Persentase kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Penanggung Jawab Urusan Perumahan Pemukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program penataan kwasan pemukiman	1	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan ketentraman dan keteertiban umum	Program Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum	1	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Penanggung Jawab Urusan Ketentraman dan Ketertiban
		Program penegakan produk daerah	1	Cakupan penyelesaian perda	
			2	Persentase penegakan perda	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program penyelenggaraan penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat bencana	1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		2	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3	Rata-rata tingkat waktu maksimum assestment tanggap darurat bencana	
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program pembinaan para penyandang cacat dan ekstrauma	1	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	Penanggung Jawab Urusan Ketentraman dan Ketertiban
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia terlantar	1	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				
4	Rehabilitasi sosial khususnya gelandangan dan pengemin di luar panti	Program rehabilitasi kesejahteraan sosial	1	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat	Program perlindungan sosial bencana	1	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	

No	Jenis Pelayanan Dasar	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
1	2	3	4	5	6
	bencana bagi korban bencana daerah kab/kota				

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak Terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan Indikator Kinerja Makro untuk Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (2023)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (2024)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	79.26	80.17	**1.05**
2	Angka Kemiskinan	5.24	5.31	**1.34**
3	Angka Pengangguran	5.49	4.94	**-10.02**
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.84	4.52	**-6.61**
5	Pendapatan Per-Kapita	76.31	80.01	**4.85**
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.273	0.266	**-2.56**

Sumber: Data Pendukung dari Padang Panjang Dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang).

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Urusan Penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap. Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 2 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kunci Hasil; dan
2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing indikator (Indikator Kinerja Kunci Hasil, Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	103,2891731	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,404741		
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	140,5091312		
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	55,2264808		
2	Kesehatan	1.	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	2,5823617	Dinas Kesehatan	-
		2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100		
		3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,7392438		
		4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100		
		5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		
		6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		
		7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,9248555		
		8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,6874541		
		9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,4016916		
		10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	108,59375		
		13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	116		
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	114,4161774		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Padang Panjang tidak memiliki infrastruktur pengendalian banjir dan data luas daerah kawasan banjir tidak tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0		Kota Padang Panjang tidak memiliki wilayah pantai
		3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	88,8433982		-
		4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100		
		5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	99,1029882		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			domestik			
		6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	45,5265077		
		7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	92,9162785		
		8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup	Tidak ada bencana yang memerlukan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
		2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0		Tidak ada rumah masyarakat yang direlokasi akibat program pemerintah Kota Padang Panjang
		3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	95,5153098		-
		4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,7500229		
		5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	97,0530452		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		
		3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	122,5923209	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-
		4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,9299632		
		5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100		
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
		7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4		
6	Sosial	8.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		9.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100		

***Catatan** : Update data (E-PELAPORAN IKK (kemendagri.go.id)), hari Jumat tanggal 17 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.*

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1	Tenaga Kerja	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum tersedianya anggaran untuk penyusunan RTKD dan sekaligus penyesuaian dengan visi dan misi Wali Kota terpilih
		2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,9019087		-
		3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	10,0672936		
		4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	71,1538462		
		5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	59,4059406		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
			kabupaten/kota			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,8381525	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100		
		3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31,5397717		
3	Pangan	1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	108,503774	Dinas Pangan dan Pertanian	-
4	Pertanahan	2.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Karena Pemerintah Kota Padang Panjang tidak pernah menerbitkan izin lokasi
		3.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2,0180328		-
		4.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0		Karena Pemerintah Kota Padang Panjang tidak pernah menerbitkan izin lokasi
		5.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0		arena Dinas PUPR tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran TOL yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
		6.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		Dinas PUPR tidak pernah mengukur ketersediaan tanah untuk masyarakat
		7.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0		PUPR tidak pernah melakukan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (tanah garapan adanya di wilayah kabupaten/kota
5	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	62,62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-
		2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	99,191894		
		3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	44,8275862		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Perekaman KTP elektronik	99,1355486	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	96,9619032		
		3.	Kepemilikan akta kelahiran	99,9143059		
		4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100		
7	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wilayah administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari Kelurahan dan Kecamatan tidak ada desa
		2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	0		
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,52		-
		2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63,3875339		
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,1680217		
9	Perhubungan	1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	77,77	Dinas Perhubungan	-
		2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,39		
10	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78,5714286		
		3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	99,8084026		
11	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1.	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	69,5652174	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	5,7880476		
12	Penanaman Modal	1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	21,2014704	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
13	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,8929117	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-
		2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,5076142		
		3.	Peningkatan prestasi olahraga	10		
14	Statistik	1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
15	Persandian	1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	34,4186047		
16	Kebudayaan	1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,78		
18	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	81,725		-
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,33		

***Catatan** : Update data (E-PELAPORAN IKK (kemendagri.go.id)), hari Jumat tanggal 17 Maret 2025 pukul 21.00 WIB*

3. Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
1	Kelautan dan Perikanan	1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100,0039947	Dinas Pangan dan Pertanian	-
2	Pariwisata	1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	27,0175145	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-
		2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	19,7265553		
		3.	Tingkat hunian akomodasi	34,1718012		
		4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,8894504		
		5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,4185509		
3	Pertanian	1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	718,234441	Dinas Pangan dan Pertanian	-
		2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-11,1111111		
4	Kehutanan	1.		0		Karena urusan kehutanan tidak lagi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
						menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang melainkan Menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	2.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0		Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah tidak mengeluarkan izin perusahaan pemanfaatan panas bumi
6	Perdagangan	1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	64,2857143		-
		2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	43,246313		
		3.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	43,1092437		
7	Perindustrian	1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	6,2337662	Dinas Perdagangan, Koperasi Usha Kecil dan Menengah	
		2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0		
		3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0		
		6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90		
8	Transmigrasi	1.	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Padang Panjang tidak ada transmigrasi di kota padang panjang dan kewenanganya.

***Catatan** : Update data (E-PELAPORAN IKK (kemendagri.go.id)), hari Jumat tanggal 17 Maret 2025 pukul 21.00 WIB*

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
1	Perencanaan dan Keuangan	1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	32,8718444	Badan Pengelolaan Keuangan	-
		2.	Rasio PAD	16,1833245		
		3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	-
		4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
		5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	84,0016715	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
		6.	Opini Laporan Keuangan	100		
2	Pengadaan	1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Padang Panjang	-
		2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	68,6077644		
		3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,2751135		
		4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	52,1804086		
3	Kepegawaian	1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79,9167534	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
		2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,5806452		
		3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,4239631		
4	Manajemen Keuangan	1.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,5401	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
		2.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,8947		
		3.	Manajemen Aset	100		
		4.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	8,67204		
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,5520861	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100		

***Catatan** : Update data (E-PELAPORAN IKK (kemendagri.go.id)), hari Jumat tanggal 17 Maret 2025 pukul 21.00 WIB*

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tahap penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), penandatangan perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, menyusun pelaporan kinerja serta melakukan reviu dan evaluasi kinerja. Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan SAKIP tersebut, setiap instansi harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan surat edaran tersebut, LKjIP menjadi satu kesatuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, terdapat 5 (lima) Tujuan dengan 15 (lima belas) Sasaran pembangunan.

Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024, yang merupakan tahun pertama periode RPD 2024-2026 adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	
			SEBELUM	SESUDAH
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PADANG PANJANG YANG ISLAMI DAN MAKMUR				
I	**MISI I** **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"**			
T1.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**	**1. Indeks Pembangunan Manusia**	**79,02**	**80,27**
	S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	11,94	12,04
		2. Harapan Lama Sekolah	15,09	15,36
	S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Umur Harapan Hidup	73,04	74,44
		4. Prevalensi Stunting	14,00	14,00
	S3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,44	71,44
		6. Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama
	S4. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	7. Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama
		8. Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,20	0,20
II.	**MISI 2** **Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya**			
T2	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel**	**2 Indeks Reformasi Birokrasi**	**61,80**	**67,5**
	S5 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Nilai SAKIP	63,98	63,98
		10. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71,00	71,00
		11. Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (330)
		12. Maturitas SPIP	3	3

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	
			SEBELUM	SESUDAH
		13. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90	91
		14. Indeks SPBE	2,70	2,95
III.	**MISI 3** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**			
T3.	**Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai dengan Penurunan Ketimpangan**	**3 Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,20**	**5,02**
		4 Indeks Gini	**0,292**	**0,271**
	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	15. LPE Sektor Perdagangan	6,36	5,21
		16. LPE Sektor Pertanian	5,64	5,03
		17. LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	10,95	10,92
	S7. Meningkatnya Investasi	18. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6	6
	S8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	19. Tingkat Kemiskinan	4,24	4,64
		20. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60	4,80
	S9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	21. Pengeluaran Perkapita	11,328	11,328
III.	**MISI 3** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**			
T4.	**Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis**	**5 Indeks Rasa Aman**	**Aman (86.39)**	**Aman (86.80)**
	S10. Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	22. Persentase Pemajuan Kebudayaan	71,00	74,10
		23. Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	85,00
	S11. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00
	S12. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25. Angka PPKS	4,68	4,2
III.	**MISI 3** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**			
T5.	**Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas**	**6 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**91,36**	**93,20**
		7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**66,60**	**74,20**
	S13. Terbangunnya Insfrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26. IKLI KePUan	90,06	96,81
		27. IKLI Perkim	96,90	98,56
		28. IKLI Perhubungan	96,76	98,00
	S14. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	29. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,00	83,00
	S15. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	30. Indeks Kualitas Air	45,75	72,47
		31. Indeks Kualitas Udara	90,25	78,38
		32. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,00	69,45

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat terdapat perubahan target pada beberapa indikator kinerja. Beberapa penyesuaian terutama untuk indikator yang terkait dengan peningkatan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini dilakukan akibat dampak bencana yang terjadi di Sumatera Barat secara umum dan khususnya yang terjadi di Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang Panjang dan sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari Jumat, tanggal 8 April 2024, dan hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, menyebabkan jalan lintas utama Padang Bukittinggi putus total di kawasan Lembah Anai. Banjir bandang tersebut juga menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur yang ada seperti dam sungai dan jembatan di Kota Padang Panjang. Terputusnya jalan lintas utama tersebut

menimbulkan dampak yang besar terhadap pelaku usaha di Padang Panjang terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, akibat dari tidak adanya wisatawan yang berkunjung menyebabkan banyak rumah makan, kafe, restoran, dan bofet terpaksa tutup.

Kondisi-kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi daerah Kota Padang Panjang, terutama di bidang perekonomian, kemiskinan dan pengangguran, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap indikator tujuan dan sasaran terkait ekonomi, kemiskinan dan pengangguran tahun 2024 yang telah ditetapkan. Selain itu, kerusakan infrastruktur kota yang disebabkan oleh banjir bandang tersebut harus segera diperbaiki sehingga program Mitigasi Bencana menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, RKPD Tahun 2024 perlu disesuaikan kembali agar dapat menampung program dan proyek pemulihan serta mitigasi bencana. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengatasi dampak langsung dari bencana dan memastikan pemulihan yang cepat dan efektif.

Dari 32 indikator kinerja sasaran pada RPD 2024-2026, 16 diantaranya masih sama dengan indikator pada RPJMD 2018-2023, 11 indikator dengan redaksi sama yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, Indeks Pemberdayaan Gender, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sekor Akomodasi Makan dan Minum, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Perkapita, Persentase Pemajuan Kebudayaan, dan Angka PPKS. 5 indikator yang berubah redaksinya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagagangan Besar dan Eceran menjadi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan. Predikat SAKIP menjadi Nilai SAKIP. Nilai Sistem Merit menjadi Indeks Sistem Merit. Dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023, capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 9 indikator melebihi target, 2 indikator sesuai target dan masih ada 11 indikator yang masih belum mencapai target, sementara masih ada 2 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. 16 indikator RPD 2024-2026 yang masih mempertahan indikator RPJMD 2018-2023 5 indikator capaiannya melebihi target yaitu pengeluaran perkapita, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, angka PPKS dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8 indikator belum mencapai target yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, prevalensi stunting dan persentase pemajuan kebudayaan. Satu indikator persentase penyelesaian pelanggaran

ketenteraman dan ketertiban umum sesuai target. Indikator yang belum bisa diukur dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai ini baru dirilis dalam portal BPS Provinsi Sumatera Barat setelah Laporan Kinerja Tahun 2023 dikirimkan. Nilai IDG Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 67,58 masih kurang 3,26 dari target dengan capaian 95,40%.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibanding Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibanding Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PADANG PANJANG YANG ISLAMI DAN MAKMUR					
I	**MISI 1** **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"**				
T1.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**	**1. Indeks Pembangunan Manusia**	**80,27**	**80,17**	**99.88**
	S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	12,04	12,00	99.67
		2. Harapan Lama Sekolah	15,36	15,47	100.72
	S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Umur Harapan Hidup	74.44	74,48	100,05
		4. Prevalensi Stunting	14,00	9,49	132.21
	S3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,44	NA	BELUM ADA NILAI
		6. Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI
	S4. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	7. Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00
		8. Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,20	0,50	250,00
II.	**MISI 2** **Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya**				
T2	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel**	**2 Indeks Reformasi Birokrasi**	**67,5**	**77,66**	**115,05**
	S5 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Nilai SAKIP	63,98	64,22	100,38
		10. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71,00	63,20	89.01
		11. Nilai Sistem Merit	330	NA	BELUM ADA NILAI
		12. Maturitas SPIP	3	3	100.00
		13. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91,00	94,46	103.80
		14. Indeks SPBE	2,95	3,16	107.12
III.	**MISI 3** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**				
T3.	**Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai dengan Penurunan Ketimpangan**	**3 Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,02**	**4,52**	**90,04**
		4 Indeks Gini	**0,271**	**0,266**	**101,85**
	S6. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	15. LPE Sektor Perdagangan	5,21	3,98	76,39

		16.	LPE Sektor Pertanian	5,03	0,15	2,98
		17.	LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	10,92	7,45	68,22
	S7. Meningkatnya Investasi	18.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6,00	0,84	14,00
	S8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	19.	Tingkat Kemiskinan	4,64	5,31	85,56
		20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80	4,94	97,08
	S9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	21.	Pengeluaran Perkapita	11.328	11.840	104,52
III.	**MISI 3** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**					
T4.	**Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis**	**5**	**Indeks Rasa Aman**	**86,8**	**79,29**	**91,78**
	S10. Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	22.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	74,10	66,16	89,28
		23.	Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85,00	71,42	84,02
	S11. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100.00
	S12. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25.	Angka PPKS	4,20	3,69	112.14
III.	**MISI 3** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**					
T5.	**Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas**	**6**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**93,20**	**95,50**	**102.47**
		7	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**74,20**	**62,62**	**84.39**
	S13. Terbangunnya Insfrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26.	IKLI KePUan	96,81	96,71	99.90
		27.	IKLI Perkim	98,56	94,56	95.94
		28.	IKLI Perhubungan	98,00	95,22	97.16
	S14. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	29.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,00	83,00	100
	S15. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	30.	Indeks Kualitas Air	72,47	34,65	47.81
		31.	Indeks Kualitas Udara	78,38	89,08	113.65
		32.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,45	61,70	88.84

Sumber : LKjIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari 32 indikator kinerja yang diukur, 10 indikator melebihi target, 4 indikator sesuai target dan masih ada 15 indikator yang masih belum mencapai target, sementara masih ada 3 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya.

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibanding capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Tahun Akhir RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Capaian tujuan terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup

(*descent standart*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu : sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi (70 ≤ IPM<80), sedang (60≤ IPM <70), dan rendah (IPM <60). Untuk lebih jelasnya capaian IPM Kota Padang Panjang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Indeks Pembangunan Manusia

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Pembangunan Manusia	80,27	80,6	100,41	77,97	99,67	78,78	100,60	79,76	101,00	79,73	97,79

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 80,60 lebih tinggi 0,84 dibanding tahun 2023 dan sudah hampir mencapai target akhir RPD yaitu 79,73 dengan capaian 97,79%.

Secara keseluruhan berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing tercapai dengan baik. Bahkan IPM Kota Padang Panjang lebih baik 4,17 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat (76,43) dan lebih baik 5,58 poin dibandingkan IPM Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1
Perbandingan IPM Tahun 2024 Nosional,
Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang

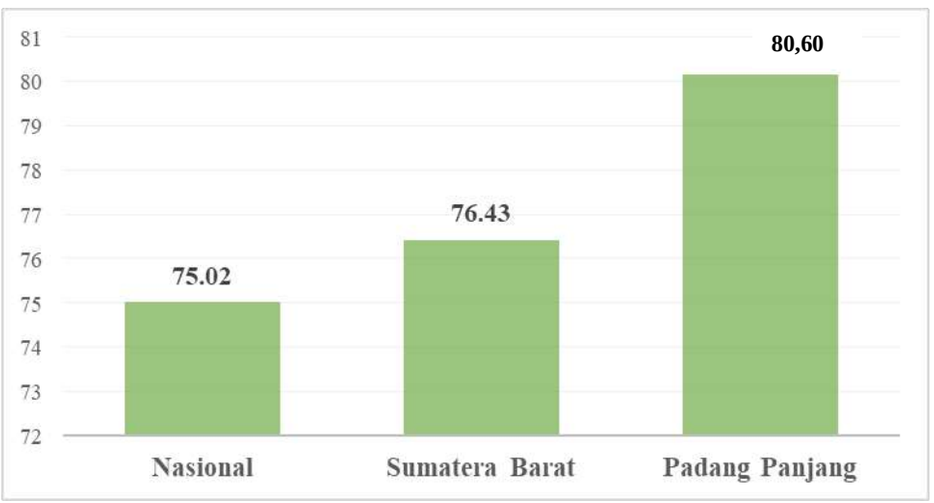

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan IPM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah

   Rata-rata lama sekolah di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,06 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tahun 2023 dari 11,94 tahun menjadi 12 tahun.

2. Meningkatkan harapan lama sekolah

   Angka harapan lama sekolah di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah di tahun 2023 dari 15,29 tahun menjadi 15,47.

3. Meningkatkan angka harapan hidup

   Angka harapan hidup di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 tahun dibandingkan tahun 2023, dari 74,24 tahun menjadi 74,48 tahun.

4. Menekan prevalensi *stunting*

   Prevalensi *stunting* tahun 2024 berhasil ditekan sebesar 4,6% dibanding tahun 2023 dari 14,09% menjadi 9,49%. Apabila dilihat dari target yang telah ditetapkan pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebesar 14% pada tahun 2024, maka capaian penurunan Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang tahun 2024 tergolong berhasil. Tabel berikut mengambarkan tentang pencapaian penurunan Prevalensi Stunting periode Tahun 2021-2024.

Tabel 2.7
Pencapaian Penurunan Prevalensi Stunting periode Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		RPD Tahun 1	
	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Prevalensi Stunting (%)	**16,52**	**15,6**	**15,51**	**14,70**	**15,40**	**14,09**	**11,05**	**9,49**	**14,00**	**9,49**

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan peningkatan peran perempuan pada Lembaga-lembaga pemerintahan dan nonperintahan serta keterwakilan perempuan dalam partai politik. Indeks pemberdayaan gender merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur peran dan partisipasi perempuan yang mencakup kepada partisipasi di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

   Tabel berikut menggambarkan tentang capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024

Tabel 2.8
Capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		RPD Tahun 1	
	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Indeks Pemberdayaan Gender	68,04	66,62	69,44	69,44	70,84	67,58	71,44	NA	71,44	**NA**

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi terhadap indek pemberdayaan gender di Kota Padang Panjang tahun 2021-2024. Meskipun sedikit rendah dari target perencanaan akan tetapi capaian ini masih tergolong baik dengan tingkat partisipasi perempuan di parlemen sebanyak 20% pada periode 2021 Sampai tahun 2024.

6. Predikat Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah konsep yang berfokus pada pembangunan kota yang mendukung kebutuhan dan hak-hak anak-anak. Cakupan dari Kota Layak Anak adalah penciptaan lingkungan yang aman, sehat, dan merangsang perkembangan anak. tujuan dari Kota Layak anak adalah untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dan mendorong masa depan anak kearah yang lebih baik dengan menerapkan sistem ramah anak. Kota yang layak anak harus mampu merencanakan dan menjalankan program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak.

Dilihat dari Capaian Indikator Kota Layak Anak Kota Padang Panjang pada Tahun 2021-2024 terlihat bahwa peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dimana pencapaian maksimal dapat diperoleh dengan prediket Utama. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan Kota yang ramah anak, dalam artian Pemerintah Kota Padang Panjang sudah memenuhi seluruh aspek dalam mengikutsertakan anak dalam Pembangunan dengan memenuhi hak-hak anak.

Tabel berikut menggambarkan capaian Predikat Kota Layak Anak Kota Padang Panjang periode Tahun 2021-2024.

Tabel 2.9
Capaian Predikat Kota Layak Anak Kota Padang Panjang periode Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		RPD Tahun 1	
	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Madya	Nindya	Madya	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

7. Status Kota Layak Pemuda

Status Kota Layak Pemuda pada tahun 2024 adalah Menuju Pratama, berhasil memenuhi target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

8. Rasio Daya Saing Kelolahragaan

Rasio daya saing keolahragaan pada tahun 2024 sebesar 0,50 melebihi target dari 0,20 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 250%.

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing telah ditetapkan 4 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Meningkatnya

Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian empat sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu: 1) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) dan 2) Harapan Lama Sekolah (tahun). Rata-rata lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,04	12	99,67	11,63	97,40	11,92	99,67	11,94	97,23	11,98
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,36	15,47	100,72	15,07	100	15,07	99,93	15,29	101,33	15,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

(a) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 12 tahun dari target yang telah ditetapkan12,04 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99,67%.

Tabel 2.11
Capaian Rata-rata Lama Sekolah

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12.04	12	99.67	11.63	97,40	11.92	99,67	11.94	97,23	11.98	100.17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah, capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 99,67% dan capaian ini sedikit lebih rendah

dari capaian RPD Kota Padang Panjang Tahun pertama namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 2,44%.

Meskipun demikian, capaian Rata Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2024 dengan realisasi sebesar 12,00 merupakan nilai terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bahkan lebih baik dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu 9,44 dan dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Nasional Tahun 2024 yaitu 8,85, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

Grafik 2.2
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 Kota Padang Panjang

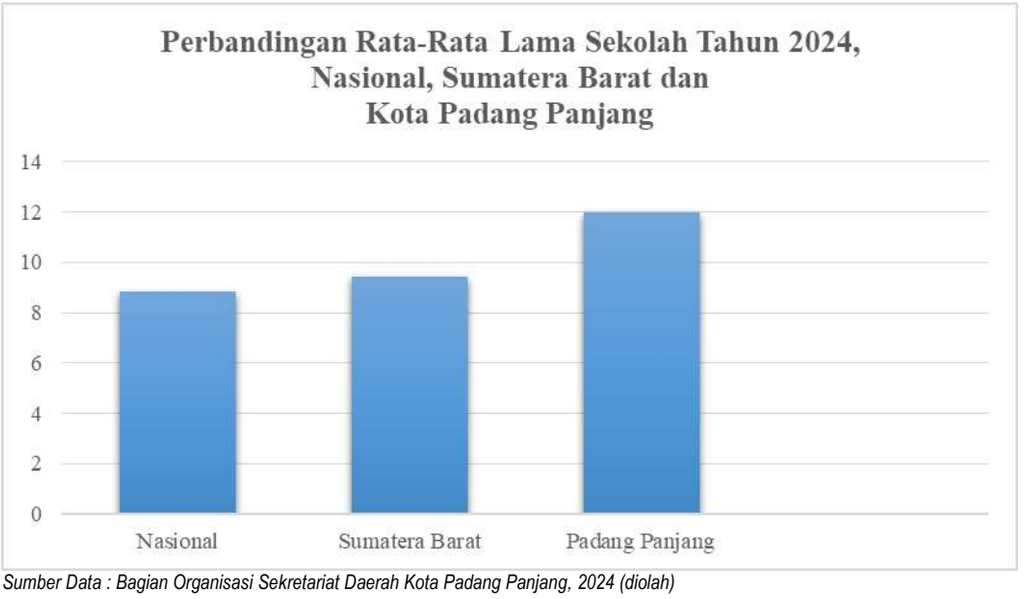

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Sementara capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2024 dengan realisasi sebesar 12,00 ini lebih baik dari capaian Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu 9,44 dan dari capaian Rata-Rata Lama Sekolah Nasional Tahun 2024 yaitu 8,85.

(b) Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 15,36 tahun dari target yang telah ditetapkan 15,47 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,72%.

Tabel 2.12
Capaian Harapan Lama Sekolah

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.36	15.47	100.72	15.07	100	15.07	99,93	15.29	101.33	15.11	102.38

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Capaian ini sedikit lebih rendah disbanding capaian RPD Kota Padang Panjang Tahun pertama. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 memang terjadi sedikit penurunan sebesar 0,61%.

Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang tahun 2024 dengan realisasi sebesar 15.47 merupakan nilai terbaik kedua dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bahkan lebih baik dari capaian Harapan Lama Sekolah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu 14,30 dan dari capaian Rata Rata Lama Sekolah Nasional Tahun 2024 yaitu 13.21, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

Grafik 2.3
Perbandingan Harapan Lama Sekolah tahun 2024 Kota Padang Panjang

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Adapun faktor pendorong/pendukung Sasaran Strategis Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan di Kota Padang Panjang sangat baik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemahamam orang tua akan arti penting pendidikan untuk anak-anak mereka.
2. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dimana jarak antara rumah masyarakat dengan sekolah cukup dekat.
3. Banyaknya fasilitasi dan bantuan dari berbagai pihak untuk peningkatan pendidikan seperti KIP, bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang, beasiswa dan lain-lain.
4. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, kelurahan dan RT untuk merazia dan menegur anak-anak yang berkeliaran yang jam sekolah.
5. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak sekolah, anak-anak dan dengan orang tua.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.56.522.969.079,- pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pembinaan Perpustakaan dan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.004.840.382,- (90,24%).

2. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun) dan 2) Prevalensi *Stunting*. Umur harapan Hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Sedangkan Prevalensi *Stunting* adalah Jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Capaian Derajat Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1. Umur Harapan Hidup	74.44	74.48	100.05	72.82	100,10	73.02	100.19	74.24	101.63	73.06	101.94
2. Prevalensi Stunting	14.00	9.49	132.21	-	-	14.74	104,96	14.09	99,21	11,20	115,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

(a) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 74,48 tahun dari target yang telah ditetapkan 74,44 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,05%.

Tabel 2.14
Capaian Umur Harapan Hidup

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Umur Harapan Hidup	74.44	74.48	100.05	72.82	100,10	73.02	100.19	74.24	101.63	73.06	101.94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Capaian Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,58% dari capaian tahun 2023 yang sebesar 101,63 % menjadi 100,05% pada Tahun 2024. Dan dilihat dari perbandingan realisasi, Umur

Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 74,24 tahun menjadi 74,48 tahun pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan dan realisasi Tahun 2024 adalah angka Umur Harapan Hidup tertinggi sejak Tahun 2021.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah lebih baik 1,42 poin dari target akhir RPD yaitu 73,06 tahun dengan capaian kinerja sebesar 101,94% .

Tahun 2024 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5, belum sebaik Kota Bukittinggi, Kota Padang Kota Payakumbuh dan Kota Solok.

Grafik 2.4
Perbandingan Umur Harapan Hidup tahun 2024 Kota Padang Panjang

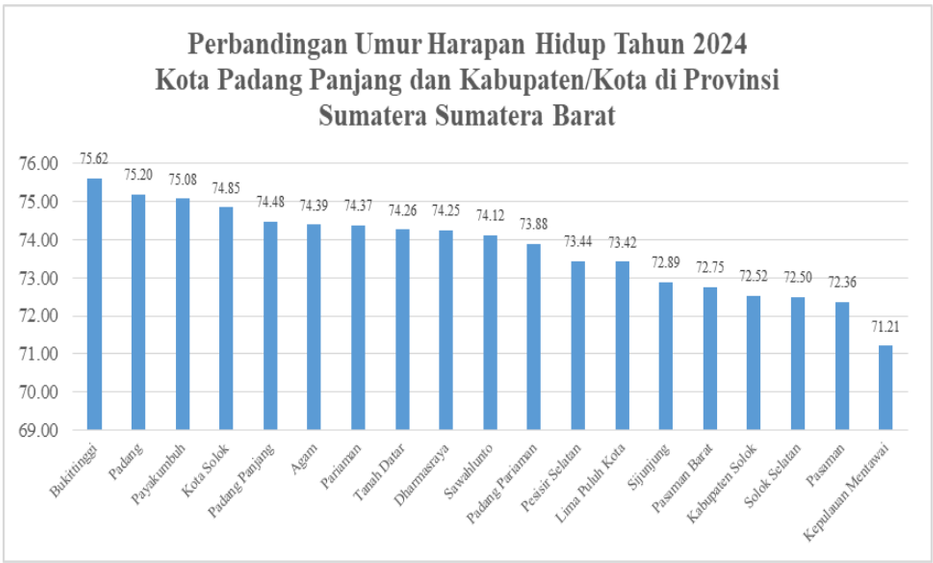

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Adapun Umur Harapan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih baik 0,11 poin dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 74,37 tahun dan lebih tinggi 0,33 poin dibandingkan Umur Harapan Hidup Nasional yang sebesar 74,15 tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.5
Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2024
Nasional, Provinsi Sumatera Barat
dan Kota Padang Panjang

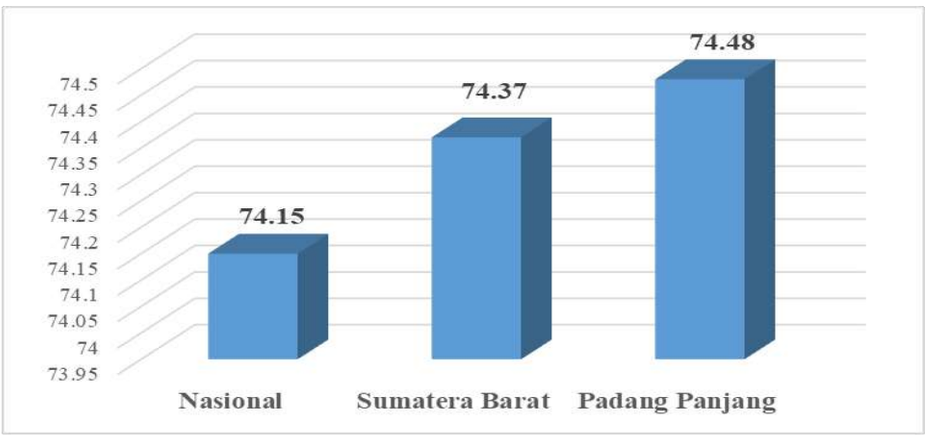

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

(b) Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 9,49 tahun dari target yang telah ditetapkan 14,00 tahun sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 132,21%.

Tabel 2.15
Capaian Prevalensi Stunting

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Prevalensi Stunting	14.00	9.49	132.21	-	-	14.74	104,96	14.09	99,21	11,20	115,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Capaian Prevalensi *Stunting* pada tahun 2024 adalah sebesar 9,49%, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan terget yang telah di tetapkan dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dengan target Tahun 2024 sebesar 14%.

Adapun faktor pendorong/pendukung pencapaian sasaran strategis derajat Kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang sangat baik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemahaman masyarakat akan arti penting kesehatan baik kesehatan diri maupun Kesehatan lingkungan.
2. Akses yang mudah bagi masyarakat ke fasilitasi Kesehatan (jarak yang cukup dekat, tenaga medis yang siaga pada masyarakat yang membutuhkan, PSC 119).
3. Banyaknya fasilitasi dan bantuan dari berbagai pihak dibidang kesehatan seperti, KIS, bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang,air bersih, sanitasi lingkungan yang cukup baik dan lain-lain.
4. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah untuk memantau kondisi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan.

5. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara masyarakat, para kader Kesehatan, kader pemberdayaan masyarakat, petugas medis dan para medis dan pemerintah daerah.
6. Dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan prevalensi stunting disamping dari pemerintah juga dalam bentuk program BASUNTING (Bapak Asuh Stunting).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34,461,744,192.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 24,173,381,558.13,- (70,15 %) bagi Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, PPKBPPPA, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pangan dan Pertanian untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

3. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan 2) Predikat Kota Layak Anak. Dari sasaran ini untuk indikator Predikat Kota Layak Anak merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Capaian Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.44	NA	BELUM ADA NILAI	66.82	83.21	69.82	100,55	67.58	95.40	74.06	BELUM ADA NILAI
2. Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI	madya		nindya		nindya		Utama	BELUM ADA NILAI

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

(a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang

peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator.

Salah satu Indikator yang diukur untuk melihat partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Padang Panjang adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Data IDG Kota Padang Panjang untuk tahun 2024, belum dipublikasikan oleh Kementerian PPPA RI.

Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi terhadap indeks pemberdayaan gender di Kota Padang Panjang tahun 2021-2024. Meskipun sedikit rendah dari target perencanaan akan tetapi capaian ini masih tergolong baik dengan tingkat partisipasi perempuan di parlemen sebanyak 20% pada periode 2021 Sampai tahun 2024.

Tabel 2.17
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI 2	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.44	NA	BELUM ADA NILAI	66.82	83.21	69.82	100,55	67.58	95.40	74.06	BELUM ADA NILAI

Sumber : BPS, https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg--menurut-kabupaten-kota.html

(b) Predikat Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi tata pemerintahan yang baik yaitu tranparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang; dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu melibatkan anak untuk berpartisipasi mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak

dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di Kabupaten/Kota yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan dalam setiap tingkatan wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Predikat KLA adalah predikat yang diberikan berdasarkan pencapaian kinerja pelaksanaan 24 indikator KLA, terdiri dari :

a. Pratama (nilai 500-600)
b. Madya (nilai 601-700)
c. Nindya (nilai 701-800)
d. Utama (nilai 801-900)
e. KLA (nilai 901-1000)

Tabel 2.18
Capaian Predikat Kota Layak Anak

INDIKATOR KINERJA	2024			BASELINE RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI 2	CAPAIAN		TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
. Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI	Nindya	Utama	BELUM ADA NILAI

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, 2024

Predikat Kota Layak Anak Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian PPPA, Predikat KLA Kota Padang Panjang sejak Tahun 2021 masih belum mengalami peningkatan, masih bertahan dengan predikat Nindya.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 34,461,744,192.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,012,757,330.00,- (81,40 %) bagi Dinas Sosial, PPKBPPPA untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3. Perlindungan Perempuan
4. Perlindungan Khusus Anak
5. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
6. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

4. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu : 1) Status Kota Layak Pemuda dan 2) Rasio Daya Saing Keolahragaan. Status Kota Layak Anak adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tertentu dalam melembagakan dan menginternalisasikan kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan atau berbasis kepemudaan. Sedangkan rasio daya saing keolahragaan adalah suatu indikator yang diukur dari jumlah even yang dijuarai / jumlah even yang diikuti.

Adapun capaian dari kedua indikator ini sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Capaian Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1 Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100	-	Pratama	-
2 Rasio Daya Saing Keolahragaan (%)	0,20	0,50	250	-	0.30	166,67

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2024

(a) Status Kota Layak Pemuda

Penetapan Status Kota Layak Pemuda didasarkan kepada Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor: 1.22.8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Indikator dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda ini didasarkan capaian terhadap lima aspek penilaian yang meliputi antara lain meliputi aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda, indikator variabel pemenuhan persyaratan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, dan koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan pada Kementerian.

Status Kota Layak Pemuda tahun 2024 Kota Padang Panjang adalah Menuju Pratama sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan peran pemuda juga ikut dalam pembangunan yang dilakukan di Kota Padang Panjang

Tabel 2.20
Capaian Status Kota Layak Pemuda

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	100	Menuju Pratama	-	Pratama	100

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2024

Karena indikator Status Kota Layak Pemuda merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Status Kota Layak Pemuda Kota Padang Panjang Tahun 2024 berada pada status Menuju Pratama dari target Pratama. Hal ini berarti bahwa pencapaian tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan diharapkan dapat mencapai target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang pada tahun 2026, yaitu Pratama.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Status Kota Layak Pemuda antara lain adalah:

1. Tersedianya regulasi kepemudaan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan
2. Tersedianya anggaran dan program kepemudaan
3. Tersedianya pelembagaan partisipasi pemuda

(b) Rasio Daya Saing Keolahragaan

Rasio Daya Saing Kelolahragaan diukur dari persentase even yang dijuarai/ jumlah even yang diikuti.

Tingkat capaian Indikator Rasio Daya Saing Keolahragaan Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 0,50% tahun dari target yang telah ditetapkan 0,20% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 250%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keolahragaan menunjukan hasil yang menggembirakan di Kota Padang Panjang

Tabel 2.21
Capaian Status Kota Layak Pemuda

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Rasio Daya Saing Keolahragaan (%)	0,20	0,50	250	-	0.30	166,67

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2024

Karena indikator Rasio Daya Saing Keolahragaan merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 berada pada angka 0,50%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja tahun 2024 telah melewati target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang sebesar 166,67% dari target 0,30 pada tahun 2026.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Rasio Daya Saing Keolahragaan adalah tersedianya potensi pelatih olahraga yang berkualitas di Kota Padang Panjang dan meningkatnya jumlah atlit yang kompetitif baik secara perorangan maupun

kelompok di tingkat regional dan nasional, dimana jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi, pada tahun 2024 Kota Padang Panjang meraih 9 prestasi tingkat nasional dan 33 prestasi tingkat provinsi.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 26,046,005,866.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 23,352,087,650.00,- (89.66%) pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

1. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

2. Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Bagaimana kinerja birokrasi suatu pemerintahaan daerah telah dikelola dengan baik dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Untuk pengukuran Indeks RB tahun 2024 berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Berdasarkan nilai sementara Indeks RB Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 77,66 seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Reformasi Birokrasi	67.5	77,66	115,05	55.19	83,62	59.4	107,6	66.54	111,83	64,20	120,97

Sumber : Kementerian PANRB, 2025 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 77,66 dari target yang telah ditetapkan 67,5 sehingga capaian kinerjanya 115,05%.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,22 % dari capaian tahun 2023 yang sebesar 111,83 % menjadi 115,05% pada Tahun 2024. Dilihat dari perbandingan realisasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,12 poin yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 66,54 menjadi 77,66 pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang

terus mengalami peningkatan dan realisasi Tahun 2024 adalah angka Indeks Reformasi Birokrasi tertinggi sejak Tahun 2021.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 77,66 dari target sebesar 64,20 dengan capaian kinerja sebesar 120,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir RPD.

Tahun 2024 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,66 menempati posisi ke-6, setelah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi 78,38 dan diikuti oleh Kabupaten sijunjung yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi 77,26. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih rendah 8,82 poin dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 86,48.

Berikut disajikan perbandingan rincian hasil evaluasi RB Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.23
Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen dan Sub Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
A	RB General			
	Total Komponen RB General (A)	100	61,72	68,66
B	RB Tematik			
	Total Komponen RB Tematik (B)	20	4,60	9
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	120	66,54	77,66

Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada komponen RB General dan RB Tematik terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan, tetapi tetap perlu menyusun strategi dan rencana aksi yang lebih baik agar pelaksanaan RB dan penyelesaian isu-isu strategis terlaksana lebih maksimal dimasa yang akan datang.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sistematis dan realistis

   Sesuai dengan arahan Kementerian PANRB, Pemeritah Kota telah Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan mengacu kepada Perubahan Roadmap RB Nasional sebagaimana diatur pada PermenPANRB Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

2. Monitoring berkala terhadap pencapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi

   Tim Reformasi Birokrasi secara berkala telah melakukan Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi terhadap perangkat daerah pengampu dan memberikan arahan untuk optimalisasi pecapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

3. Pelaksanaan Evaluasi berkelanjutan

   Inspektorat sebagai APIP di Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi yang yang berkelanjutan, baik dalam penyusunan renacana aksi maupun pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi ini kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk medapatkan arahan dan juga dikoordinasikan kepada perangkat daerah terkait untuk ditidaklanjuti.

4. Koordinasi dan sinergitas Tim

   Agar pelaksanaan RB berjalan maksimal sesuai perencanaan, selalu dilakukan koodinasi dan sinergitas antara Tim RB, perangkat daerah terkait dan inspektorat daerah selaku APIP. Koordinasi ini dilakukan secara langsung melalui rapat koordinasi ataupun secara daring.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel telah ditetapkan 1 sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

   Pada sasaran ini terdapat enam indikator yaitu: Nilai SAKIP, IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah), Nilai Sistem Merit, Maturitas SPIP, Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Indeks SPBE. Dari enam indikator tersebut, Nilai SAKIP merupakan indikator yang telah digunakan juga dalam dokumen RPJMD periode 2018-2023 sedangkan lima lainnya merupakan indikator baru pada dokumen RPD 2024-2026 sehingga belum bisa disandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan hanya disandingkan dengan baseline RPD (tahun 2022). Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAKHIR RPD
Nilai SAKIP	63.98	64.22	100.38	61.95	88,37	62.91	100,98	63.28	100,29	65,74	97,69

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024

Lima lainnya merupakan indikator baru pada dokumen RPD 2024-2024, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.25
Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71.00	63.20	89.01	70,61	72.00	87,78
2. Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (330)	NA	BELUM ADA NILAI	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (340)	BELUM ADA NILAI
3. Maturitas SPIP	3	3	100.00	2+	3(3.3)	100.00
4. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91	94.46	103.80	85	95	99,43
5 Indeks SPBE	2.95	3.16	107.12	2.09	3	105,33

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

(a) Indikator Nilai SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Guna mengetahui tingkat implementasi SAKIP, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level kota maupun pada level perangkat daerah. Capaian Nilai SAKIP sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Capaian Nilai SAKIP

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022)		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
Nilai SAKIP	63.98	64.22	100.38	61.95	88,37	62.91	100,98	63.28	100,29	65,74	97,69

Sumber Data, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Nilai SAKIP Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 64.22 dari target yang telah ditetapkan 63.98 sehingga capaian kinerjanya 100.38%.

Capaian Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,09 dari capaian tahun 2023 yang sebesar 100,29 % menjadi 100.38 % pada Tahun 2024. Demikian juga dilihat dari perbandingan realisasi, Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,94 yaitu dari realisasi

Tahun 2023 sebesar 63.28 menjadi 64.22 pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 Nilai SAKIP Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan dan realisasi Tahun 2024 adalah Nilai SAKIP tertinggi sejak Tahun 2021.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 64.22 dari target sebesar 65.74 dengan capaian kinerja sebesar 97.69 % . Hal ini menunjukkan mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya perbaikan yang signifikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tahun 2024 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Nilai SAKIP Kota Padang Panjang dengan nilai 64.22 menempati posisi tengah. Adapun nilai Nilai SAKIP tertinggi dimiliki oleh Kota Padang dengan nilai 78.68 dan terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai 57.43. Adapun Nilai SAKIP Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih rendah 14.76 poin dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 78,98.

Berikut rincian penilaian SAKIP tahun 2023 dan 2024 untuk masing-masing komponen penilain:

Tabel 2.27
Penilaian SAKIP tahun 2023 dan 2024

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,88	22,93
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,68	16,39
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,74	9,92
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,98	14,98
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**63,28**	**64,22**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber : Kementerian PANRB, 2024

Dari empat komponen evaluasi akuntabilitas kinerja, peningkatan capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada komponen pengukuran kinerja, yakni 0,71 poin dari total peningkatan nilai 0,94 poin.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Nilai SAKIP Tahun 2024 yaitu adanya pelaksanaan tindaklanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya yakni:

1. Telah menyusun dokumen perencanaan berupa RPD dan diikuti dengan Renstra Perangkat Daerah, dan dokumen lainnya.
2. Telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah mennyusn rencana aksi kinerja.
3. Telah menetapka IKU yang berisi formula penghitungan indikator untuk mendukung pengukuran kinerja dan

4. Telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan LPPD dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ; dan

Namun demikian masih terdapat faktor yang menyebabkan perlambatan pencapaian kinerja SAKIP di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Masih terdapat rumusan sasaran strategis perangkat daerah yang belum berorientasi hasil.
2. Masih terdapat indikator inerja yang bekum cukup bisa mengukur pencapaoina sasran kinerja sesuai level jabatan.
3. Masih terdapat ketidakselarasan penetapan target kinerja perangkat daerah dengan kepala daerah.
4. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi, belum manggambarkan crosscutting aantar perangkat daerah,
5. Rencana aksi belum berisi aksi/kegiatan yang selaras dengan upaya pencapaian IKU
6. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual sehingga belum berjenjang sampai ke semua level.
7. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, reward dan punishmen serta pertimbangan rotasi dan mutasi pegawai.
8. Pelaporan kinerja belum memiliki analisis mendalam dan belum cukup dipublikasikan.
9. Perangkat daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh inspektorat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah dan sedang dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Kota Padang Panjang, antara lain :

1. Pendampingan penyusunan laporan Kinerja dalam penyusunan RPJMD 2025-2030
2. Coaching clinic penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
3. Pembinaan / peningkatan kapasitas perencana dan stake holder berupa kegiatan praevaluasi SAKIP dengan menghadirkan narasumber dari Propinsi dan KEMENPANRB
4. Bekerjasama dengan Provinsi Sumtera Barat dalam manajemen kinerja melalui e SAKIP

(b) Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penetapan IPKD berdasarkan dimensi dan indikator tertentu, Dimana tujuan dari IPKD adalah untuk membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik dan transparan. Pengelolaan

keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. Indikator dalam menghitung IPKD meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pengukuran terhadap 6 Dimensi diatas akan memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Dimensi tersebut diatas melihat proses perencanaan pembangunan sampai dengan proses pelaporan keuangan. Dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarannya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Capaian Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

INDIKATOR KINERJA	2024			BASELINE RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71.00	63.20	89.01	70,61	72.00	87,78

Sumber Data : BPKD Kota Padang Panjang, 2024

Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 63,19 (sangat butuh perbaikan) dari target yang telah ditetapkan 71 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 89,01%. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan usaha yang lebih maksimal dari semua pihak yang terlibat agar nilai dari 4 Dimensi yang belum mencapai nilai maksimal dapat ditingkatkan ditahun berikutnya, dan nilai dari 2 Dimensi yang telah mencapai nilai baik yakni 15 dapat dipertahankan untuk tahun berikutnya.

Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, telah terjadi penurunan sebesar 7,41 poin dari 70.61 menjadi 63.20.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indikator IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 63,20 dengan capaian 87,78% dari target akhir RPD 72.00. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang signifikan.

Berikut penilai IPKD yang penilaian dilakukan pada tahun 2024 terhadap data keuangan pada tahun anggaran 2023.

Tabel 2.29
Rincian Nilai IPKD pada tahun 2024

No	Dimensi	Bobot	Nilai
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	15	8,5207
2	Pengalokasian belanja dalam APBD	20	15
3	Transparansi pengelolaan keuangan Daerah	15	12,1552
4	Penyerapan Anggaran	15	6,6667
5	Kondisi Keuangan Daerah	15	5,8542
6	Opini BPK atas LKPD	15	15
	Total Nilai		63,1968

Sumber Data : Kemendagri, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang telah mencapai nilai maksimal pada 2 dimensi penilaian yaitu dimensi pengalokasian belanja pada APBD dan dimensi Opini BPK atas LKPD.

Pencapaian nilai maksimal pada dimensi Pengalokasian Belanja dalam APBD tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban untuk pendanaan urusan dasar seperti urusan Pendidikan 20%, Kesehatan 10%, infrastruktur 25% dan kegiatan untuk pemenuhan Standar pelayanan Minimal (SPM) menjadi perhatian dalam penyusunan APBD. Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan APBD Pemerintah Kota padang Panjang sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 atau selama 8 tahun berturut-turut memperoleh Opini tertinggi atas Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan prinsip Sistem Akuntasi Pemerintahan

(SAP). Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BPK setiap tahunnya diharapkan mampu mengarahkan Pemerintah Kota Padang Panjang menuju tatanan pemerintahan yang semakin optimal.

Faktor-faktor penghambat pencapaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah:

1. Pembahasan program / kegiatan /sub-kegiatan pada tahapan penyusunan KUA-PPAS dan pada tahapan Penyusunan RAPBD sangat memungkinkan berdampak pada naik / turunnya alokasi pagu suatu kegiatan / sub kegaitan. Naik / turunnya pagu per kegaitan / subkegiatan ini menyebabkan tidak samanya pagu di tahapan RKPD dengan tahapan KUA maupun tahapan RAPBD yang menyebabkan rendahnya penijlaian pada dimensi 1. Proses pembahasan KUA-PPAS dan APBD sangat memungkinkan terjadinya perubahan pagu indikatif pada kegiatan/subkeg kegiatan setelah di tetapkannya RKPD.
2. Kurangnya Upaya-upaya OPD dalam merealisasikan anggaran secara maksimal mengakibatkan rendahnya penilaian pada dimensi 4
3. Ketergantungan yang tinggi Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap dana transfer pada APBD berakibat pada rendahnya kemandirian fiskal daerah untuk memenuhi kewajibannya. Kemandirian keuangan daerah yang rendah sangat mempengaruhi Fleksibelitas Keuangan serta solvabilitas operasional Pemerintah Kota Padang Panjang.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target IPKD adalah :

1. Melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa OPD antara lain, Bappeda, Inspektorat, Kominfo dan beberapa OPD pendukung terkait hal - hal yang menjadi kelemahan kita dalam mencapai target dimana masih banyak kelemahan - kelemahan yang membuat Nilai kita masih rendah dibandingkan beberapa kota lain di sumatera barat dan terutama sekali terhadap target yang telah kita buat namun hal ini juga harus didukung seutuhnya oleh Pimpinan Daerah
2. Mendorong OPD-OPD untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan dan DPA masing-masing OPD dengan memberikan penghargaan bagi OPD yang mencapai realisasi di atas 95% dari DPA OPD.
3. Mendorong OPD-OPD yang memiliki target Pendapatan untuk memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam DPA OPD. Memberikan insentif terhadap pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga ketergantungan dana transfer pusat ke daerah akan berkurang.

(c) Indikator Nilai Sistem Merit

Sistem Merit adalah sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik serta praktik nepotisme. Nilai Sistem Merit dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, rotasi, manajemen kinerja, penghargaan, serta perlindungan pegawai. Melalui penerapan Sistem Merit yang baik yang berkelanjutan, diharapkan birokrasi pemerintahan dapat semakin profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadapi dinamika global secara adaptif dan progresif.

Hasil nilai Sistem Merit dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip meritokrasi dalam instansi pemerintah. KASN secara berkala melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi bagi instansi yang belum sepenuhnya menerapkan Sistem Merit, guna memastikan efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan ASN.

Nilai Sistem Merit Kota Padang Panjang Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Lembaga terkait. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang mengatur pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Fungsi dan tugas KASN kemudian dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut, hingga saat ini belum ada nilai Sistem Merit Pemerintah Kota Padang Panjang yang dirilis oleh Lembaga terkait. Capaian Nilai Sistem Merit sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Capaian Indikator Nilai Sistem Merit

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (330)	NA	BELUM ADA NILAI	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (340)	BELUM ADA NILAI

Sumber Data : BKPSDM Kota Padang Panjang, 2024

Meskipun penilaian Sistem Merit belum menjadi target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, Kota Padang Panjang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penerapan prinsip meritokrasi. Hal ini tercermin dari nilai Sistem Merit dalam tahun 2023, yaitu 325 (sangat baik) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil

Negara Nomor 169/KEP.KASN/C/XI/2022 tahun 2022 yang menyatakan bahwa nilai sistem merit berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2022.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian nilai Sistem Merit yang sangat baik di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Implementasi Kebijakan yang Konsisten

   Pada tahun 2021 hingga 2023, BKPSDM Kota Padang Panjang secara konsisten menerapkan kebijakan berbasis sistem merit dengan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
2. Peningkatan Profesionalitas ASN

   ASN semakin memahami dan menjalankan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan kepegawaian, seperti rekruitmen berbasis kompetensi, promosi yang transparan, dan pengelolaan kinerja yang lebih baik.
3. Digitalisasi Data Kepegawaian

   Penerapan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung administrasi kepegawaian turut meningkatkan efektivitas penerapan sistem merit.
4. Dengan komitmen yang kuat dalam penerapan Sistem Merit, diharapkan Kota Padang Panjang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara, serta mendorong birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan dan memastikan sistem merit tetap berjalan optimal, BKPSDM merancang beberapa langkah strategis:

1. Koordinasi lebih intensif dengan BKN dan KemenPAN-RB untuk mendapatkan pedoman terbaru terkait sistem merit pasca peleburan tugas KASN.
2. Meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya kelengkapan data kepegawaian, melalui sosialisasi dan pendampingan.
3. Mengembangkan sistem pemantauan internal terhadap implementasi sistem merit, sebagai alternatif jika penilaian eksternal tidak dilakukan kembali di tahun berikutnya.
4. Optimalisasi sistem informasi kepegawaian berbasis digital agar data ASN dapat diperbarui secara lebih cepat dan akurat.

(d) Indikator Maturitas SPIP

Maturitas SPIP Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan SPIP. SPIP dirancang untuk meningkatkan pengendalian internal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penilaian Maturitas SPIP

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan dan terus menerus setiap tahunnya. Capaian Nilai Maturitas SPIP sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Capaian Indikator Maturitas SPIP

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Maturitas SPIP	3 (3.1)	3 (3.0)	100	2+	3(3.3)	100

Sumber Data : BPKP Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa capaian nilai Maturitas SPIP Kota Padang Panjang pada tahun 2024 berada pada level 3, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan skor yang dicapai adalah 3,000.. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang telah mencapai level maturitas yang diharapkan dalam pengelolaan SPIP.

Karena indikator nilai Maturitas SPIP merupakan indikator baru yang muncul pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, perbandingan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Namun, jika dibandingkan dengan baseline RPD tahun 2022, terdapat peningkatan dari level 2+ menjadi 3 pada tahun 2024.

Dari perspektif target akhir RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, indikator nilai Maturitas SPIP pada tahun 2024 telah mencapai level 3, yang berarti telah memenuhi 100% dari target awal maturitas yang ditetapkan pada tahun 2026. Meskipun demikian, untuk memperoleh skor 3,3 dibutuhkan upaya berkelanjutan.

Pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang termasuk dalam 13 pemerintah daerah yang telah mencapai Maturitas SPIP ≥ Level 3 dan sesuai dengan standar nasional yaitu Level 3. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan SPIP secara efektif.

Berikut rincian hasil penilaian Maturitas SPIP Kota Padang Panjang Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Aparat:

Tabel 2.32
Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungen Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Nudaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		**3**	**3,000**

Sumber Data: BPKP Provinsi Sumatera Barat, 2024

Maturitas SPIP Kota Padang Panjang telah mencapai Level 3 dengan skor 3,000, yang menunjukkan bahwa kapabilitas pengawasan telah berjalan efektif, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan penguatan lebih lanjut.

Adapaun faktor pendorong tercapainya level maturitas sesuai target kinerja pada masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

   Pemerintah Kota Padang Panjang sudah memiliki standar kompetensi auditor dan sistem pengembangan SDM yang memadai.
2. Praktik Profesional

   Perencanaan pengawasan yang dimiliki sudah berbasis risiko dan Program penjaminan mutu pengawasan sudah diterapkan.
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

   Perencanaan kerja dan anggaran sudah disusun dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Budaya dan Hubungan Organisasi

   Koordinasi internal dan komunikasi dengan manajemen sudah berjalan dengan baik.
5. Struktur Tata Kelola

   Mekanisme pendanaan telah tersedia dan tersedianya akses terhadap informasi organisasi.
6. Peran dan Layanan

   Audit ketaatan (compliance audit) telah berjalan dengan baik; Audit kinerja dan evaluasi tata kelola sudah dilaksanakan; dan Pelaksanaan konsultasi kepada OPD perlu dokumentasi lebih baik.

Beberapa upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan maturitas SPIP di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Pemenuhan SDM sudah sesuai kebutuhan ideal.
2. Audit kinerja dan audit ketaatan perlu memberikan rekomendasi yang lebih strategis.
3. Perencanaan pengawasan perlu lebih fokus pada risiko strategis daerah.
4. Asuransi atas Tata Kelola (GRC) dan Penilaian SPIP perlu ditingkatkan dan didokumentasikan lebih baik.

5. Dokumentasi layanan konsultasi harus lebih terstruktur agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

(e) Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI guna memperbaiki kualitas layanan, serta pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian ini terdiri dari empat dimensi yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan. Dimensi input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan. Dimensi Proses terdiri variabel standar pelayanan. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian tersebut. Capaian Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Capaian Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91	94.46	103.80	85	95	99,43

Sumber Data : Ombudsman RI, 2024

Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 94,46 dari target yang telah ditetapkan 91 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,80%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang sudah baik. Dimana berdasarkan hasil penilaian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam melakukan pembinaan pelayanan publik dan unit penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Karena indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, telah terjadi peningkatan sebesar 9,46 poin dari 85 menjadi 94,46.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 94,46 dengan capaian 99,43% dari akhir target RPD sebesar 95. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD

masih diperlukan upaya berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tahun 2024 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indikator Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Padang Panjang menempati posisi ke-4 setelah Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Agam. Namun Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat Nilai Indikator Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Padang Panjang lebih tinggi dari 2,81 poin dari nilai provinsi yaitu 91,65. Perbandingan Nilai Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.6
Perbandingan Nilai Kepatuhan

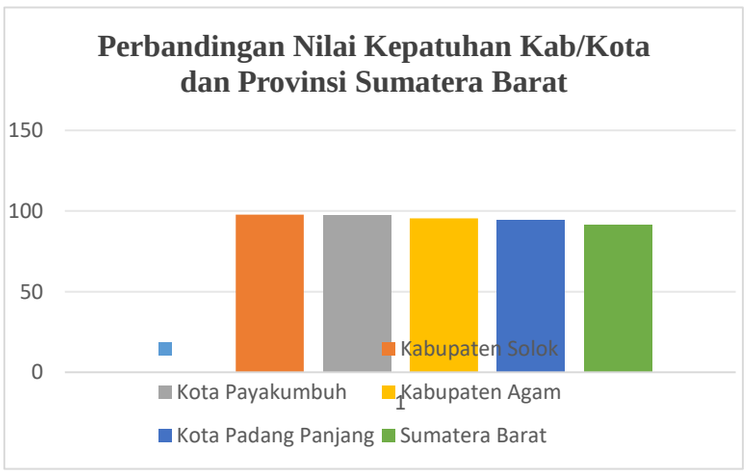

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik:

1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui upaya kunjungan lapangan terkait ketersediaan sarana dan prasarana layanan dan wawancara langsung dengan penyelenggara layanan tentang masalah dan kendala yang dihadapi selama pemberian layanan.
2. Pembinaan penyelenggara pelayanan publik dengan upaya yang dilakukan adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Bimbingan Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilakukan melibatkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB serta Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dengan peserta dari perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas dan kelurahan serta pengelola pengaduan di seluruh unit pelayanan publik.

Ket : Foto Piagam dan Penyerahan Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

(f) Indikator Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sedangkan Indeks SPBE merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pengukuran indeks SPBE dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interview.

Capaian Kinerja Indeks SPBE sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Indeks SPBE

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks SPBE	2.95	3.16	107.12	2.09	3	105,33

Sumber Data : KemenPANRB 2024

Indikator Indeks SPBE Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 3,16 dari target yang telah ditetapkan 2,95 dengan capaian kinerja sebesar 107,12%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang secara keseluruhan telah melakukan penerapan SPBE. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai. Pemerintah Kota Padang Panjang telah

memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. Aplikasi TPP juga menunjukkan fungsi transaksi, validasi, kemajuan status persetujuan data, dan analitik data yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK, mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan layanan administrasi.

Karena Indeks SPBE merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, telah terjadi kenaikan sebesar 1,07 poin dari 2,09 menjadi 3,16.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026, Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 3,16 dengan capaian 105,33% dari target 3. Hal ini telah melebihi target akhir RPD, meskipun demikian Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk meningkatkan indeks SPBE dimasa yang akan datang.

Tahun 2024 apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,85 lebih tinggi 0,73 poin dari Indeks SPBE Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan Indeks SPBE Nasional, Indeks SPBE Kota Padang Panjang lebih tinggi 0,04 poin dari indeks SPBE nasional sebesar 3,12. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.7
Perbandingan Indeks SPBE Kota Padang Panjang

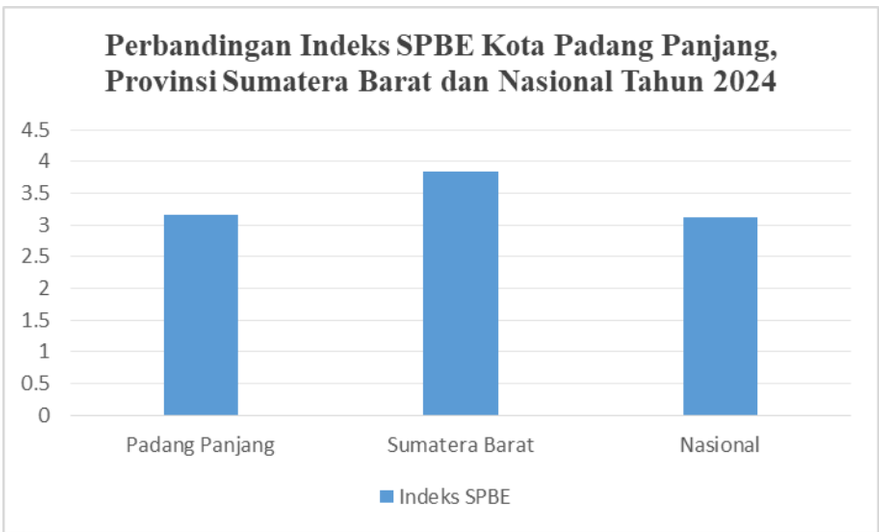

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako, 2024 (data diolah)

Adapun rincian hasil penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Taun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024

Nama Indeks	Bobot	Nilai 2024
SPBE		**3,16**
Domain Kebijakan SPBE	**13%**	**3,60**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	*3,60*
Domain Tata Kelola SPBE	**25%**	**2,90**
Perencanaan Strategis SPBE	25%	*2,25*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	*3,25*
Penyelenggara SPBE	5%	*3,00*
Domain Manajemen SPBE	**16,5%**	**2,82**
Penerapan Manajemen SPBE	12%	*1,13*
Audit TIK	4,5%	*2,00*
Domain Layanan SPBE	**45,5%**	**3,82**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	*3,70*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	*4,00*

Sumber : KemenPANRB 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks domain layanan SPBE merupakan salah satu dari 4 domain SPBE dengan bobot penilaian terbesar yakni 45,5%. Pada Domain layanan SPBE terdiri dari penilaian terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Secara umum dari target kinerja sebesar 3,40 berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB untuk tahun 2024 hasil penilaian Kota Padang Panjang terealisasi sebesar 3,82 pada predikat Sangat Baik.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian Indeks SPBE Tahun 2024:

1. Kebijakan Internal tata Kelola SPBE, antara lain Kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, dan Layanan Jaringan. Upaya yang dilakukan adalah menyusun kebijakan terkait SPBE yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan *Smart City* dan Arsitektur SPBE.
2. Pemanfaatan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Upaya yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi secara optimal seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi dan melakukan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3. Adanya komitmen dan penguatan koordinasi, kolaborasi dan konsistensi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Padang Panjang. Upaya yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi terkait tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 74.014.762.142,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.915.020.007,00,- (94,46%) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Sekretariat DPRD untuk melaksanakan 21 program, yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
4. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7. Pengelolaan Arsip
8. Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
13. Kepegawaian Daerah
14. Pengembangan Sumber Daya Manusia
15. Penyelenggaraan Pengawasan
16. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
17. Perekonomian Dan Pembangunan
18. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
19. Pengelolaan Aplikasi Informatika
20. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
21. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Tujuan Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan diukur melalui 2 indikator yaitu (1) laju pertumbuhan ekonomi, dan (2) Indeks Gini.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.36
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.02	4,52	90,04	3.46	124.91	4.39	104,52	4.84	98.57	6	75,33
Indeks Gini	0.271	0,266	101,88	0.306	99.03	0.296	103,27	0.273	104,21	0.288	108,27

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 5,02%, dengan capaian kinerja sebesar 90,04%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,32 poin dari realisasi tahun 2023 yang mencapai 4,84%. Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 8,53 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 98,57%, menjadikannya salah satu capaian terendah dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2023 tetap menjadi yang tertinggi sejak tahun 2021.

Dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024–2026, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih berada di bawah target 6%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 75,33%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan target jangka menengah daerah.

Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin.

Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Dengan kondisi ini, Kota Padang Panjang masih perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026.

Grafik 2.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

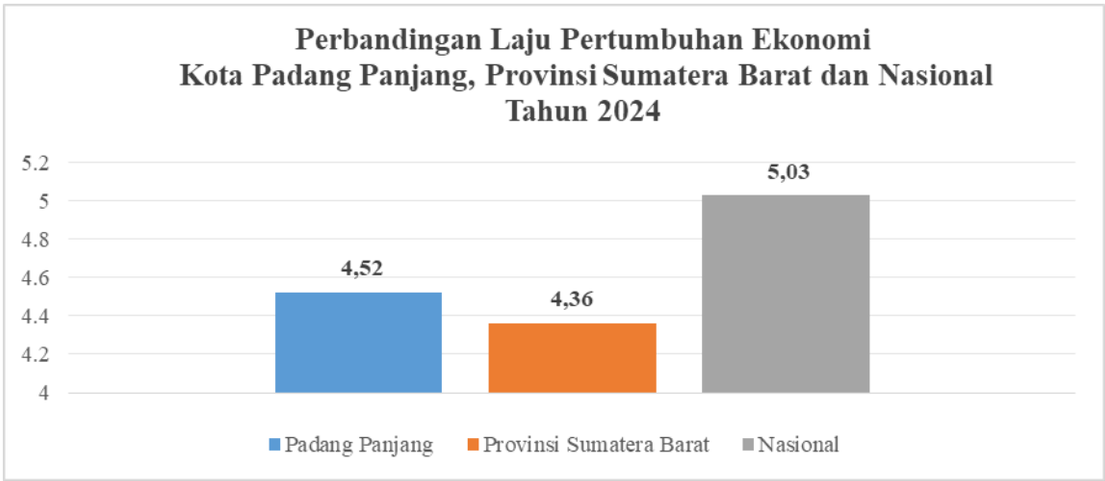

Sumber Data: BPS, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Adapun Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Capaian Indeks Gini

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR (%)
Indeks Gini	0.271	0,266	101,88	0.306	99.03	0.296	103,27	0.273	104,21	0.288	108,27

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,266, lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 0,271, dengan capaian kinerja mencapai 101,88%. Secara realisasi, terjadi penurunan 0,007 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,273. Capaian indikator Indeks Gini juga mengalami sedikit penurunan sebesar 0,023 poin, dari 104,21% pada tahun 2023 menjadi 101,88% pada tahun 2024.

Sejak tahun 2021, tren Indeks Gini Kota Padang Panjang terus menunjukkan penurunan, yang menandakan adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan di kota ini. Penurunan Indeks Gini mencerminkan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang merupakan indikator positif dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Dalam perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024–2026, realisasi Indeks Gini tahun 2024 telah melampaui target akhir yang ditetapkan, yaitu 0,288, dengan capaian kinerja mencapai 108,27%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang telah berhasil mencapai pemerataan pendapatan yang lebih baik dari yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Padang Panjang menempati peringkat ke-12 terendah dengan nilai 0,266. Kota ini berada di bawah beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang. Namun, jika dibandingkan secara khusus dengan kota-kota lainnya, Padang Panjang menjadi kota dengan Indeks Gini terendah di Sumatera Barat, menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling kecil di antara kota-kota lain di provinsi ini.

Selain itu, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 lebih rendah 0,017 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283. Kota ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, yang berada di angka 0,381—lebih rendah sebesar 0,115 poin. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah ini.

Grafik 2.9
Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang

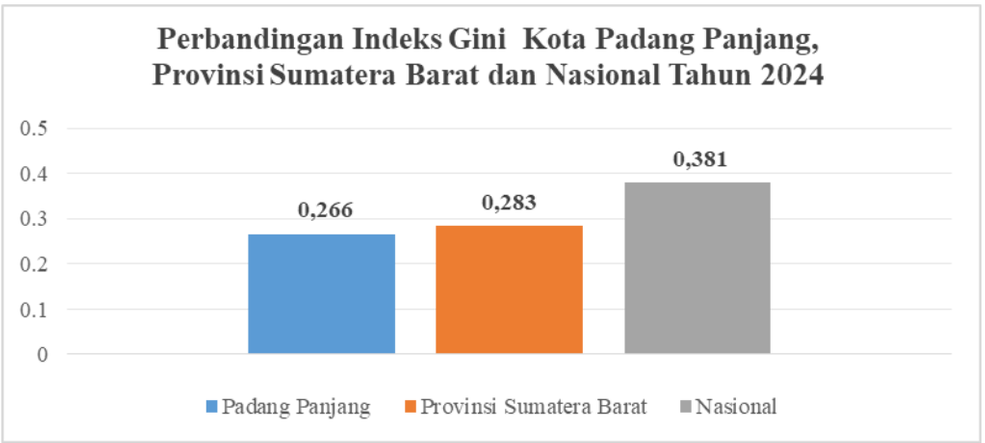

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Untuk mencapai tujuan "Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing disertai dengan Penurunan Ketimpangan," ditetapkan empat sasaran strategis, yaitu : (1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah, (2) Meningkatnya investasi, (3) Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, dan (4) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

   Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah diukur melalui tiga indikator, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, LPE Sektor Perdagangan, dan LPE Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum. Capaian pertumbuhan sektor unggulan daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026		
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAI (%)	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
1. LPE Sektor Perdagangan (%)	5.21	3.98	76.39	3.2	119.85	5.28	159.52	4.29	81	6.36	7.44	53.49
2. LPE Sektor Pertanian (%)	5.03	0.15	2.98	4.99	194.92	5.54	107.57	1.87	33	5.64	5.74	2.61
3. LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum (%)	10.92	7.45	68.22	7.38	203.31	10.47	140.73	6.52	62	10.95	11.43	65.17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun terdapat tiga indikator utama yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, realisasinya masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024, termasuk target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024. Rincian pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026		
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
LPE Sektor Perdagangan (%)	5.21	3.98	76,39	3.2	119.85	5.28	159.52	4.29	81	6,36	7.44	53.49

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan pada tahun 2024 belum menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 3,98%, sedangkan target yang telah ditetapkan adalah 5,21%, sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 76,39%.

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,61 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 81%, turun menjadi 76,39% pada tahun 2024. Dari sisi realisasi, laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami

penurunan 0,31 poin, dari 4,29% pada tahun 2023 menjadi 3,98% pada tahun 2024. Jika melihat tren selama tiga tahun terakhir, sektor perdagangan di Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi, dan realisasi pada tahun 2024 belum mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Dari perspektif Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026, laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2024 yang sebesar 3,98% hanya mencapai 53,49% dari target akhir yang ditetapkan sebesar 7,44%, serta jauh di bawah target tahun 2024 sebesar 6,36%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2024 masih belum memenuhi target akhir maupun target tahunan yang telah ditetapkan dalam RPD.

Jika dibandingkan secara regional maupun nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih rendah 0,83 poin dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,81%. Sementara itu, secara nasional, pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 4,86%, lebih tinggi 0,88 poin dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10
Perbandingan LPE Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang

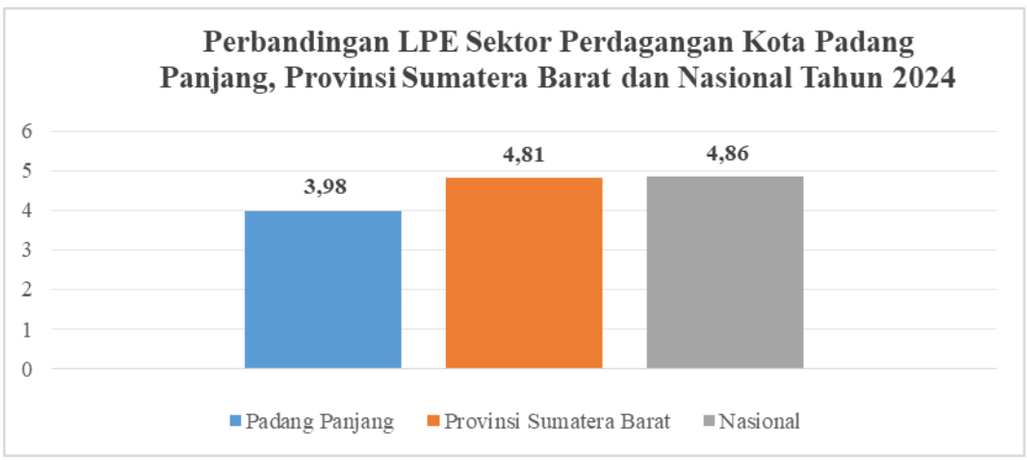

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Belum tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Kota Padang Panjang sesuai target merupakan dampak negatif dari bencana alam lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024. Bencana ini menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

Untuk mengurangi dampak dari bencana lahar dingin tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

1. Mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Pusat, mengingat Padang Panjang merupakan salah satu sentra perdagangan hortikultura utama di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pasar, serta melakukan perbaikan jembatan dan jalan yang rusak akibat bencana, guna memastikan kelancaran distribusi barang.
3. Bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi dan distributor bahan pokok untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang, yang dipimpin langsung oleh Pj. Walikota, terus melakukan pemantauan pasar secara harian, dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas ekonomi dan pemulihan sektor perdagangan Kota Padang Panjang dapat segera tercapai.

(b) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

Capaian LPE Sektor Pertanian seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 2.40
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
LPE Sektor Pertanian (%)	5.03	0.15	2.98	4.99	194.92	5.54	107.57	1.87	33	5,64	5.74	2.61

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian Kota Padang Panjang pada tahun 2024 hanya sebesar 0,15%, jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 5,03%. Capaian ini hanya mencapai 2,98% dari target yang diperjanjikan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 30,02 poin, dari 33% pada tahun 2023 menjadi 2,98% pada tahun 2024. Penurunan ini juga sejalan dengan penurunan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, yang turun sebesar 1,72 poin, dari 1,87% pada tahun 2023 menjadi hanya 0,15% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, realisasi Tahun 2024 menjadi yang terendah dalam periode tersebut.

Dari perspektif target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kota Padang Panjang pada tahun 2024 belum mencapai target akhir RPD yang sebesar 5,74%. Dengan realisasi sebesar 0,15% pada tahun 2024, maka dibandingkan capaian akhir RPD, untuk indikator ini baru tercapai sebesar 2,61%.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kota Padang Panjang masih lebih rendah, yaitu 1,9 poin lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan 0,52 poin lebih rendah dari rata-rata nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Perbandingan LPE Sektor Pertanian Kota Padang Panjang

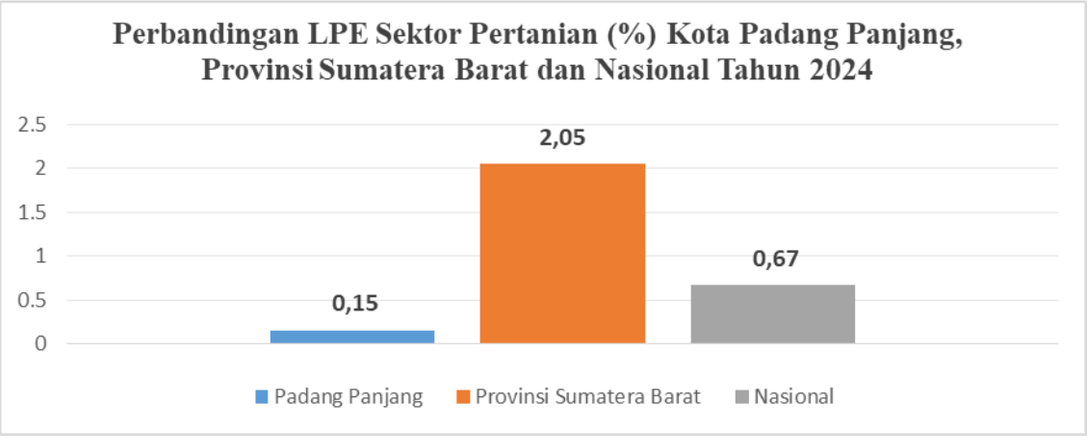

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 disebabkan oleh bencana alam banjir aliran lahar dingin erupsi gunung marapi yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lahan produksi sebanyak lebih kurang 21 hektar lahan sepanjang aliran sungai yang berokasi di kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Koto Katik, Guguk Malintang, Pasar Usang dan Silaing Bawah. Melihat kondisi ini Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian telah berupaya melakukan identifikasi lahan pertanian yang terdampak erupsi lahar dingin gunung marapi dan pembuatan saluran irigasi di Kelurahan Ekor Lubuk dan akan disusul dengan perbaikan saluran irigasi di kelurahan-kelurahan yang terdampak dan mengoptimalisasikan lahan pertanian yang terdampak bencana lahar dingin gunung marapi.

Di samping itu pada Tahun 2024 juga terjadi serangan hama tikus pada sejumlah lahan sawah di Kota Padang Panjang. Serangan hama tikus ini juga melanda daerah hintherland Padang Panjang, yaitu kawasan Batipuh dan X Koto yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar.

Faktor Bencana alam banjir aliran lahar dingin erupsi gunung marapi dan serangan hama tikus ini ditengarai menjadi faktor utama yang menyebabkan melambatnya LPE Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang.

Di samping itu pengaruh iklim ekstrem yang melanda Indonesia secara umum, juga sedikit banyak mempengaruhi LPE Sektor pertanian, tidak hanya di Kota Padang Panjang, tetapi juga di Kabupaten/Kot lain, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), LPE Sektor Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 juga mengalami penurunan dari 3,17% pada tahun 2023 menjadi 0,36% pada tahun 2024. Begitu pula dengan LPE Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Barat, yang menurun dari 3,54% pada tahun 2023 menjadi 2,05% pada tahun 2024. Secara nasional, LPE Sektor Pertanian juga mengalami penurunan, dari 1,31% pada tahun 2023 menjadi 0,67% pada tahun 2024.

Untuk menunjang peningkatan hasil produksi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melaksanakan gerakan tanam cepat panen, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, juga menyalurkan bantuan sosial berupa sarana prasarana pertanian dan bantuan uang langsung tunai dari anggaran Belanja TIdak Terduga (BTT) dan juga bekerja sama dengan *stakeholder* di Kota Padang Panjang. Hasilnya, produktivitas Padi di Kota Padang Panjang masih relatif tinggi (peringkat ke-2 tertinggi) dibandingkan Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik seperti yang ditunjukan tabel dibawah ini :

Tabel 2.41
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota
Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) 2022-2024

Kabupaten/Kota	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Hasil Kerangka Sampel Area KSA								
	Luas Panen (Hektar)			Produksi (Ton)			Produktivitas (Kuintal/Hektar)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	603,61	477,23	177,28	1.387,33	1.180,07	469,93	22,98	24,73	26,51
Kab. Pesisir Selatan	28.779,19	38.927,98	34.662,32	161.638,55	201.974,08	169.097,76	56,17	51,88	48,78
Kab. Solok	32.901,89	34.691,26	35.043,30	179.316,10	182.608,63	165.693,72	54,50	52,64	47,28
Kab. Sijunjung	14.031,40	17.377,43	15.173,75	53.949,21	63.412,33	58.513,64	38,45	36,49	38,56
Kab. Tanah Datar	31.023,69	33.235,51	32.568,98	169.881,11	181.490,95	155.918,36	54,76	54,61	47,87
Kab. Padang Pariaman	27.244,15	28.566,99	30.528,27	135.072,49	140.376,62	135.905,11	49,58	49,14	44,52
Kab. Agam	27.780,60	29.653,35	29.755,10	137.633,42	144.501,24	143.981,17	49,54	48,73	48,39
Kab. Lima Puluh Kota	25.526,84	28.648,49	30.598,33	118.608,29	137.891,52	133.347,38	46,46	48,13	43,58
Kab. Pasaman	29.509,35	31.040,77	29.505,06	144.110,46	144.628,81	129.953,37	48,84	46,59	44,04
Kab. Solok Selatan	12.047,91	13.288,45	13.057,27	49.760,15	54.601,34	50.018,00	41,30	41,09	38,31
Kab. Dharmasraya	9.984,60	9.619,48	10.318,73	47.554,99	44.033,05	46.801,32	47,63	45,77	45,36
Kab. Pasaman Barat	10.025,27	9.762,34	10.005,67	50.317,46	47.663,46	46.492,02	50,19	48,82	46,47
Kota Padang	8.857,74	11.011,24	10.118,08	45.241,87	58.020,74	49.182,71	51,08	52,69	48,61

Kota Solok	2.156,94	2.662,43	2.139,76	13.946,12	16.771,07	12.149,23	64,66	62,99	56,78
Kota Sawahlunto	1.852,64	1.938,03	2.040,30	11.600,30	12.265,28	11.129,69	62,61	63,29	54,55
Kota Padang Panjang	***863,83***	***857,31***	***755,82***	***5.789,00***	***5.483,86***	***4.448,48***	***70,01***	***63,97***	***58,86***
Kota Bukittinggi	617,78	559,68	597,97	4.082,69	3.540,22	3.773,77	66,09	63,25	63,11
Kota Payakumbuh	4.950,72	4.942,93	4.996,07	27.223,71	25.857,83	23.768,47	54,99	52,31	47,57
Kota Pariaman	3.161,96	3.303,87	3.236,93	16.418,94	16.167,69	15.823,80	51,93	48,94	48,89
Pov. Sumatera Barat	271.883,11	300.564,77	295.278,98	1.373.532,19	1.482.468,79	1.356.467,93	50,52	49,32	45,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2025

(c) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama mengingat Kota Padang Panjang merupakan daerah perlintasan yang dikenal dengan industri kuliner dan jasa penginapannya.

Capaian kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum (%)	10.92	7.45	68.22	7.38	203.31	10.47	140.73	6.52	62	10,95	11.43	65.17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 7,45% dari target yang ditetapkan sebesar 10,92%, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 68,22%.

LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat 0,93 poin dari 6,52% pada tahun 2023 menjadi 7,45% pada tahun 2024. Jika melihat tren tiga tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi sektor ini sempat mengalami fluktuasi, tetapi kembali meningkat pada tahun 2024. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 6,22 poin dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 62% menjadi 68,22% pada tahun 2024.

Dalam perspektif Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024–2026, realisasi laju pertumbuhan ekonomi sektor ini sebesar 7,45% masih di bawah target 10,95% pada tahun 2024, dengan capaian 68,04%. Begitu pula dengan target akhir RPD sebesar 11,43%, yang baru tercapai 65,17%.

Jika dibandingkan dengan tingkat regional dan nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang lebih tinggi 2,08 poin dibanding Provinsi Sumatera Barat (5,37%), namun masih lebih rendah 1,11 poin dibandingkan angka nasional (8,56%), seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 2.12
Perbandingan LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang

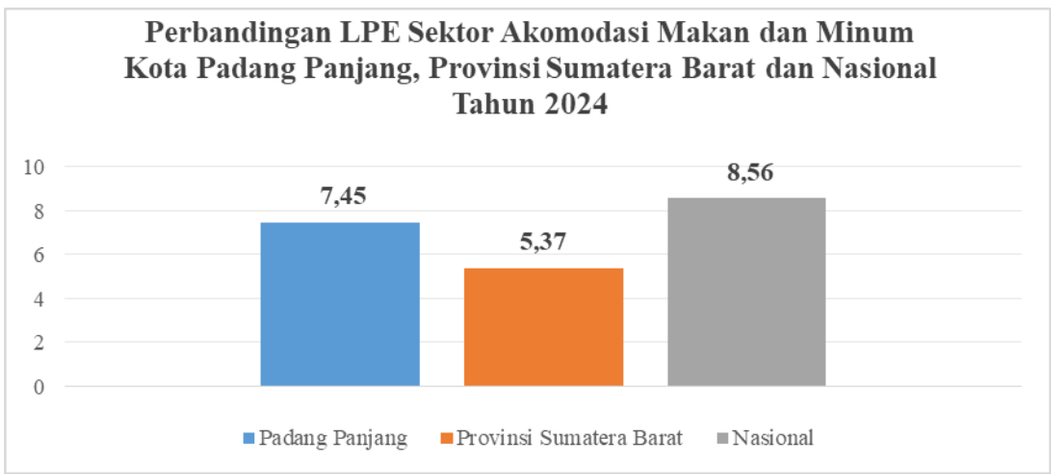

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa meskipun LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Padang Panjang tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun sektor ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat, meskipun lebih rendah dibandingkan tingkat nasional.

Untuk menunjang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini pada tahun 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang bersama perangkat daerah dan stakeholder telah melakukan berbagai upaya, terutama dalam menghadapi kendala akibat terputusnya jalan lintas nasional akibat erupsi lahar dingin Gunung Marapi. Setelah jalur jalan pulih kembali, pemerintah mengadakan berbagai event, seperti Festival Merah Putih, Road Race, Kompetisi Modifikasi Mobil, PAPAFEST 2024, dan berbagai acara lainnya guna menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan pembenahan dan pengaturan Pasar Kuliner Padang Panjang agar semakin menarik bagi pengunjung untuk berbelanja serta menikmati sajian makanan dan minuman yang ditawarkan para pedagang.

Untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor ini, pemerintah juga membuka kesempatan bagi organisasi keagamaan umat Islam, baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat, untuk mengadakan acara keagamaan di Masjid Islamic Center, yang telah menjadi ikon wisata halal Kota Padang Panjang.

Upaya pemasaran dan promosi wisata terus dilakukan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengusaha hotel dan penginapan untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta layanan agar lebih menarik bagi wisatawan. Selain itu, rumah makan dan restoran juga didorong untuk menyusun strategi peningkatan kunjungan pelanggan, baik melalui penyesuaian harga, peningkatan layanan, inovasi rasa, maupun promosi melalui media elektronik dan konvensional.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Panjang dapat terus meningkat dan bergerak ke arah yang lebih positif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 12.911.960.530.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.504.929.634.00 (96.85%) yang tersebar pada perangkat daerah Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan 16 program, yaitu :

1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Penyuluhan Pertanian
6. Pengawasan Keamanan Pangan
7. Pengelolaan Perikanan Budidaya
8. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
10. Pemasaran Pariwisata
11. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
12. Hubungan Industrial
13. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
14. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
15. Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Sasaran Meningkatnya Investasi

Sasaran "Meningkatnya Investasi" diukur menggunakan indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi. Indikator ini merupakan indikator baru yang diperkenalkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026.

Capaian terhadap sasaran ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Meningkatnya Investasi

INDIKATOR KINERJA	2024			2023			2022				2021		RPD 2024-2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR (%)
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	6	38.6	643.26	0.88	45.42	5161.5	0.96	73.86	7693.41	1.4	53.78	3841.40	100	38,6

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi investasi pada tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024. Pada tahun 2021, realisasi pertumbuhan investasi mencapai 53,78%, mengalami kenaikan menjadi 73,86% pada tahun 2022. Tahun 2023 realisasi investasi turun menjadi 45,42% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 38,6% pada tahun 2024.

Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan investasi tahun 2024 sebesar 38,6% jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yang sebesar 6%, dengan dmeikian capaiannya adalah 643,26%. Dibandingkan dengan target akhir RPD yang sebesar 100% maka capaian tahun 2024 ini sudah sebesar 38,6%.

Berikut ini tabel perhitungan nilai investasi Kota Padang Panjang dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 2.44
Realiasi Investasi di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Investasi Tahunan (Rp. milyar)	26.59	14.3	30.2	32.9	39.9
2	Jumlah Realisasi Investasi sd Tahun-n (Rp. milyar)	26.59	40.89	71.09	103.38	143.28
3	Penambahan (Rp.milyar)	-	14.3	30.2	32.29	39.9
4	Persentase Kenaikan (%)	-	53.78	73.86	45.42	38.60
5	Capaian (%)		3841.40	7693.41	5161.51	643.26

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, 2024

Keterangan :

1. Realisasi Investasi Tahunan adalah realisasi investasi baru di tahun yang bersangkutan.
2. Jumlah realisasi investasi sd Tahun-n diperoleh dengan menggunakan rumus:

   Jumlah Realisasi Investasi sampai dengan tahun n =

   Realisasi Tahun n+Realisasi Tahun (n−1)
3. Penambahan diperoleh dengan rumus :

   Penambahan = Jumlah Realisasi Investasi sampai dengan tahun n -

   Jumlah Realisasi Investasi sampai dengan Tahun (n−1)

4. Persentase kenaikan, diperoleh dengan rumus:

   Nilai Pertumbuhan Investasi=Jumlah Realisasi Tahun n−Jumlah Realisasi Tahun (n−1) /Nilai Pertumbuhan Investasi x 100%

5. Adapun capaian indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi diperoleh dengan rumus:

   Capaian = Persentase Kenaikan Tahun n/Target Tahun n×100%

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pertumbuhan nilai investasi di Kota Padang Panjang tahun 2024 antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan layanan jemput bola perizinan, menyediakan layanan perizinan online, serta menghadirkan kanal pembayaran nontunai untuk mempermudah proses investasi.
2. Pengawasan rutin kepada pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan investasi.
3. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan temu bisnis sebagai ajang promosi investasi, guna menarik lebih banyak investor.
4. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Padang Panjang, yang memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan administrasi investasi secara terintegrasi.
5. Diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, beberapa kemudahan yang diberikan juga berkontribusi terhadap lonjakan pertumbuhan nilai investasi, antara lain:

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dilakukan setelah persyaratan terpenuhi, sehingga mempercepat proses legalitas usaha.
2. Pengunggahan dokumen secara online, yang langsung diproses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melalui aplikasi berbasis web, sehingga lebih efisien.
3. Penyediaan layanan perizinan online, yang memungkinkan pelaku usaha mengurus izin tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Investasi, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2.070.079.651.00. dengan realisasi sebesar Rp.2.070.079.651.00 (91,23%) untuk melaksanakan 5 program, yaitu :

1. Pelayanan Penanaman Modal
2. Perencanaan Dan Pembangunan Industri

3. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
4. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemiskinan dan pengangguran Kota Padang Panjang diukur melalui 2 indikator, yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45
Capaian Menurunnya Kemiskinan Dan Pengangguran

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISAS	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
1. Tingkat Kemiskinan (%)	4.64	5.31	85.56	5.32	88.72	5.14	108.87	5.24	98.05	3.34	41.02
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.80	4.94	97.08	4.90	130.99	4.84	96.80	5.49	86.57	4.36	86.70

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Capaian untuk masing-masing indikator dapat dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

(a) Indikator Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Negara. Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dalam kurun 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46
Capaian Menurunnya Kemiskinan

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
Tingkat Kemiskinan (%)	4.64	5.31	85.56	5.32	88.72	5.14	108.87	5.24	98.05	3.34	41.02

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 5,31%, masih berada di atas target yang ditetapkan, yaitu 4,64%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 85,56%. Data dalam tiga tahun terakhir

menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan. Dengan realisasi tersebut, pencapaian terhadap target akhir RPD baru mencapai 41,02%.

Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-masing tercatat sebesar 5,97% dan 8,57%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 2.13
Perbandingan Tingkat Kemiskinan tahun 2024

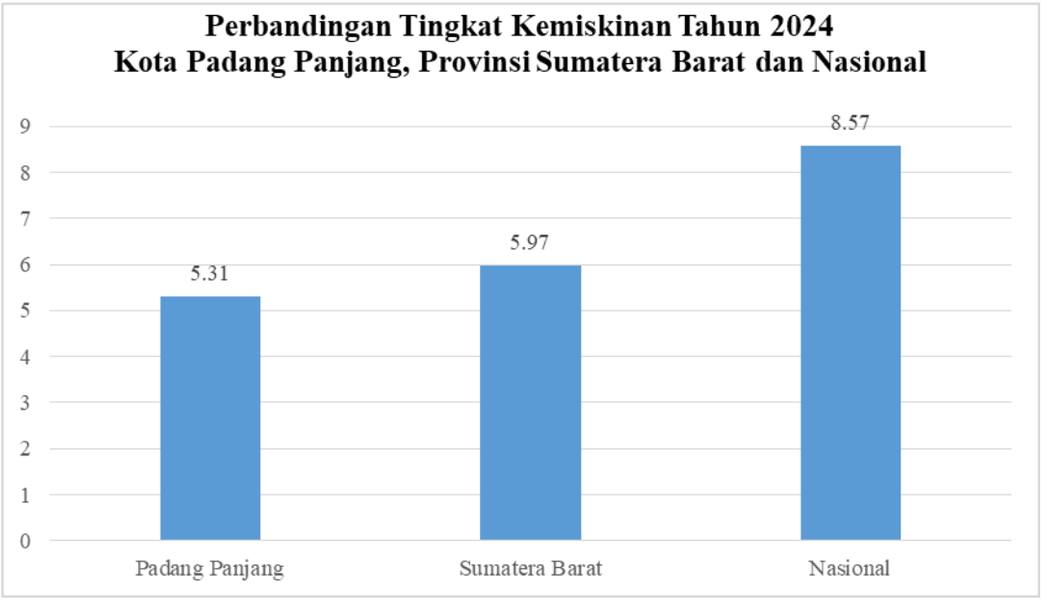

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako 2024, diolah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang lebih rendah dibandingkan 11 daerah, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, Kota Padang Panjang masih belum mencapai tingkat kemiskinan serendah tujuh daerah lainnya, yakni Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 Kota Padang Panjang

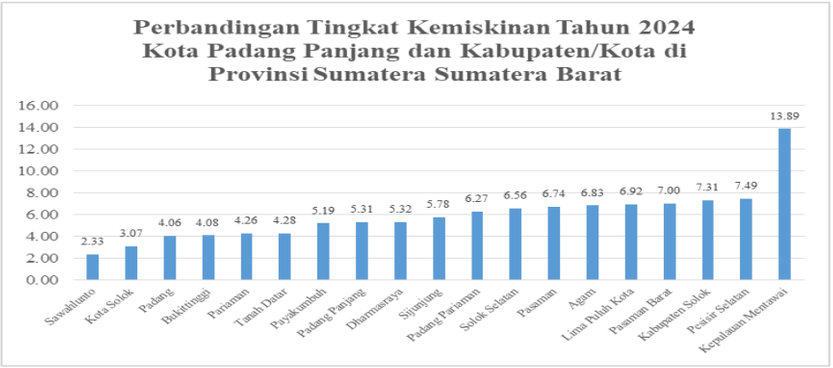

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako, 2024 (data diolah)

Berikut adalah upaya dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menurunkan tingkat kemiskinan:

1. Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat

   Menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program jaminan kesehatan.

2. Dukungan bagi UMKM

   Memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa program bedah warung, isi warung, penyediaan gerobak, serta peralatan usaha guna meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

3. Bantuan di Sektor Peternakan dan Perikanan

   Menyalurkan bantuan ternak seperti sapi, ayam, itik, kambing, dan ikan, serta menyediakan sarana produksi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.

4. Peningkatan Kualitas Hunian

   Melaksanakan program bedah rumah, mendukung operasional Rusunawa sebagai hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

   Menyediakan kebutuhan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mencakup permakanan, sandang, alat bantu, serta bimbingan fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, mengupayakan bantuan dari Kementerian Sosial dan BAZNAS bagi masyarakat yang telah terdata dan diasesmen.

6. Dukungan di Sektor Pendidikan

   Memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin, serta bantuan peralatan sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

7. Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

   Menyediakan asuransi ketenagakerjaan bagi 6.568 pekerja rentan di sektor informal, guna memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi pekerja dengan risiko tinggi.

Dengan strategi ini, Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor penghambat keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah:

1. Perilaku dan mentalitas penduduk miskin

   Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 3.060 jiwa dari total 59.453 jiwa, atau 5,31% dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data pensasaran kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK-RI (P3KE), sebanyak 2.990 jiwa penduduk miskin Kota Padang Panjang masuk dalam Desil Kesejahteraan 1 (Desil 1). Dari segi pendidikan, hanya 1,03% yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, sementara 19,07% tamat SMA, 13,29% tamat SMP, 13,29% tamat SD, dan 13,40% tidak/belum pernah bersekolah.

   Meskipun sebagian besar telah menerima berbagai bentuk bantuan dalam beberapa tahun berturut-turut, banyak dari mereka belum mampu keluar dari kategori miskin. Hal ini disebabkan oleh mentalitas dan pola perilaku yang kurang mendukung kemandirian ekonomi, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta sikap pasif yang lebih mengandalkan bantuan dibandingkan usaha sendiri. Jika tidak diubah, pola pikir seperti ini akan terus menjadi penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun etos kerja, kemandirian, serta pola pikir produktif di kalangan penduduk miskin agar mereka dapat keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Minimnya Lapangan Usaha

   Dari aspek ketenagakerjaan, berdasarkan data P3KE tahun 2024, terdapat 1.469 orang atau 33,54% penduduk miskin di Kota Padang Panjang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau layak. Sementara itu, sebanyak 699 orang atau 15,96% hanya bekerja sebagai buruh harian lepas.

   Rendahnya tingkat pekerjaan tetap ini menyebabkan pendapatan masyarakat miskin cenderung tidak stabil dan rendah, sehingga menjadi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasil analisis data P3KE juga menunjukkan bahwa salah satu jenis pekerjaan yang paling umum di kalangan penduduk miskin Kota Padang

Panjang adalah petani pekerja lepas. Namun, dengan luas wilayah yang hanya 23 km², lahan pertanian di Kota Padang Panjang semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Selain keterbatasan lahan, minimnya investasi dan peluang usaha di Kota Padang Panjang juga berkontribusi pada rendahnya serapan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pengembangan sektor ekonomi kreatif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dorongan bagi UMKM dan wirausaha mandiri. Dengan memaksimalkan potensi yang ada, diharapkan perekonomian Kota Padang Panjang dapat lebih inklusif dan memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

3. Belum Optimalnya Koordinasi dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya koordinasi dan integrasi antarprogram, mulai dari pendataan sasaran, penetapan penerima bantuan, realisasi program, hingga kesinambungan dan keterpaduan sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Lemahnya koordinasi ini menyebabkan berbagai permasalahan, di antaranya:

- Kesulitan dalam memetakan profil dan akar permasalahan kemiskinan secara komprehensif.
- Ketidaktepatan dalam proses perencanaan, yang dapat berdampak pada kurang efektifnya intervensi program.
- Tumpang tindih pemberian bantuan, di mana ada individu atau kelompok yang menerima bantuan ganda, sementara yang lain tidak terjangkau.
- Sulitnya mengukur capaian program karena kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan sinkronisasi data antarinstansi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan sistem pemantauan berbasis data yang lebih akurat dan real-time guna memastikan bahwa setiap program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

(b) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang dalam kurun 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.47
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.80	4.94	97.08	4.90	130.99	4.84	96.80	5.49	86.57	4.36	86.70

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,94%, masih sedikit di atas target yang ditetapkan, yaitu 4,80%, dengan capaian kinerja sebesar 97,08%. Namun, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2023, dengan penurunan sebesar 0,55 poin.

Selain itu, target akhir RPD Kota Padang Panjang 2024-2026 sudah hampir tercapai, dengan realisasi mencapai 86,7%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, angka ini lebih baik sebesar 0,45 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 2.15
Perbandingan Tingkat Pengganguran Terbuka tahun 2024

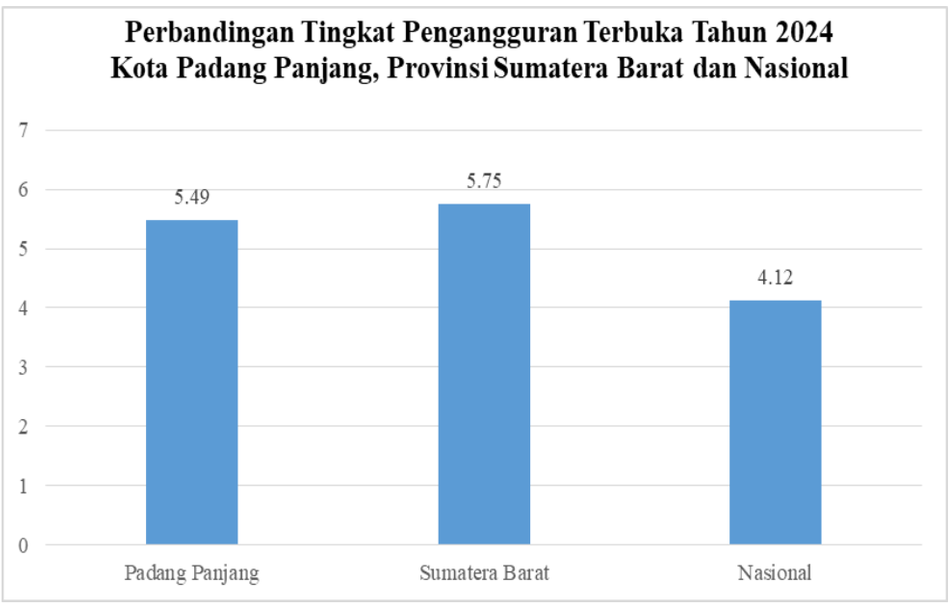

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako, 2024 (data diolah)

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok

Selatan, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Solok.

Grafik2.16
Perbandingan tingkat Pengganguran Terbuka Tahun 2024

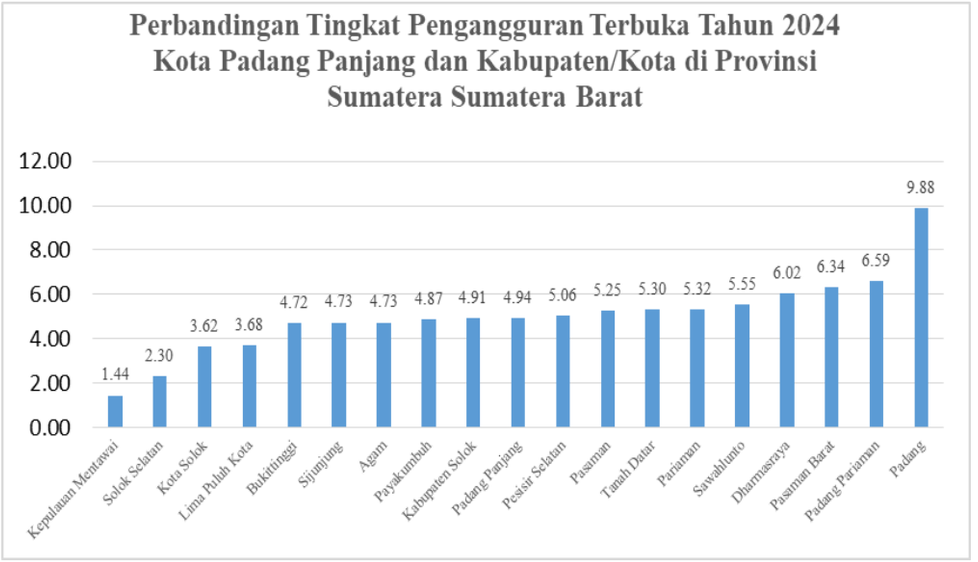

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Faktor-faktor Penghambat Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang:

1. Meningkatnya Jumlah Penduduk Usia Kerja

   Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang Tahun 2024, jumlah angkatan kerja mencapai 29.188 jiwa, mengalami kenaikan 582 jiwa (2,03%) dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 28.606 jiwa.

2. Ketidaksesuaian Keahlian dengan Kebutuhan Dunia Kerja

   Banyak pencari kerja memiliki keterampilan yang belum selaras dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, sehingga sulit terserap dalam pasar kerja.

3. Minimnya Pengalaman Kerja

   Hal ini terutama terjadi pada fresh graduate atau lulusan baru yang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.

4. Kurangnya Investasi Baru dan Lapangan Pekerjaan

   Rendahnya realisasi investasi di Kota Padang Panjang menyebabkan minimnya penciptaan lapangan kerja baru, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024:

1. Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi
   a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan Bahasa Jepang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
2. Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Dunia Usaha
   a. Melakukan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja.
   b. Mengirim peserta pelatihan ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
3. Memfasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
   a. Melakukan kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 2 Padang Panjang serta perusahaan yang bergerak dalam penempatan tenaga kerja.
4. Optimalisasi Informasi Lowongan Kerja
   a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang bekerja sama dengan perusahaan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dan luar provinsi untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja.
5. Peningkatan Peran Bursa Kerja Khusus (BKK)
   a. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh BKK yang ada di Kota Padang Panjang dalam bentuk:
   b. Penyampaian informasi lowongan kerja.
   c. Pemberian motivasi kepada BKK agar lebih aktif dalam menempatkan lulusan sekolah menengah ke dunia kerja.
   d. Kegiatan lain yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran.

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 12.352.600.970.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.147.930.398.00 (90.25%) untuk melaksanakan 5 program, yaitu :

1. Pengembangan UMKM
2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Penempatan Tenaga kerja

6. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Sasaran strategis "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) dalam ribu rupiah.

Pengeluaran per kapita mengacu pada rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Indikator ini dihitung dengan membagi total pengeluaran konsumsi rumah tangga selama satu bulan dengan jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan berdasarkan paritas daya beli.

Capaian terhadap sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN AKHIR (%)
Pengeluaran Perkapita (Rp.000)	11.328	11.840	104.52	10.754	99.93	11.153	102.13	11.310	100.89	11.453	103.4

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai Rp.11.840.000,- per tahun, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp.11.328.000,-. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 104,52%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang Panjang pada tahun 2024 memiliki daya beli yang tinggi, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026, pengeluaran per kapita pada tahun 2024 ini telah berada di atas target yang ditetapkan untuk Tahun 2026, yaitu sebesar Rp.11.453.000,-, dengan capaian kinerja sebesar 103,38%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 telah melampaui target akhir yang direncanakan dalam RPD, bahkan telah melebihi pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Barat walaupun belum sebaik pengeluaran per kapita nasional, seperti ditunjukkan grafik berikut ini :

Grafik 2.17
Perbandingan Pengeluaran Kapita Tahun 2024

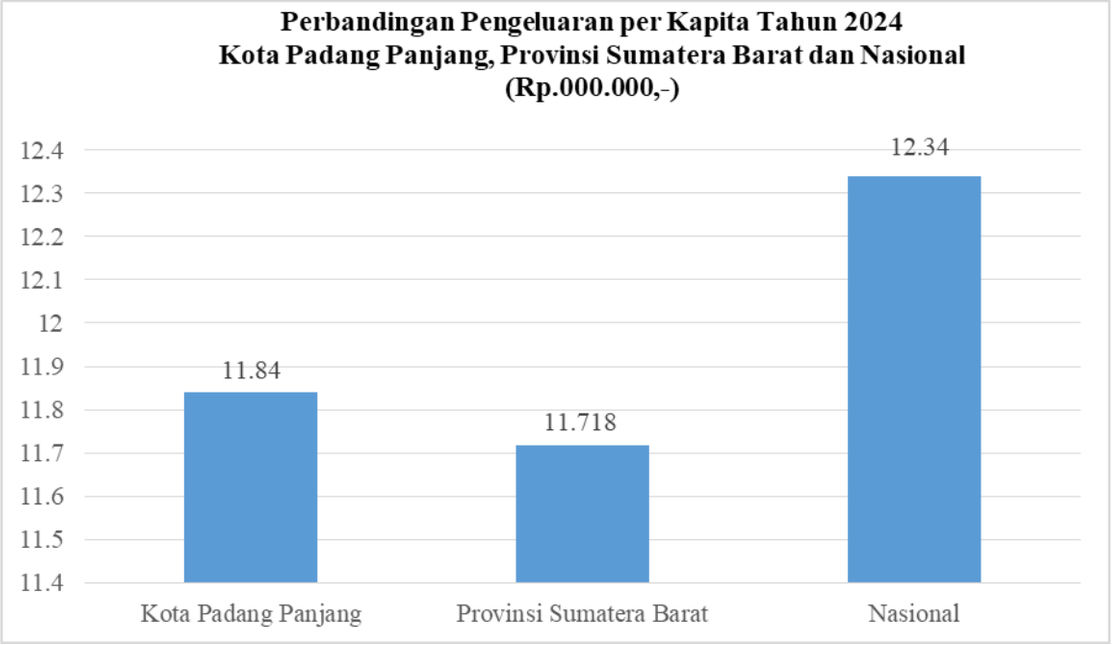

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang menempati peringkat ke-8. Pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang juga tercatat lebih rendah Rp.70.000 dibandingkan dengan pengeluaran per kapita rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yang mencapai Rp.11.380.000,- , sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Grafik 2.18
Perbandingan pengeluaran perKapita Tahun 2024

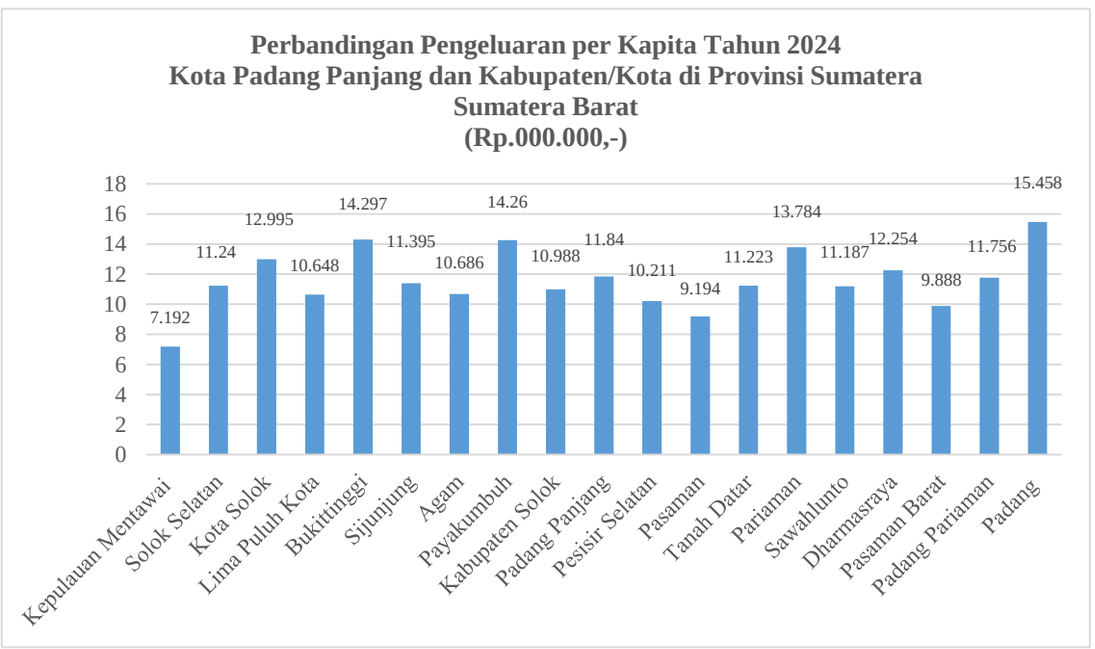

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Padang Panjang Dalam Angka 2025, diolah

Faktor-faktor pendukung keberhasilan sasaran "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta penerapan desain dan teknologi terhadap 391 unit usaha mikro di Kota Padang Panjang.
2. Komitmen Wali Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya dalam peningkatan keterampilan calon pencari kerja melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini didanai melalui berbagai sumber, termasuk APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta sumber dana lainnya.
3. Optimalisasi pembinaan ekonomi kreatif melalui pendampingan kelompok pelaku ekonomi kreatif serta fasilitasi penyelenggaraan event/festival sebagai sarana promosi dan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif lokal.
4. Pembinaan kelembagaan tani dan pelaku usaha pertanian, peternakan, serta perikanan melalui penyuluhan yang masif, berkala, dan berkelanjutan. Selain itu, transfer teknologi juga didorong melalui partisipasi dalam Pekan Nasional (PENAS) Tani, yang menjadi wadah peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pertanian.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 554.128.860.00 dengan realisasi sebesar Rp. 496.136.136.00 (89,54%) untuk melaksanakan 3 program, yaitu :

1. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

4. Tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis

Capaian tujuan Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis diukur melalui indikator Indeks Rasa Aman. Indeks Rasa Aman diukur dari dimensi Persentase Pemajuan Budaya (30%), Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan (35%), Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (20%) dan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%). Capaian indikator Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.49
Capaian Indeks Rasa Aman

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Rasa Aman	Aman (86.80)	79.29	91.35	-	-	75.49	87.74	76.60	82.75	Aman (91.78)	86.39

Sumber : LKjIP Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SatpolPP Damkar, Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat realisasi Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 79,29. Dengan nilai indeks tersebut, tingkat capaian yang diperoleh dari target tahunan yang ditetapkan adalah sebesar 91.35%. Sementara terhadap target akhir RPD, nilai indeks tersebut baru mencapai 86,39%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 86.80, namun terlihat adanya peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi indeks rasa aman tahun-tahun sebelumnya dengan nilai masih termasuk kategori "aman".

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang Tahun 2024 masih harus terus ditingkatkan secara signifikan sehingga dapat mencapai target sebesar 91.78 pada Tahun 2026. Artinya diperlukan upaya sungguh-sungguh pada keempat dimensi yang membentuk rasa aman tersebut. Dimensi mana saja yang perlu ditingkatkan secara maksimal, dapat terlihat dari analisis sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat

   Capaian sasaran strategis Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat diukur melalui 2 indikator yaitu persentase pemajuan kebudayaan dan persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan. Persentase pemajuan kebudayaan diukur dari pelaksanaan 11 objek pemajuan kebudayaan. Sedangkan persentase masjid aktif yang melaksanakan kegiatan keagamaan di ukur dengan pelaksanaan aktivitas keagamaan di mesjid dengan komponen Pelaksanaan Kegiatan Shalat Berjamaah Lima Waktu, Wirid Bulanan, Didikan Subuh, Remaja Masjid, Majelis Ta'lim dan Kepengurusan Masjid. Capaian Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.50
Capaian Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Persentase Pemajuan Kebudayaan	74,10	66.16	89,24	-	-	65.45	97.69	74.09	94.99	77	85,92
Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85.00	71,42	84,02	-	-	-	-	-	-	95	75,18

Sumber : LKjIP Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Indikator Persentase Masjid Yang Aktif melaksanakan aktivitas keagamaan merupakan indikator baru yang muncul pada RPD 2024-2026. Sama halnya dengan indikator Persentase Mesjid Aktif yang melaksanakan kegiatan keagamaan, persentase pemajuan kebudayaan belum menjadi target kinerja pada tahun 2021, sehingga tidak tersedia data capaian kinerja untuk diperbandingkan. Adapun hasil analisis capaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

(a) Persentase Pemajuan Kebudayaan

Perbandingan capaian indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2021 sampai dengan 2024, serta capaian Tahun ke-1 RPD adalah seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Persentase Pemajuan Kebudayaan	74,10	66,16	89,28	-	-	65.45	97.69	74.09	94.99	77	85.92

Sumber : LKjIP DInas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat Persentase Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 66,16 dari target yang telah ditetapkan 74,10 sehingga capaian kinerjanya 89,28%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Pemajuan Kebudayaan belum sesuai target. Persentase pemajuan kebudayaan diukur dari rata-rata nilai pemajuan kebudayaan dari 11 objek pemajuan kebudayaan yaitu :

1. Manuskrip;
2. Tradisi Lisan;
3. Adat Istiadat;
4. Ritus (cagar budaya yang sifatnya kepercayaan);

5. Pengetahuan Tradisional (pasambahan);
6. Teknologi Tradisional;
7. Seni;
8. Bahasa;
9. Permainan Rakyat;
10. Olahraga Tradisional; dan
11. Cagar Budaya

Masing-masing objek dinilai berdasarkan pembobotan dari 6 langkah pengelolaan, yaitu : 30% identifikasi, 10% observasi, 5% sosialisasi, 10% internalisasi, 15% dokumentasi, dan 30% literasi. Berdasarkan hasil data lapangan dan studi kepustakaan yang telah dirumuskan bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya, data per objek pemajuan kebudayaan dituangkan didalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Padang Panjang. Adapun capaian kinerja pemajuan kebudayaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Pemajuan Kebudayaan Pada Tahun 2024

NILAI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
A	**Manuskrip**							
1	Tambo Nagari Gunuang	√	√			√		55%
		JUMLAH NILAI						**55,00%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
B	**Tradisi Lisan**							
1	Sejarah Masjid Asasi	√	√	√	√	√	√	100%
2	Legenda Payo Sianto Pulang	√	√					40%
3	Legenda Batu Tingkok	√	√					40%
4	Legenda Batu Anak Daro	√	√					40%
5	Pasambahan	√	√	√	√	√	√	100%
6	Manyerak Bareh Kunyik	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**70,00%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
C	**Adat Istiadat**							
1	Matrilineal	√	√	√				45%
2	Sistem Kelarasan	√	√	√				45%
3	Manjapuik Anak	√	√					40%
4	Manjapuik Sumando	√	√					40%
5	Oyak Jambu	√	√					40%
6	Baronde	√	√	√		√		60%
7	Perkawinan Minangkabau	√	√	√	√			55%
8	Batagak Batu	√	√					40%
9	Batagak Pangulu	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**51,67%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
D	**Ritus**							
1	Manjapuik Anak	√	√					40%
2	Manjapuik Sumando	√	√					40%
3	Oyak Jambu	√	√					40%
4	Baronde	√	√	√		√		60%
5	Perkawinan Minangkabau	√	√	√	√			55%
6	Batagak Batu	√	√	√	√	√	√	100%
7	Batagak Pangulu	√	√	√	√	√	√	100%
8	Ratik	√	√					40%
9	Pengangkatan / Pergantian Khatib, Imam, Bilal Masjid Asasi	√	√					40%
		JUMLAH NILAI						**57,22%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
E	**Pengetahuan Tradisional**							
1	Tapuang Pisang	√	√	√	√	√	√	100%
2	Cangkuak	√	√	√	√	√	√	100%
3	Nasi Baka	√	√	√	√	√	√	100%
4	Sitawa	√	√					40%
5	Sidingin	√	√					40%
6	Aia Daun Bungo Rayo	√	√					40%
7	Aia Daun Jarak	√	√					40%
8	Aia Daun Kacang Tujuah	√	√					40%
9	Aia Daun Kacang Tujuah	√	√					40%
10	Paragede Jaguang	√	√	√	√	√	√	100%
11	Bareh Gisiak	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**67,27%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
F	**Teknologi Tradisional**							
1	Lasuang	√	√					40%
2	Kincia	√	√	√				45%
3	Bajak Kabau	√	√					40%
4	Padati	√	√					40%
5	Bendi	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**53,00%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
G	**Seni**							
1	Seni Sastra	√	√	√	√	√	√	100%
2	Seni Musik							
	- Dendang Gunuang	√	√	√	√	√	√	100%
	- Pupuik Baranak	√	√	√	√	√		70%
	- Salawaik	√	√	√	√	√		70%
	- Gamad	√	√	√	√	√	√	100%
3	Seni Teater							
	- Randai Sutan Wahab	√	√					40%
	- Randai	√	√	√	√	√	√	100%
	- Sandiwara	√	√					40%
4	Seni Tari							
	- Tari Mancak	√	√	√	√	√		70%
	- Tari Randai Salapan	√	√	√	√	√	√	100%
	- Tari Sewah	√	√	√	√	√		70%
	- Tari Piriang	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**80,00%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
H	**Bahasa**							
1	Dialek Gunuang	√	√	√				45%
2	Dialek Minangkabau	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**72,50%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
I	**Permainan Rakyat**							
1	Alang – Alang	√	√	√	√	√	√	100%
2	Badia – badia batuang	√	√					40%
3	Dama	√	√					40%
4	Lakon Semba	√	√					40%
		JUMLAH NILAI						**55,00%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
J	**Olahraga Tradisional**							
1	Silek Tuo Gunuang	√	√	√	√	√	√	100%
		JUMLAH NILAI						**100,00%**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Identifikasi (30%)	Observasi (10%)	Sosialisasi (5%)	Internalisasi (10%)	Dokumentasi (15%)	Literasi (30%)	Keterangan
K	**Cagar Budaya**							
1	Masjid Asasi Sigando	√	√	√	√	√		70%
2	Situs Pusaro Tuanku Daulat	√	√			√		55%
3	Gedung SMAN 1 Padang Panjang	√	√	√		√		60%
4	Gedung SMPN 1 Padang Panjang	√	√	√		√		60%
5	Rumah Karnalis Sutan Pangeran	√	√			√		55%
6	Stasiun Kereta Api Padang Panjang	√	√	√	√	√	√	100%
7	Jembatan Kereta Api	√	√	√	√	√	√	100%
8	Jembatan Kayu Putiah (Jembatan Kereta Api dalam Kota)	√	√	√	√	√	√	100%
9	Jembatan Ngalau (Jembatan Kereta Api dalam Kota)	√	√	√	√	√	√	100%
10	Asrama Diniyah Puteri dan Tugu Diniyah Putri	√	√	√	√	√		70%
11	Mts.DMP Diniyah Puteri	√	√	√	√	√		70%
12	Komplek Makam Rahmah El Yunusiyah	√	√	√	√	√		70%
13	Tugu Kecelakaan Kereta Api Zaman Jepang (Balai-Balai)	√	√			√		55%
14	Tugu Perang Batipuah	√	√			√		55%
15	Panti Budaya	√	√	√		√		60%
16	Bioskop Karya	√	√			√		55%
17	Puncak Pagaduangan	√	√					40%
18	Bak Aia Simpang Lapan	√	√					40%
19	Surau Jambatan Basi	√	√			√		55%
20	Restoran Gumarang	√	√			√		55%
21	Rumah Gadang Bukitsurungan	√	√	√	√	√		70%
22	Tugu Desa Baru	√	√	√		√		60%
		JUMLAH NILAI						**66,14%**
		TOTAL NILAI						**66,16%**

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,75% dari capaian tahun 2023 yang sebesar 94,99% menjadi 89,24%. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan mengalami fluktuasi. Setelah mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, pada Tahun 2024 realisasi pemajuan kebudayaan mengalami penurunan.

Penurunan capaian kinerja pemajuan kebudayaan disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan

upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang. Berikut beberapa dokumentasi pemajuan kebudayaan yang belum sepenuhnya tersedia di Kota Padang Panjang:

1. Dokumen Verbal
2. Dokumen Audio
3. Sketsa
4. *Hand Survey*
5. Gotografi/pemotretan
6. dokumentasiAudio Visual
7. Fotogrametri
8. *Terrestrial Lase Scanning* (TLS)
9. Sistem Informasi Geografis (SIG), dan
10. *Unnamed Aerial Vehicle*.

Sedangkah pada langkah literasi, belum maksimalnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan, serta berkontribusi dalam memajukan kebudayaan pun masih sedikit sekali di Kota Padang Panjang.

Belum optimalnya beberapa langkah pemajuan kebudayaan tersebut diatas salah satunya disebabkan karena Kota Padang Panjang belum memiliki tim ahli untuk pemajuan kebudayaan, sehingga mulai dari langkah identifikasi sampai langkah literasi belum optimal dilakukan. Berdasarkan hasil analisa terhadap capaian kinerja diatas, dapat dirumuskan beberapa langkah yang dapat dilakukan kedepannya dalam rangka pemajuan kebudayan Kota Padang Panjang, yakni:

1. Bekerjasama dengan Balaibudaya sumatera barat untuk mendatangkan tim ahli untuk melakukan pemetaan sampai dengan kajian-kajian pemajuan kebudayaan itu sendiri, sehingga nanti nya terdapat kajian ilmiah mengenai kebudayaan yang ada di kota Padang Panjang.
2. Melakukan sosialisasi Kembali kepada masyarakat kota Padang Panjga tentang penting nya pemajuan terhadap kebudayaan itu sendiri.
3. Melakukan kegiat-kegiatan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, sehingga nanti nya dapat terinternalisasi terhadap masyarat yang berada di Kota Padang Panjang

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Persentase Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 66,16 dari target sebesar 77,00 dengan capaian kinerja sebesar 85,92 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 masih berselisih 14,08 dari target akhir RPD.

Perbandingan pengelolaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pada tahun 2022, 2023 dan 2024 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 2.19
Perbandingan Realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan
Tahun 2022 sd 2024

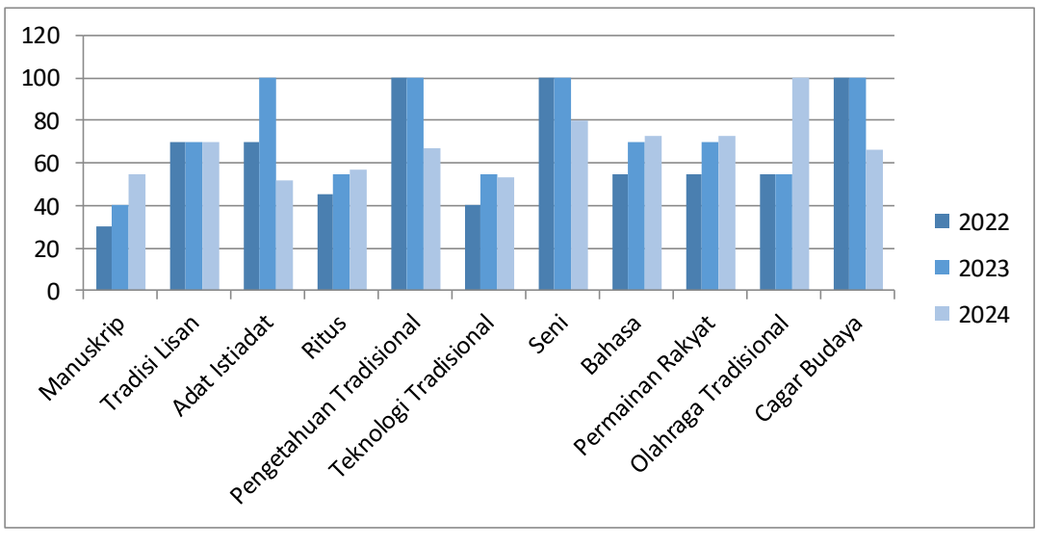

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

(b) Persentase Mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan

Selain dijuluki sebagai Kota Serambi Mekah, Kota Padang Panjang juga menjadi pelopor pendidikan Islam modern di Sumatera, sehingga Kota Padang Panjang memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas keagamaan. Selain keberadaan lembaga pendidikan keislaman yang sudah sejak lama menjadi rujukan oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, berbagai aktivitas keagamaan juga menjadi tolok ukur citra kota. Dalam perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu, indikator keagamaan selalu menjadi perhatian dan tidak pernah ditinggalkan. Indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan merupakan indikator baru pada RPD 2024-2026. Capaian indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Capaian Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85.00	71.42	84.02	75	95	75.18

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Realisasi indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 71.42% dari target yang telah ditetapkan 85% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 84.02%. Dari data yang dikumpulkan, dari 49 Mesjid yang ada di Kota Padang Panjang, 35 mesjid di nilai Aktif berdasarkan kegiatan agama yang dilaksanakan..

Karena indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, telah terjadi penurunan sebesar 3.58%, dari 75% menjadi 71.42%. Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indikator Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 71.42% dengan capaian 75.18% dari target 95%. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih sangat diperlukan upaya yang efektif dan cepat.

Persentase masjid aktif yang melaksanakan aktivitas keagamaan diukur dari pembobotan aktivitas keagamaan yang dilaksanakan pada setiap masjid. Aktivitas keagamaan yang menjadi tolak ukur ke aktivan masjid yakni, Sholat Berjamaah Lima Waktu (40%), Wirid Bulanan (15%), Didikan Subuh (5%), Remaja Mesjid (15%), Kepengurusan Mesjid (15%) dan Majelis Taklim (10%). Berikut disampaiakn capaian kinerja Mesjid Aktif yang melaksanakan kegiatan Keagamaan di Kota Padang Panjang selama tahun 2024.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Mesjid Aktif yang melaksnakan Kegiatan Keagamaan
Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Bobot Nilai Kegiatan	Jumlah mesjid yang melaksanakan	Jumlah seluruh mesjid
1	Sholat berjamaah Lima Waktu	1 Sholat Lima Waktu Berjamaah	40%	49	49
2	Wirid Bulanan	1 Pembacaan Surah Yasin	15%	49	49
		2 Ceramah			
3	Didikan Subuh	1 Pembinaan ba'da shalat subuh	5%	37	49
4	Remaja Mesjid	1 Wirid pengajian	15%	17	49

No	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Bobot Nilai Kegiatan	Jumlah mesjid yang melaksanakan	Jumlah seluruh mesjid
		2 Pembinaan Remaja Mesjid			
5	Kepengurusan Mesjid	1 Pengelolaan Aktivitas Mesjid	15%	49	49
6	Majlis Ta'lim	1 Ceramah Agama	10%	31	49
		2 Pendalaman materi agama melalui tanya jawab			

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Padang Panjang, 2024

Tingkat keaktifan pada masing-masing komponen dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 49 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang sampai dengan akhir tahun 2024, seluruh mesjid telah melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, melaksanakan wirid bulanan dan seluruh masjid telah memiliki kepengurusan mesjid. Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas Didikan Subuh. Aktivitas ini rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap minggu. Di Kota Padang Panjang dari 49 mesjid, terdapat 37 mesjid yang melaksanakan kegiatan TPQ/MDA. 37 Mesjid tersebut rutin melaksanakan aktivitas Didikan Subuh.

Terkait dengan kegiatan Remaja Mesjid, terlihat tingkat aktivitas yang lebih sedikit. Dari 49 mesjid terdapat 17 mesjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Belum maksimalnya kegiatan remaja masjid ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran. Dan terkait majelis ta'lim, dari 49 mesjid, hanya 31 mesjid yang membentuk Majelis Ta'lim dan 31 mesjid tersebut secara rutin melaksanakan kegiatan dimesjid dan juga mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari mesjid ke mesjid. Selain itu, masing-masing kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di mesjid masing-masing.

Meskipun capaian kinerja Mesjid Aktif melaksanakan kegiatan Keagamaan belum sesuai target, Pemerintah Kota Padang Panjang tetap memberikan dukungan dalam upaya menggairahkan kehidupan keagamaan, dalam bentuk dukungan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan dilingkungan mesjid maupun di tempat-tempat lainnya. Dukungan fasilitasi tersebut antara lain:

(1) Fasilitasi Pertemuan Bulanan BKMT Kota Padang Panjang sebanyak 8 kali

Fasilitasi yang diberikan berupa penyediaan snack/minum dan penceramah serta pembawa cara pada pertemuan Majelis Ta'lim Kota setiap bulannya. Pelaksanaan majelis ta'lim ini bergiliran dari masjid ke masjid setiap bulannya.

(2) Fasilitasi Kegiatan Subuh Mubarakah sebanyak 6 kali

Fasilitasi kegiatan subuh mubarakah dilaksanakan secara bergantian pada beberapa masjid dengan tujuan memberikan motivasi bagi masjid-masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Diharapkan setelah adanya fasilitasi kegiatan tersebut pada masjid tertentu, maka selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri di masjid

tersebut. Saat ini telah ada beberapa masjid yang melaksanakan kegiatan Subuh Mubarakah secara rutin dan mandiri.

(3) Pembinaan Remaja Mesjid tingkat Kota Padang Panjang sebanyak 3 kali.

Fasilitasi pembinaan remaja masjid dilaksanakan dalam bentuk wirid remaja dan peningkatan kapasitas berupa outbound bagi 60 (enam puluh) remaja masjid se Kota Padang Panjang. Upaya pembinaan dilakukan oleh BKPRMI Kota Padang Panjang. Upaya pembinaan juga menyasar kepada siswa sekolah yang aktif dalam kegiatan Rohani Islam (Rohis).

(4) Penyediaan Fasilitas Program *Smart Surau*

Fasilitas Program Smart Surau yang bekerja sama dengan ruang guru diberikan kepada mesjid yang berlokasi dekat sarana pendidikan dan memiliki pengurus mesjid aktif serta animo yang tinggi dari masyarakatnya. Sampai dengan Tahun 2024 ini fasilitas program smart surau diberikan untuk 10 (sepuluh) mesjid, yaitu Mesjid Asasi Sigando, Masjid Ashliyah Pasar Usang, Masjid Ilham Koto Panjang, Masjid Nurul, Iman Sialiang Atas, Mesjid Nurul Amri Balai-Balai, Mesjid Hidayatus Salam Koto Panjang, Mesjid Nurul Ihsan Kampung Manggis, Mesjid Jami' Nurul Huda Silaing Bawah, Mesjid Hidayah Guguk Malintang, dan Mesjid Nurul Huda Ganting.

(5) Dukungan operasional pengelolaan Mesjid Agung Manarul 'Ilmi *Islamic Centre*

(6) Pelaksanaan Wirid Korpri rutin pada minggu I dan III setiap bulannya di Mesjid Manarul 'Ilmi *Islamic Centre*.

(7) Pemberian insentif terhadap imam mesjid, garin mesjid dan mushalla serta guru TPQ/MDA

(8) Pemberian bantuan hibah untuk mesjid dan mushalla.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Adat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat**,** Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 12,799,412,700.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 12,127,442,060.00,- (94.75%) untuk melaksanakan 3 program, yaitu :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2. Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah dalam memberikan rasa aman. Pelanggaran trantibum yang dibiarkan tanpa penyelesaian, selain

menimbulkan ketidaknyamanan, juga akan berdampak pada kondisi trantibum secara keseluruhan.

Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum Kota Padang Panjang Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian pelanggaran kententeraman dan ketertiban umum untuk tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi tingkat penyelesaian adalah 100%, artinya seluruh pelanggaran kententeraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan.

Pada Tahun 2024 sebanyak 102 kasus gangguan trantibum dilaporkan oleh masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Panjang. Angka ini berkurang dibandingkan dengan Tahun 2023 yang menerima laporan gangguang trantibum sebesar 134 kasus. Kasus dan jumlah gangguan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.56
Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Bulan												Jumlah per kasus
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Gepeng / stress	2	3	3	-	3	-	3	2	2	-	-	-	**18**
2	Trantibum hisap lem/ siswa berkeliaran/ pertengkaran ringan/ dicurigai melakukan pencurian	8	14	6	-	3	3	4	15	8	15	2	6	**84**
3	Mengarah ke perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan pasal 6A huruf a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Makan/ minum pada warung/kedai/rumah makan pada siang hari di bulan Ramadhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Menjual/ mengkonsumsi/ menyimpan miras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Jumlah		10	17	9	0	6	3	7	17	10	15	2	6	**102**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, 2024

Dari Tabel diatas terlihat adanya penurunan jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang dari 134 kasus di Tahun 2023 menjadi 102 kasus pada tahun 2024. Hanya ada 2 jenis pelanggaran yang terjadi yaitu kasus gepeng/stress (18 kasus) dan pelanggaran trantibum, hisap lem, siswa berkeliaran,

pertengkaran ringan, serta dicurigai (84 kasus). Penyelesaiain masing-masing kasus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Kasus gepeng/stress diselesaikan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKBPPPA) dengan memberikan surat pengantar dan diselesaikan langsung oleh pihak Dinsos PPKBPPPA.

Sementara pelanggaran trantibum, hisap lem, siswa berkeliaran, pertengkaran ringan, serta dicurigai melakukan pencurian dengan julmlah pelanggaran sebanyak 84 kasus sepanjang Tahun 2024. Jumlah ini jauh berkurang dari Tahun 2023 sebanyak 97 kasus. Penanganan kasus ini dilakukan pembinaan oleh Polisi Pamong Praja Ahli Muda bekerja sama dengan pihak sekolah (untuk pelajar) dengan menghadirkan orang tua dan menandatangani surat pernyataan guna memberikan efek jera dan akibat buruk dari perbuatannya tersebut. Untuk pelanggaran siswa berkeliaran diberikan pembinaan oleh Polisi Pamong Praja Ahli Muda. Apabila siswa sudah berulang kali diamankan oleh anggota Satpol PP, maka pihak Satpol PP akan menyerahkan pelajar tersebut kepada pihak sekolah, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib sekolah dan tata tertib seorang pelajar.

Jumlah jenis dan kasus pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2024 cenderung menurun dibandingkan tahun 2023, seperti disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.20
Jenis dan Kasus Pelanggaran yang Terjadi Pada Tahun 2024

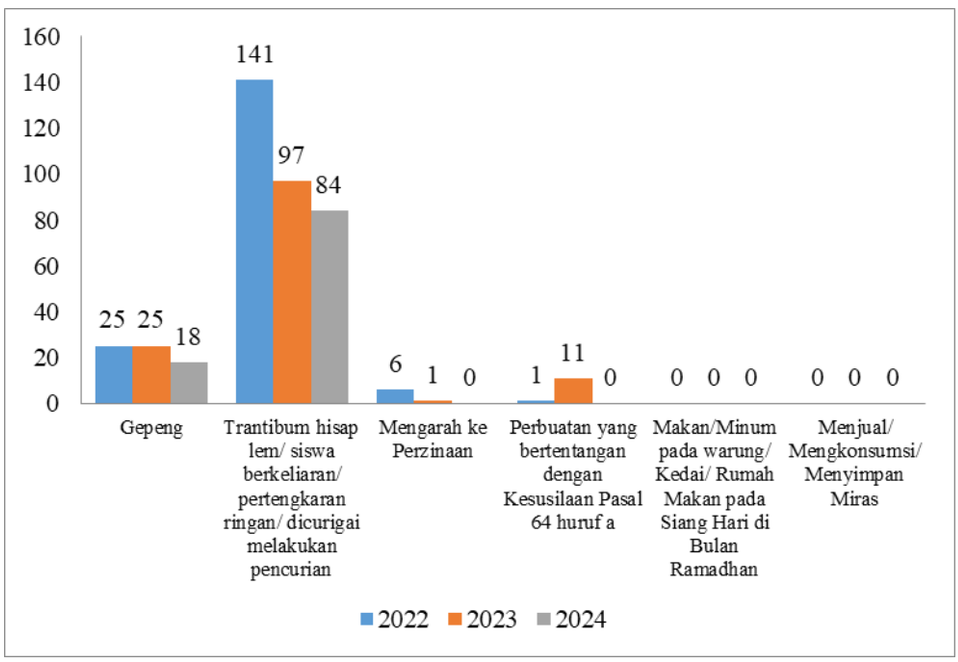

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, 2024

Kinerja Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini didukungn dengan adanya Tim Satuan Kerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang beranggotakan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta Kejaksaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 173 Tahun 2024 tentang Tim Satuan Kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Padang Panjang.

Faktor-faktor pendukung terselesaikannya seluruh kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi yang menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat agar merasa aman, tenteram dan tertib serta terhindar dari perilaku tindakan tidak bertanggung jawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Terlaksananya operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya.
3. Terlaksananya Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota.
4. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres.
5. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19,296,906,348.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 19,103,358,806.00,- (99.00 %) untuk melaksanakan 7 Program yaitu:

1. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

5. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
7. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkataan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3. Sasaran Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran strategis Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial diukur melalui indikator Angka PPKS. PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Pendataan dan pengelolaan data PPKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan.

Angka PPKS didapatkan melalui perhitungan berikut ini :

$$Angka\ PPKS = \frac{Jumlah\ PPKS}{Jumlah\ Penduduk} x100\%$$

Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Capaian Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Angka PPKS	4.20	3.69	112.14	-	-	5.85	102.91	4.77	114,21	4.30	114.19

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Angka PPKS Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 3,69 dari target yang telah ditetapkan 4,20 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 112,14%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi penurunan angka PPKS tahun 2024 sudah sangat melebihi dari target yang ditetapkan.

Capaian Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibandingkan 2 tahun terakhir (Angka PPKS pada tahun 2021 belum menjadi target kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang), mengalami sedikit penurunan sebesar 2,07 % dari capaian tahun 2023, namun jika dibandingkan dengan capaian 2022, mengalami peningkatan sebesar 9,23 %. Jika dilihat dari perbandingan realisasi, Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2024

mengalami penurunan sebesar 1,08 yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar 4,77 menjadi 3,69 pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan dua tahun terakhir, hingga Tahun 2024 Angka PPKS Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan, realisasi angka PPKS Tahun 2024 adalah merupakan realisasi penurunan angka PPKS tertinggi sejak Tahun 2022.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Angka PPKS Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 3.69 dari target RPD sebesar 4.30 dengan capaian kinerja sebesar 114,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir RPD, meskipun demikian kedepannya Kota Padang terus berupaya menurunkan Angka PPKS.

Dari 26 jenis PPKS, 12 jenis ditemukan di Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.58
PPKS di Kota Padang Panjang

No	PPKS	Jumlah
1	Anak dengan Kedisabilitas	77
2	Anak Terlantar	8
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	16
4	Korban Bencana Alam	857
5	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7
6	Lanjut Usia Terlantar	223
7	Pemulung	8
8	Pengemis	2
9	Penyandang Disabilitas	267
10	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	238
11	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	6
12	KK Miskin	632
TOTAL		2.341

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, 2024

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah 63.386 jiwa sehingga diperoleh nilai Angka PPKS sebesar 3.69%.

Jumlah PPKS pada Tahun 2024 cenderung menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2023, secara keseluruhan berkurang sebanyak 421 dari 2.762 menjadi 2.341 seperti disajikan pada grafik berikut ini:

Grafik 2.21
Tabel Perbandingan Angka PPKS

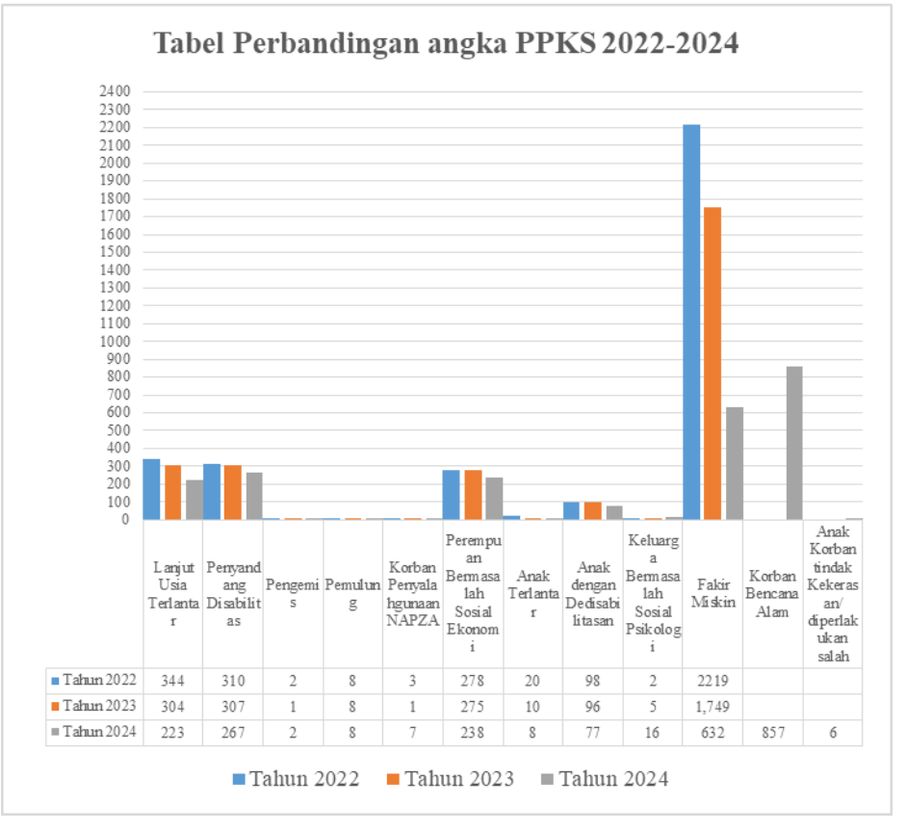

	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Disabilitas	Pengemis	Pemulung	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Perempuan Bermasalah Sosial Ekonomi	Anak Terlantar	Anak dengan Dedisabilitasan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Fakir Miskin	Korban Bencana Alam	Anak Korban tindak Kekerasan/ diperlakukan salah
Tahun 2022	344	310	2	8	3	278	20	98	2	2219		
Tahun 2023	304	307	1	8	1	275	10	96	5	1,749		
Tahun 2024	223	267	2	8	7	238	8	77	16	632	857	6

Sumber : Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, 2024

Ket : Foto Penyerahan bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinsos PPKBPPPA sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang melakukan pelayanan sosial terhadap PPKS yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

a) 77 Anak Dengan Kedisabilitasan di berikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), Bantuan Kemiskinan Ektrem, Sembako dan Sandang Disabilitas.

b) 8 Anak Terlantar diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dan Respon Kasus.

c) 16 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), Konseling dari LK3.
d) 857 Korban Bencana Alam diberikan bantuan Permakanan dan psikososial.
e) 7 Korban Penyalahgunaan Napza diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dan Konseling dari LK3.
f) 223 orang Lanjut usia terlantar diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), BTT Erupsi, Respon Kasus, Sembako dan Sandang Lansia Permakanan Lansia dan Disabilitas Tunggal.
g) 8 Pemulung diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Sembako, ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), dan Respon Kasus.
h) 2 Pengemis diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Sembako dan Sandang Lansia, Permakanan Lansia Tunggal, Konseling dari LK3.
i) 267 Penyandang Disabilitas diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Sembako, PKH (Program keluarga Harapan), ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), BTT Erupsi, Respon Kasus, Kemiskinan Ekstrem, Sembako dan Sandang Lansia, Sembako dan Sandang, Disabilitas, Permakanan Disabilitas dan Lansia Tunggal.
j) 238 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi diberikan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Sembako, PKH (Program keluarga Harapan), ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), BTT Erupsi, Bantuan Bencana Banjir Bandang
k) 6 Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah diberikan bantuan Konseling dari LK3
l) Dari 632 KK Miskin yang telah didiberikan bantuan sebanyak 551 KK dengan bantuan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Sembako, PKH (Program keluarga Harapan), ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), BTT Erupsi, bantuan Kemiskinan Ekstrem, Sembako Disabilitas dan Lansia, Sandang Disabilitas dan Lansia, Permakanan Lansia Tunggal, Bantuan Bencana Banjir Bandang, Respon Kasus. Untuk 81 KK Miskin yang belum tertangani di tahun 2024, karena data KK miskin ini terdata diakhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan sosial sudah selesai, sebagai solusinya untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di priortaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan memenuhi syarat – syarat untuk menerima bantuan sosial.

Adapun faktor-faktor pendorong menurunnya jumlah PPKS di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PPKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat dan pengembangan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas berat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan organisasi PPDI.
4. Meningkatkan produktifitas lansia melalui penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok lansia di Kota Padang Panjang
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana
6. Peningkatan kualitas penanganan dan pemberdayaan penyandang penyakit sosial
7. Peningkatan kualitas penanganan bagi anak jalanan melalui fasilitasi rumah singgah
8. Penyediaan data base kemiskinan
9. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengembangan rumah Healing.

Untuk mewujudkan sasaran menurunnya masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 3,256,907,700.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,996,679,798.00,- (92,01%) untuk melaksanakan 8 program, yaitu :

1. Pemberdayaan Sosial
2. Rehabilitasi Sosial
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Pencatatan Sipil
5. Pengelolaan Profil Kependudukan
6. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Pengendalian Penduduk
8. Pendaftaran Penduduk

5. Tujuan Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Capaian tujuan Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas diukur dengan menggunakan 2 indikator, yaitu (1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), dan (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan diukur melalui ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survey oleh masyarakat/responden. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang

menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu yang diukur melalui diukur melalui indeks komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Dari dua indikator diatas, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan indikator baru dalam RPD 2024-2026. Capaian indikator IKLI dan IKLH tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks **Kualitas/Kepuasan** Layanan Infrastruktur (IKLI)	93.20	95.50	102.47	-	-	-	-	-	-	91,76	104.08
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74.20	62.62	84.39	61.16	100	66.60	91.96	68.44	93.92	67.04	93.41

Sumber Bagian Organisasi dan Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Analisis terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Padang Panjang Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Capaian Indeks Kualitas/Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	93.20	95.50	102.47	90.96	91.76	104.08

Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 95,50. Berdasarkan angka tersebut dapat diketahui bahwa realisasi indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur lebih besar dari target tahunan yang telah ditetapkan yaitu 93,20 sehingga diperoleh capaian kinerjanya pada angka 102,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangan pada organisasi perangkat daerah yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kondisinya sudah diatas target yang ditetapkan atau sangat baik.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melalukan penghitungan IKLI sejak tahun 2019. Perkembangan nilai IKLI Kota Padang Panjang sejak Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.22
Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2019 - 2024

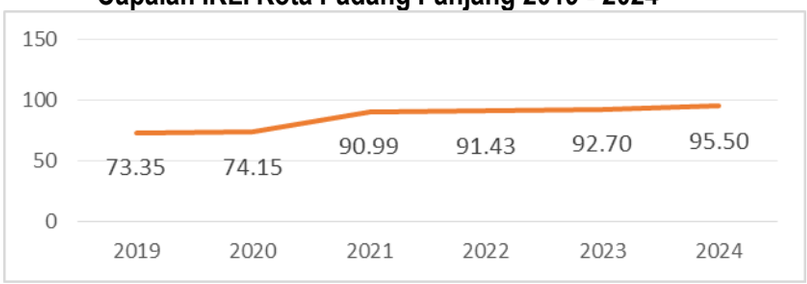

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian IKLI Kota Padang Panjang cenderung naik dari tahun ke tahun dan mencapai nilai tertinggi di tahun 2024 bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada RPD Tahun 2026 (target akhir RPD adalah 93,20 sedangkan realisasi tahun 2024 adalah 95,5 (tercapai 102,4%)

Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024, faktor yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2024 terutama disebabkan oleh meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur pekerjaan umum seperti jalan dan drainase. Disamping itu, jumlah layanan IKLI yang diukur tahun 2024 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya (Pada tahun 2023 layanan IKLI diukur untuk 5 perangkat daerah (PUPR, Perkim LH, Perhubungan, Kominfo, Perdagkop) sedangkan pada tahun 2024 layanan IKLI hanya diukur untuk 3 perangkat daerah (PUPR, Perkim LH dan Perhubungan), menyesuaikan dengan indikator sasaran pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Capaian Indeks Kualitas/Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

INDIKATOR KINERJA	2024			2021		2022		2023		RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	REALISAS	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74.20	62.62	84.39	61.16	100	66.60	91.96	68.44	93.92	67.04	93.41

Sumber Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang pada tahun 2024 adalah 62,62 sementara target yang telah ditetapkan 74,20 sehingga capaian kinerjanya 84,39%. Terkait perbedaan yang signifikan antara target RPD dengan Target Tahun 2024 dapat kami jelaskan bahwa penetapan target RPD merujuk pada metode perhitungan lama yang digunakan oleh Kementerian tahun 2021. Pada tahun 2024 Kementerian LHK mengeluarkan angka target IKLH untuk seluruh Kabupaten Kota melalui

Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang di kertas kerjanya sudah mencantumkan angka konversi untuk capaian IKLH Tahun 2023. Untuk itu, pada perubahan RKPD Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan penyesuaian target yang sudah merujuk pada angka konversi capaian IKLH Tahun 2023 yang disampaikan oleh Kementerian LHK.

Tabel 2.62
Target konversi capaian IKLH Tahun 2023

PROYEKSI TARGET IKLH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045

PROYEKSI TARGET IKLH 2025 - 2045 TELAH MEMBERLAKUKAN:

A. IKU: PENAMBAHAN PARAMETER PM 2.5 SEHINGGA NILAI PROYEKSI IKU MEMILIKI KECENDERUNGAN PENURUNAN (TERUTAMA

B. IKA: PERUBAHAN METODE PERHITUNGAN MENJADI METODE IKA-INA (SKALA MAKS. 100, BUKAN BERDASARKAN INDEKS PENCEMAR DIBANDINGKAN DENGAN KELAS SUNGAI)

C. IKL: 23 KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DIMASUKKAN DALAM PERHITUNGAN IKL (SEBELUMNYA HANYA 9) DAN MEMASUKKAN EKOSISTEM GAMBUT (EKEG) BAGI KAB/KOTA DENGAN EKOSISTEM GAMBU

DITJEN PPKL AKAN MELAKUKAN SOSIALISASI PROYEKSI TARGET IKLH TAHUN 2025 - 2045 BESERTA METODE PERHITUNGANNYA LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI DIREKTORAT LINGKUP PP

Nomor Urut	Kab/Kota	Provinsi	Regional	Gambut/Non Gambut	CAPAIAN 2023 (RUMUS LAMA)				CAPAIAN 2023 (KONVERSI RUMUS BARU)			
					IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
1	Kabupaten Aceh Barat	Nanggroe Aceh	Sumatera	Gambut	73.93	90.66	62.5	62.61	81.94	84.61	79.86	80.55
66	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	75.71	89.96	59.41	77.34	78.24	77.42	74.65	85.90
67	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	75.20	91.42	59.6	71.99	78.54	78.34	75.73	83.72
68	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	71.98	89.74	60.87	58.26	75.73	77.44	76.66	70.96
69	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	52.69	88.12	23.85	36.69	64.85	76.82	64.45	43.38
70	Kota Padang	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	72.28	74.11	69.77	73.2	76.94	72.57	79.69	80.30
71	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	68.44	91.6	47.21	62.04	73.99	78.08	72.27	69.38
72	Kota Pariaman	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	56.80	93.7	31.67	31.71	69.55	78.62	69.70	52.50
73	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	59.50	90.92	44.21	27.63	67.95	77.55	66.55	52.59
74	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	Sumatera	Non Gambut	63.10	89.8	48.89	38.12	71.48	77.69	71.25	60.40

IKLH Kab Kota | IKLH Provinsi dan Nasional | Sheet1

Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Dengan adanya perbedaan metode perhitungan ini, maka target akhir yang ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menempati posisi ke- 14 . Capaian ini lebih rendah dibanding Nilai IKLH Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 74.76 dan lebih rendah dibanding Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional yang mencapai 73,57 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

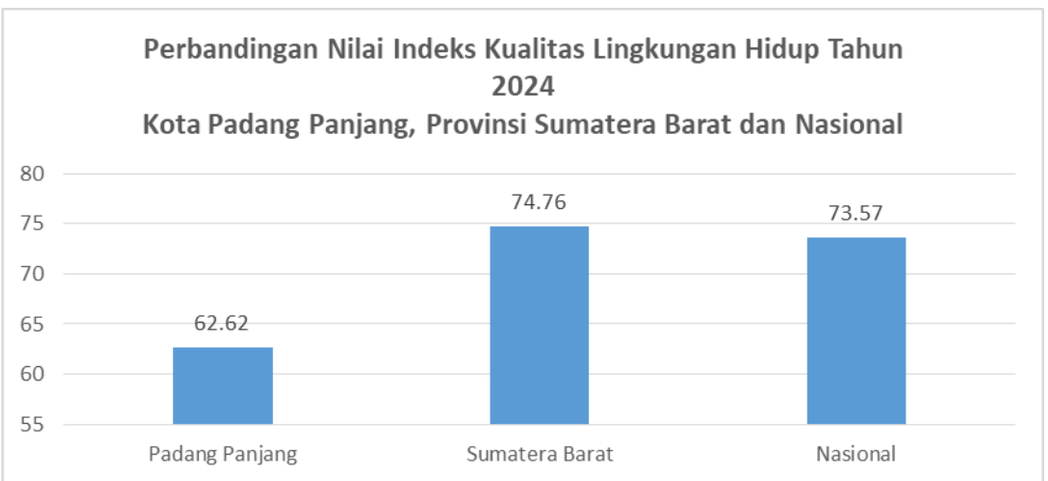

Sumber: Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, 2024

Pada dasarnya perbandingan capaian IKLH Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan capaian Provinsi dan Nasional merupakan hal yang tidak sepadan karena menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Namun poin penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah bahwa capaian IKLH Kota Padang Panjang tahun 2024 pada angka 62,62 lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yang mencapai 68,44.

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: (1) Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, (2) Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang, dan (3) Meningkatnya Kualitas Udara dan Tutupan Lahan. Analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

   Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) meliputi ketersediaan fasilitas, kondisi fasilitas, kemanfaatan dari fasilitas layanan infrastruktur yang dipergunakan oleh masyarakat yang diukur melalui isian kuesioner survey oleh masyarakat/responden. IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2024-2024 diperoleh dari 3 komponen layanan infrastruktur, yaitu IKLI kePUan, IKLI Perkim dan IKLI Perhubungan. Tiga inidikator ini merupakan indikator baru dalam RPD 2024-2026. IKLI kePUan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur ke PU an diukur melaui layanan infrastruktur jalan, trotoar dan drainase. IKLI Perkim merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Dinas Perkim LH yang diukur melalui layanan sarana pembuangan sampah, jalan lingkungan, drainase lingkungan dan ruang terbuka hijau. IKLI Perhubungan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur perhubungan yang diukur melalui layanan sarana rambu lalu lintas, marka jalan, traffict light, petugas perhubungan, lampu penerangan jalan dan sarana parkir. Capaian IKLI kePUan, IKLI Perkim dan IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Capaian Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1. IKLI KePUan	96.81	96.71	99.90	89.66	90.46	106.91
2. IKLI Perkim	98.56	94.56	95.94	96.80	96.95	97.53
3. IKLI Perhubungan	98.00	95.22	97.16	96.62	96.90	98.27

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Secara umum terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada masing-masing indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan walaupun terdapat indikator

yang nilainya meningkat. Penjabaran lebih lanjut terkait masing-masing indikator kinerja tersebut disajikan sebagai berikut:

(a) IKLI KePUan

Tabel 2.64
Capaian IKLI kePUan

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
IKLI KePUan	96.81	96.71	99.90	89.66	90.46	106.91

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

IKLI KePUan Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 96,71 dari target 96,81 sebagai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99,71%. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang ditetapkan dan dilaksanakan survei mampu memberikan kepuasan terhadap penggunanya. Artinya dengan sedikit upaya lagi tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian IKLI KePUan Tahun 2024 yaitu :

1. Masih banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan (*on street*) terutama pada Area pasar kuliner
2. Terdapat beberapa area trotoar yang berlumut dan keramiknya pecah, sehingga licin dan beresiko bagi pengguna.
3. Tidak semua area memiliki trotoar untuk disabilitas

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian IKLI diantaranya berupa:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintas pada moment-moment tertentu.
2. Dilaksanakannya pemeliharan rutin/berkala trotoar dalam kota
3. Melaksanakan pembangunan/rehab trotoar ramah disabilitasi Jl. RPH dan Jl. Urip Sumoharjo

Nilai IKLI KePUan Kota Padang Panjang tahun 2024 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.65
IKLI KePUan Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan jalan arteri/beraspal (Unsur ke-1)	398	3,980	0,306
2	Kondisi jalan arteri/beraspal (Unsur ke-2)	384	3,840	0,296
3	Kemanfaatan jalan arteri/beraspal (Unsur ke-3)	392	3,920	0,302
4	Kesesuaian pemanfaatan jalan arteri/beraspal (Unsur ke-4)	365	3,650	0,281
5	Ketersediaan trotoar pada sisi kiri dan kanan jalan disepanjang jalan (Unsur ke-5)	384	3,840	0,296
6	Kondisi trotoar pada sisi kiri dan kanan jalan disepanjang jalan (Unsur ke-6)	379	3,790	0,292
7	Kemanfaatan trotoar pada sisi kiri dan kanan jalan disepanjang jalan (Unsur ke-7)	385	3,850	0,296
8	Kenyamanan penggunaan trotoar disepanjang jalan (Unsur ke-8)	377	3,770	0,290
9	Ketersediaan trotoar jalan bagi penyandang disabilitas (Unsur ke-9)	364	3,640	0,280
10	Ketersediaan drainase (Unsur ke-10)	399	3,990	0,307
11	Kondisi drainase (Unsur ke-11)	399	3,990	0,307
12	Kemanfaatan drainase (Unsur ke-12)	399	3,990	0,307
13	Kesesuaian pemanfaatan drainase (Unsur ke-13)	399	3,990	0,307
	Total	**5024**	**50,240**	**3,868**
	Total Nilai Konversi (NIK)	**3,868**		
	Total Nilai Konversi (NIK) x 25	**96,71**		
	Mutu Pelayanan	**A**		
	Kinerja Pelayanan	**Sangat Baik**		

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024

b) IKLI Perkim

Tabel 2.66
Capaian IKLI Perkim

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPJ (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
IKLI Perkim	98.56	94.56	95.94	96.80	96.95	97.53

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

IKLI Perkim Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 94.56, sedangkan target yang ditetapkan adalah 98.56 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 95.94%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang diselenggarakan oleh Dinas PerkimLH dan perlu dilaksanakan upaya lanjutan agar kepuasan masyarakat tercapai secara maksimal.

IKLI Perkim merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, terjadi penurunan sebesar 2,24 poin dari 96,80 menjadi 94,56.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, dengan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 94.56 dengan artinya dengan capaian hanya 95,94% dari target 96,95%. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang signifikan.

Faktor-faktor penghambat pencapaian IKLI Perkim Tahun 2024 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat antara lain adalah:

1. Terjadinya alih fungsi jalur hijau hijau kota untuk penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan pengabungan area pembibitan tanaman.
2. Masih terbatasnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang dapat dimanfaatkan warga Kota Padang Panjang.
3. Masih adanya fasilitas taman seperti kursi yang rusak yang diabaikan dengan berlarut-larut.
4. Terdapatnya taman yang beralih fungsi menjadi kafe, meskipun sebetulnya taman-taman tertentu bukan merupakan taman yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kota Padang Panjang.

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian IKLI Perkim diantaranya berupa:

1. Menambah penanaman pohon di lokasi berbeda seperti sekolah, perkantoran, areal permukiman.
2. Menyeleksi setiap permintaan penebangan pohon agar tetap mempertahankan pohon dan hanya memangkas bagian yang dianggap mengganggu.
3. Melakukan pemeliharaan rutin taman sesuai anggaran yang tersedia
4. Menambah alat permainan edukatif dan permainan tradisional pada beberapa taman

Nilai IKLI Perkim Kota Padang Panjang tahun 2024 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.67
IKLI Perkim Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan fisik tempat pembuangan sampah (Unsur ke-1)	377	3,770	0,222
2	Kondisi fisik tempat pembuangan sampah (Unsur ke-2)	374	3,740	0,221
3	Pemanfaatan tempat pembuangan sampah (Unsur ke-3)	388	3,880	0,229
4	Kesesuaian lokasi tempat pembuangan sampah (Unsur ke-4)	385	3,850	0,227
5	Ketersediaan jalan lingkungan (Unsur ke-5)	387	3,870	0,228
6	Kondisi jalan lingkungan (Unsur ke-6)	389	3,890	0,230
7	Pemanfaatan jalan lingkungan (Unsur ke-7)	389	3,890	0,230
8	Kesesuaian pemanfaatan jalan lingkungan (Unsur ke-8)	389	3,890	0,230
9	Ketersediaan draenase jalan lingkungan/kawasan permukiman (Unsur ke-9)	378	3,780	0,223
10	Kondisi draenase jalan lingkungan/kawasan permukiman (Unsur ke-10)	372	3,720	0,219
11	Pemanfaatan draenase jalan lingkungan/kawasan permukiman (Unsur ke-11)	385	3,850	0,227
12	Kesesuaian pemanfaatan draenase jalan lingkungan/kawasan permukiman (Unsur ke-12)	378	3,780	0,223
13	Ketersediaan ruang hijau publik (Unsur ke-13)	361	3,610	0,213
14	Kondisi ruang hijau publik (Unsur ke-14)	368	3,680	0,217
15	Kemanfaatan ruang hijau publik (Unsur ke-15)	371	3,710	0,219
16	Kesesuaian pemanfaatan ruang hijau publik (Unsur ke-16)	368	3,680	0,217
17	Ketersediaan sarana pada ruang hijau publik bagi penyandang disabilitas (Unsur ke-17)	352	3,520	0,208
	Total	**6411**	**64,110**	**3,782**
	Total Nilai Konversi (NIK)	**3,782**		
	Total Nilai Konversi (NIK) x 25	**94,56**		
	Mutu Pelayanan	**A**		
	Kinerja Pelayanan	**Sangat Baik**		

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

c) IKLI Perhubungan

Tabel 2.68
Capaian Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
IKLI Perhubungan	98.00	95.22	97.16	96.62	96.90	98.27

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

IKLI Pehubungan Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 95,22 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,00 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 97,16%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan perlu dilaksanakan upaya lanjutan agar kepuasan masyarakat tercapai secara maksimal.

IKLI Perhubungan merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, terjadi penurunan sebesar 1,40 poin dari 96,62 menjadi 95,22.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 95,22 dengan capaian 97.16% dari target 98.00. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang signifikan.

Faktor-faktor penghambat pencapaian IKLI Perhubungan Tahun 2024 berdasarkan pendapat responden antara lain adalah:

1. Terdapat beberapa titik traffic light yang tidak berfungsi seperti : di area Ekor Lubuk, Area Pasar Usang dekat Thawalib, dan area SMP 1 Padang Panjang.
2. Petugas Dishub tidak selalu ada ditempat, hanya ada pada jam padat saja pada pagi hari dan sore hari jam pulang kerja
3. Kemampuan petugas mengatur lalu lintas pada jam padat masih masih belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan.
4. Masih adanya budaya masyarakat yang tidak teratur seperti berkendara sesuka hati dan tidak mendengarkan arahan petugas lalu lintas
5. Lahan parkir yang belum mencukupi terutama lahan parkir untuk Bus Pariwisata di pasar kuliner.

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian target IKLI perhubungan antara lain adalah:

1. Mengajukan proposal ke Kementerian Perhubungan terkait penambahan fasilitas traffict light mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas keselamatan lalu lintas yang ada.
2. Melaksanakan bimtek pengembangan sumber daya manusianya dalam rangka memberikan pembekalan bagi petugas dalam mengatur lalu lintas.
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Satpol PP Damkar dan kepolisian terkait ketertiban berlalu lintas melalui forum lalu lintas.
4. Melakukan koordinasi dengan pemilik lahan disekitar kuliner dalam penyediaan lahan parkir serta pengaturan jam parkir dilokasi kuliner

Nilai IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2024 berdasarkan komponen penyusunnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2.69
IKLI Perhubungan Kota Padang Panjang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Ketersediaan rambu lalu lintas (Unsur ke-1)	388	3,880	0,185
2	Kondisi rambu lalu lintas (Unsur ke-2)	376	3,760	0,179
3	Manfaat rambu lalu lintas (Unsur ke-3)	400	4,000	0,190
4	Ketersediaan marka jalan (Unsur ke-4)	394	3,940	0,188
5	Kondisi marka jalan (Unsur ke-5)	381	3,810	0,181
6	Manfaat marka jalan (Unsur ke-6)	400	4,000	0,190
7	Ketersediaan Traffic Light (Unsur ke-7)	373	3,730	0,178
8	Kondisi Traffic Light (Unsur ke-8)	362	3,620	0,172
9	Manfaat Traffic Light (Unsur ke-9)	400	4,000	0,190
10	Perlunya Traffic Light ber-CCTV (Unsur ke-10)	400	4,000	0,190
11	Manfaat Traffic Light ber-CCTV (Unsur ke-11)	400	4,000	0,190
12	Keberadaan petugas dishub dalam membantu masyarakat pada jam padat aktifitas public (Unsur ke-12)	336	3,360	0,160
13	Kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik (Unsur ke-13)	332	3,320	0,158
14	Ketersediaan lampu penerangan jalan (Unsur ke-14)	380	3,800	0,181
15	Kondisi lampu penerang jalan (Unsur ke-15)	371	3,710	0,177
16	Manfaat lampu penerangan jalan (Unsur ke-16)	400	4,000	0,190
17	Ketersediaan fasilitas parkir (Unsur ke-17)	362	3,620	0,172
18	Manfaat fasilitas parkir (Unsur ke-18)	399	3,990	0,190
19	Keberadaan petugas parkir (Unsur ke-19)	393	3,930	0,187
20	Fungsi petugas parkir (Unsur ke-20)	368	3,680	0,175
21	Biaya retribusi parkir yang harus dibayar (Unsur ke-21)	387	3,870	0,184
	Total	**8002**	**80,020**	**3,809**
	Total Nilai Konversi (NIK)	**3,809**		
	Total Nilai Konversi (NIK) x 25	**95,22**		
	Mutu Pelayanan	**A**		
	Kinerja Pelayanan	**Sangat Baik**		

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024

Dalam upaya mencapai target Terbangunnya Inftrastruktur layanan dasar Perkotaan yang Berkualitas telah dialokasikan dana sebesar Rp. 25,819,168,182.00 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 24,860,417,618.46 ,- (96,29%) pada Dinas PUPR, Dinas Perkim LH dan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan 10 program, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Sasaran Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang

Sasaran Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang diukur melalui indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, indikator ini merupakan indikator baru dalam RPD 2024-2026. Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah rata-rata dari prosentase keterlaksanaan indikasi program struktur ruang dan pola ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang. Semakin tinggi persentase keterlaksanaan indikasi program tata ruang maka diasumsikan konsistensi/ kesesuaian pemanfaatan ruang juga meningkat. Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83	83	100	82	84	98.81

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang, 2024, diolah

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 83% (sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilihat dari keterlaksanaan indikasi program struktur dan pola ruang sudah terlaksana dengan cukup baik.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD, telah terjadi kenaikan sebesar 1% poin dari 82% menjadi 83%.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 84% dengan capaian 83% memiliki capaian kinerja sebesar 98,81%. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang perlu ditingkatkan.

Dari data prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun prosentase kesesuaian tata ruang menunjukkan peningkatan. Namun jika

dilihat dari data Propinsi Sumatera Barat , indeks kesesuaian penataan ruang Kota Padang Panjang masih dibawah Provinsi, sebagaimana data dibawah ini :

Tabel 2.71
Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Propinsi Sumatera Barat

No	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2022	2023	2024
1	Kota Padang Panjang	81%	82%	83%
2	Provinsi Sumatera Barat	86%	87,75%	89,52%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Faktor-faktor pendukung pencapaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan nasional yang mensyaratkan sinkronisasi program kegiatan terkait tata ruang dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan semakin meningkatkan perhatian pemerintah daerah dalam mengimplementasikan indikasi program/kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
2. Pengembangan sistem informasi penataan ruang berbasis web (Simtaru: simtaru.padangpanjang.go.id) yang telah dilakukan sejak tahun 2022 memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Padang Panjang untuk mendapatkan akses informasi terkait tata ruang. Melalui aplikasi simtaru masyarakat dapat dengan mudah mengetahui lokasi yang bisa/tidak bisa dibangun tanpa harus berkunjung ke OPD terkait.
3. Menjalin kerjasama pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak kelurahan dan instansi vertical lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Padang Panjang tahun 2024 antara lain adalah:

1. Melaksanakan sinkronisasi antara indikasi program tata ruang dengan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.
2. Melaksanakan sosialisasi kesesuaian ruang melalui pemanfaatan Sistem Informasi Penataan Ruang di dua Kecamatan.
3. Melengkapi fitur pengaduan masyarakat pada aplikasi simtaru sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dilaporkan dengan mudah
4. Melaksanakan pengawasan gabungan pemanfaatan ruang dengan melibatkan Satpol PP dan kepolisian.

Dalam upaya mencapai sasaran Konsistensi Penataan Ruang telah dialokasikan dana sebesar Rp. 978,451,400.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 894,051,320.00,- (91.37%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan 2 program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Program Penataan Bangunan Gedung

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan diukur melalui 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan. Tiga Indikator ini merupakan indikator baru dalam RPD 2024-2026. Capaian Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Padang Panjang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Capaian Persentase Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Padang Panjang

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1. Indeks Kualitas Air	72.47	34.65	47.81	46.07	47.25	73.33
2. Indeks Kualitas Udara	78.38	89.08	113.65	91.29	90.15	98.81
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.45	61.70	88.84	56.18	58	106.38

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Terkait perbedaan yang signifikan antara target RPD dengan Target Tahun 2024 terjadi akibat perbedaan metode perhitungan sebagaimana dibahas di capaian IKLH.

(a) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penentuan nilai IKA ini didapat dari hasil perhitungan terhadap kualitas 5 sungai di Kota Padang Panjang yang sebelumnya telah diuji masing-masing sampelnya di laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi. Perhitungan IKA ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Air disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Capaian Indeks Kualitas Air di Kota Padang Panjang

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
1. Indeks Kualitas Air	72.47	34.65	47.81	46.07	47.25	73.33

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 34.65 dari target yang telah ditetapkan 72.47 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 47.81%. Rendahnya persentase capaian ini diakibatkan penentuan angka target dilakukan berdasarkan arahan SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor 129 tahun 2024, dimana terdapat perubahan cara perhitungan Indeks Kualitas Air yang merupakan pengembangan dari formulasi sebelumnya. Sedangkan perhitungan realisasi dilakukan masih menggunakan formula

lama yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Air merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD tahun 2022, telah terjadi penurunan kualitas air dari angka 46.07 menjadi 34.65. Capaian ini juga lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 dimana capaian IKA 2023 mencapai 47.21. Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, target Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang Tahun 2024 tercapai sebesar 73,33%. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya yang signifikan.untuk meningkatkan indeks kualitas air di Kota Padang Panjang.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang Tahun 2024 menempati posisi ke-19 dengan Indeks Kualitas Air sebesar 34,65, nilai ini dibawah Bukittinggi dengan nilai IKA 37, sedangkan Kabupaten/Kota yang tertinggi nilai IKA nya di Sumatera Barat adalah Pesisir Selatan dengan nilai IKA 69,64. Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang masih berada dibawah capaian IKA provinsi Sumatera Barat yaitu 53,16, (lebih rendah 18,51 poin). Nilai IKA Padang Panjang juga berada dibawah nilai IKA Nasional (lebih rendah 20,11 poin) sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.24
Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024

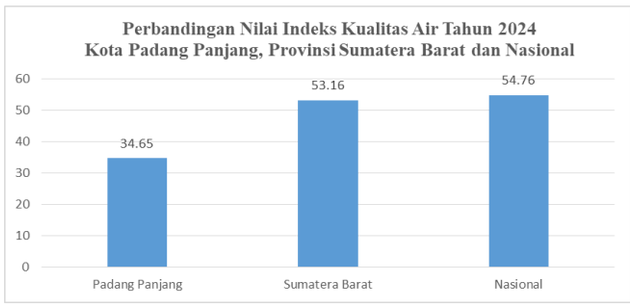

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Faktor-faktor penghambat pencapaian Indeks Kualitas Air Tahun 2024 adalah:

1. Posisi sungai - sungai Kota Padang Panjang yang secara geografis merupakan bagian dari rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar yang kondisinya sudah tercemar saat memasuki wilayah Kota Padang Panjang. Permasalahan/pencemaran yang terjadi di bagian hulu tidak bisa diinvensi langsung oleh Pemerintah Kota Padang Panjang mengingat lokasi dimaksud tidak berada di wilayah administrasi Kota Padang Panjang.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik

khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang

3. Terjadinya bencana erupsi gunung merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai IKA ini antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten tetangga untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan antar Kabupaten Kota
2. Melaksanakan program peningkatan kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang dalam pengelolaan limbah domestik khususnya tinja sebelum dibuang ke badan air.
3. Melakukan pembangunan jamban sehat/tanki septik individual bagi masyarakat yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

(b) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penentuan IKU dilakukan melalui pengambilan sampel udara ambien pada 4 lokasi yang mewakili pemukiman, jalan raya, industri, dan perkantoran, dan dihitung dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Udara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Capaian IKU Perhitungan Lama dan Baru

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
Indeks Kualitas Udara (metode perhitungan konversi)	78.38	89.08	113.65	91.29	90.15	98.81
Indeks Kualitas Udara (Metode Perhitungan Lama)	90.05	89.08	98.92	91.29	90.15	98.81

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 89,08 dari target yang telah ditetapkan 78,38 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 113,65%. Penentuan angka target dilakukan berdasarkan arahan SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor 129 tahun 2024, dimana terdapat perubahan cara perhitungan Indeks Kualitas Udara yang merupakan pengembangan dari formulasi sebelumnya. Sedangkan perhitungan realisasi dilakukan Kemen LHK masih menggunakan formula lama yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan yang cukup besar antara realisasi dengan target.

Indeks Kualitas Udara merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD Tahun 2022, IKU Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,21 poin (dari 91,29 menjadi 89,08) . Capaian ini juga lebih rendah dibanding capaian 2023 yang mencapai 91,6.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang Tahun 2024 tercapai sebesar 98,81% (target 90,15, realisasi 89,08). Hal ini berarti bahwa untuk mencapai target akhir RPD masih diperlukan upaya tambahan.

Apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang Tahun 2024 menempati posisi ke-17 dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 89,08. Nilai ini berada diatas Kota Padang dengan nilai IKU 87,8. Kabupaten/Kota yang mencapai nilai IKU tertinggi di Sumatera Barat adalah Kabupaten Agam (94,8). Capaian Indeks Kualitas Udara Kota Padang Panjang masih berada dibawah capaian IKU Provinsi Sumatera Barat (92,27 atau lebih rendah 3,19 poin). Nilai IKU Padang Panjang juga berada dibawah nilai IKU Nasional sebesar 1,09 poin. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.25
Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024

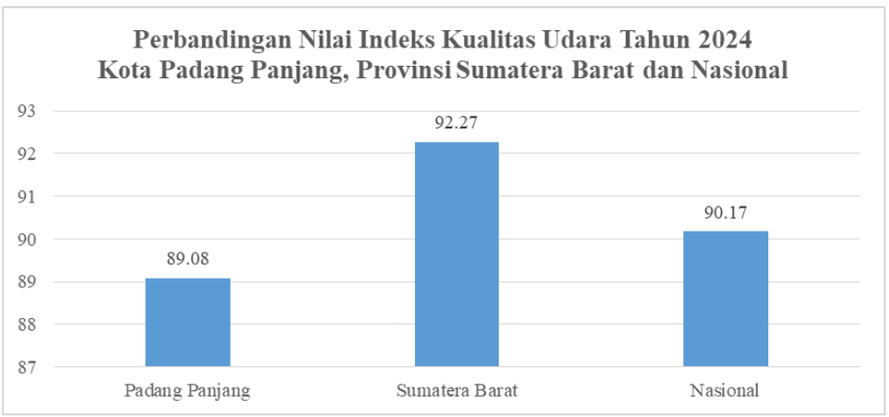

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Faktor-faktor penghambat pencapaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 yaitu:

1. Terjadinya erupsi Gunung Marapi dalam periode waktu yang lama di tahun 2024
2. Posisi Padang Panjang yang berada di jalur perlintasan utama Padang-Pekanbaru menyebabkan tingginya emisi gas buat dari kendaraan yang melewati Kota Padang Panjang

3. Kondisi Padang Panjang yang memiliki kontur berbukit dan dikelilingi pegunungan menyebabkan sirkulasi udara terhambat pada kondisi tertentu sehingga polutan lebih lama berada di udara.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai IKU ini antara lain:

1. Peningkatan kualitas udara melalui penghijauan
2. Pengendalian emisi kendaraan bermotor melalui uji emisi berkala kendaraan bermotor

(c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, karena di Kota Padang Panjang tidak terdapat Ekosistem Gambut maka yang diukur hanya Tutupan Lahan. Pengukuran IKTL dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara terhadap lokasi kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

Analisa capaian Indeks KualitasTutupan Lahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Capaian IKTL Perhitungan Lama dan Baru

INDIKATOR KINERJA	2024			Baseline RPD (2022)	RPD 2024-2026	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Metode perhitungan konversi)	69.45	61.70	88.84	56.18	58	106.38
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Metode perhitungan lama	57	61.70	108.2	56.18	58	106.38

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 61,7 dari target yang telah ditetapkan 69,45 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 88,84%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target IKTL pada tahun 2024. Tidak tercapainya persentase capaian ini diakibatkan penentuan angka target dilakukan berdasarkan arahan SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor 129 tahun 2024, dimana terdapat perubahan cara perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang merupakan pengembangan dari formulasi sebelumnya. Sedangkan perhitungan realisasi dilakukan Kemen LHK masih menggunakan formula lama yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, hal tersebut mengakibatkan perbedaan antara realisasi dengan target.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan indikator baru yang muncul pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline RPD Tahun 2022, Nilai IKTL Kota Padang Panjang mengalami peningkatan sebesar

5,52 poin (dari 56,18 menjadi 61,70) namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang berada pada angka 62,04.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang Tahun 2024 tercapai sebesar 106,38% (realisasi 61,70 dari target 58). Hal ini berarti bahwa target akhir RPD telah tercapai.

Apabila Kota Padang Panjang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat, Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang menempati posisi ke-9 dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 61,7. Nilai ini berada diatas capaian Kabupaten Tanah Datar dengan nilai IKTL 58,59. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IKTL tertinggi di Sumatera Barat adalah Kabupaten Mentawai dengan nilai IKTL 94,45. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang masih berada dibawah capaian IKTL Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 66,62 (lebih rendah 4,92 poin) dan lebih rendah dibanding nilai IKTL Nasional (sebesar 0,55 poin). Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.26
Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2024

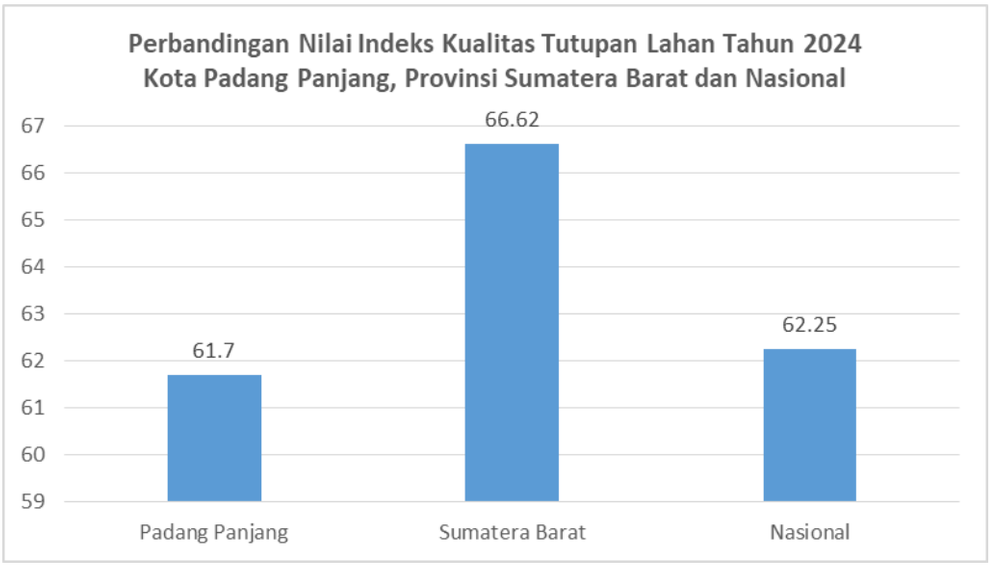

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Jika dibandingkan dengan metode perhitungan lama (sebelum konversi), angka IKTL Kota Padang Panjang sudah mencapai target. Namun capaian ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 serta capaian Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional.

Faktor-faktor penghambat pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024 adalah:

1. Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah yang relatif kecil (23 km²) dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Dengan wilayah yang sempit, ruang untuk tutupan lahan hijau seperti hutan kota dan area resapan air menjadi lebih terbatas.
2. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kota menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman, industri, dan infrastruktur.Sebagai kota perdagangan dan persinggahan di jalur lintas Sumatera, sebagian besar wilayah telah menjadi kawasan terbangun (permukiman dan fasilitas umum)

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai IKU ini antara lain adalah memberikan stimulasi gerakan penghijauan kepada masyarakat melalui:

1. Pemberian bantuan 200 bibit pohon pelindung ke RT-RT yang ada di Kota Padang Panjang
2. Pemberian bantuan 900 bibit pohon pelindung ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di Kota Padang Panjang
3. Gerakan menanam pohon bagi siswa SLTA sekaligus pemberian bantuan 150 bibit pohon pelindung ke perumahan
4. Pemberian 150 bibit pohon pelindung pada cara Jalan sehat di Kelurahan Sigando
5. Penamanan 200 bibit pohon pelindung di kawasan Sport Center Kota Padang Panjang

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Tutupan Lahan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 15,972,561,604.00 - dengan realisasi sebesar Rp. 12,634,280,642.00 - (79,10%) untuk melaksanakan 13 program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Penanggulangan Bencana
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)
9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

12.Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Realisasi Anggaran

Untuk mendukung seluruh sasaran kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang telah diperjanjikan melalui 15 sasaran strategis Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasi anggaran sebesar Rp.300.758.402.054,00 untuk menyelenggarakan 106 program. Anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 270.111.946.071,00 (89,81%). Pada Desember 2024 dilaksanakan kebijakan refocusing/pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa program yang mengalami perubahan anggaran dari dokumen Perjanjian Kinerja. Dan sebanyak 3 program tidak jadi dilaksanakan dari Perjanjian Kinerja yang semula sebanyak 109 program. Secara rinci seperti ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.76
Realisasi Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja per Program Tahun 2024

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
S1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Pengelolaan Pendidikan	43,515,715,579.00	38,757,596,046.00	**89.07%**
		2	Pembinaan Perpustakaan	573,906,800.00	477,811,271.00	**83.26%**
			Subtotal	**56,522,969,079.00**	**51,004,840,382.00**	**90.24%**
S2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32,263,597,162.00	22,236,868,526.13	**68.92%**
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,090,900,150.00	921,366,912.00	**84.46%**
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	422,198,200.00	364,269,500.00	**86.28%**
		4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	307,086,580.00	303,077,070.00	**98.69%**
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	377,962,100.00	347,799,550.00	**92.02%**
			Subtotal	**34,461,744,192.00**	**24,173,381,558.13**	**70.15%**
S3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	171,273,750.00	161,100,162.00	**94.06%**
		2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	157,368,600.00	141,884,885.00	**90.16%**
		3	Program Perlindungan Perempuan	367,468,450.00	262,779,926.00	**71.51%**
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	453,150,400.00	257,745,387.00	**56.88%**
		5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,069,680,000.00	1,018,190,811.00	**95.19%**
		6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1,482,074,000.00	1,171,056,159.00	**79.01%**
			Subtotal	**3,701,015,200.00**	**3,012,757,330.00**	**81.40%**
S4.	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	1	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150,000,000.00	107,840,507.00	**71.89%**
		2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	174,913,600.00	169,109,584.00	**96.68%**
		3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25,721,092,266.00	23,075,137,559.00	**89.71%**

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
			Subtotal	**26,046,005,866.00**	**23,352,087,650.00**	**89.66%**
S5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28,093,102,840.00	27,194,446,948.00	96.80%
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6,957,156,550.00	6,572,070,520.00	94.46%
		3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	21,610,023,500.00	19,705,224,037.00	91.19%
		4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	419,184,752.00	395,448,701.00	94.34%
		5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	82,814,700.00	77,961,250.00	94.14%
		6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	84,367,900.00	80,193,035.00	95.05%
		7	Program Pengelolaan Arsip	137,979,250.00	133,664,305.00	96.87%
		8	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	90,468,500.00	89,231,130.00	98.63%
		9	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	159,645,000.00	112,823,300.00	70.67%
		10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	791,044,400.00	736,151,850.00	93.06%
		11	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10,960,000.00	9,825,250.00	89.65%
		12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	508,375,300.00	467,693,100.00	92.00%
		13	Program Kepegawaian Daerah	602,013,800.00	567,475,312.00	94.26%
		14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,241,221,200.00	1,132,561,036.00	91.25%
		15	Program Penyelenggaraan Pengawasan	522,769,000.00	516,038,800.00	98.71%
		16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	159,682,000.00	138,759,595.00	86.90%
		17	Program Perekonomian Dan Pembangunan	494,880,950.00	451,035,944.00	91.14%
		18	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,398,239,200.00	2,063,195,688.00	86.03%
		19	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,846,011,000.00	1,826,694,501.00	98.95%
		20	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7,068,000.00	6,088,750.00	86.15%
		21	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.797.754.300.00	7.638.436.955.00	94.46%
			Subtotal	**74.014.762.142,00**	**69.915.020.007,00**	**94,46**
S6.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,624,419,650.00	5,391,961,975.00	**95.87%**
		2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	461,611,000.00	437,824,507.00	**94.85%**
		3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,779,687,320.00	2,752,954,973.00	**99.04%**
		4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	113,154,300.00	109,429,025.00	**96.71%**
		5	Program Penyuluhan Pertanian	322,955,060.00	297,117,243.00	**92.00%**
		6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	9,189,900.00	9,070,975.00	**98.71%**
		7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	552,350,000.00	531,452,349.00	**96.22%**
		8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	364,530,100.00	353,873,161.00	**97.08%**
		9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,357,221,600.00	1,333,764,732.00	**98.27%**

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		10	Program Pemasaran Pariwisata	175,360,500.00	173,355,500.00	**98.86%**
		11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	103,177,000.00	92,704,500.00	**89.85%**
		12	Program Hubungan Industrial	716,301,600.00	716,301,600.00	**100.00%**
		13	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	22,484,200.00	18,059,850.00	**80.32%**
		14	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	5,659,400.00	5,230,450.00	**92.42%**
		15	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	274,005,850.00	253,401,790.00	**92.48%**
			Subtotal	**12.911.960.530.00**	**12.504.929.634.00**	**96.85%**
S7	Meningkatnya Investasi	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	479,493,900.00	451,663,894.00	**94.20%**
		2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	749,634,750.00	701,836,100.00	**93.62%**
		3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	77,459,300.00	67,976,250.00	**87.76%**
		4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	189,609,050.00	138,203,255.00	**72.89%**
		5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	573.882.651.00	528.953.232.00	**92.17%**
			Subtotal	2.070.079.651.00	1.888.632.731.00	**91,23%**
S8.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1	Program Pengembangan UMKM	4,919,607,400.00	4,385,318,850.00	**89.14%**
		2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1,604,114,000.00	1,007,943,675.00	**62.83%**
		3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.049.192.250.00	3.001.712.900.00	**98.44%**
		4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,779,687,320.00	2,752,954,973.00	**99.04%**
		5	Penempatan Tenaga kerja	220.751.200.00	189.634.100.00	85.90%
			Subtotal	**12.352.600.970.00**	**11.147.930.398.00**	**90.25%**
S9	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	388,965,600.00	344,354,058.00	**88.53%**
		2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	61,986,260.00	59,077,578.00	**95.31%**
		3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	103,177,000.00	92,704,500.00	**89.85%**
			Subtotal	**554.128.860.00**	**496.136.136.00**	**89.54%**
S10	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	1	Program Pengembangan Kebudayaan	341,476,000.00	333,466,995.00	**97.65%**
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12,433,346,700.00	11,769,433,065.00	**94.66%**
		3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	24,590,000.00	24,542,000.00	**99.80%**
			Subtotal	**12,799,412,700.00**	**12,127,442,060.00**	**94.75%**
S11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4,260,508,500.00	4,252,673,364.00	**99.82%**
		2	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.530.800,00	23.174.550,00	75,91%
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan,	1,098,039,700.00	1,084,454,286.00	**98.76%**

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
			Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
		4	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.043.115.600,00	1.037.869.569,00	**99.50%**
		5	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	12.197.636.798,00	12.161.929.039,00	**99.71%**
		6	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	132.025.700,00	123.547.100,00	**93.58%**
		7	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkataan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	535.049.250,00	419.710.898,00	**78.44 %**
			Subtotal	19.296.906.348.00	19.103.358.806.00	**99.00%**
S12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Program Pemberdayaan Sosial	1,366,916,000.00	1,363,089,575.00	**99.72%**
		2	Program Rehabilitasi Sosial	828,488,000.00	800,960,807.00	**96.68%**
		3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	488,331,100.00	313,563,903.00	**64.21%**
		4	Program Pencatatan Sipil	122,286,800.00	119,053,904.00	**97.36%**
		5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	18,370,000.00	15,191,300.00	**82.70%**
		6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153,559,600.00	141,480,374.00	**92.13%**
		7	Program Pengendalian Penduduk	92,995,100.00	86,664,235.00	**93.19%**
		8	Program Pendaftaran Penduduk	185,961,100.00	156,675,700.00	**84.25%**
			Subtotal	**3,256,907,700.00**	**2,996,679,798.00**	**92.01%**
S13	Terbangunnya Insfrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3,738,737,021.00	3,679,252,978.65	**98.41%**
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	157,960,000.00	156,821,000.00	**99.28%**
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3,205,192,250.00	3,078,503,638.00	**96.05%**
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	442,803,350.00	418,292,450.00	**94.46%**
		5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	52,163,250.00	46,338,500.00	**88.83%**
		6	Program Pengembangan Perumahan	562,552,876.00	435,172,992.00	**77.36%**
		7	Program Kawasan Permukiman	98.709.750.00	81.462.350,00	**82.53%**
		8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	6,960,702,273.00	6,758,232,801.00	**97.09%**
		9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4,684,792,200.00	4,634,424,883.00	**98.92%**
		10	Program Penyelenggaraan Jalan	5,915,555,842.00	5,571,916,025.81	**94.19%**
			Subtotal	**25.819.168.812,00**	**24.860.417.618,46**	**96.29%**
S14	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	511,503,400.00	446,748,320.00	87.34%
		2	Program Penataan Bangunan Gedung	466,948,000.00	447,303,000.00	95.79%
			Subtotal	**978,451,400.00**	**894,051,320.00**	**91.37%**
S15	Meningkatnya Kualitas Udara dan Tutupan Lahan	1	Program Pengelolaan Persampahan	11,387,569,490.00	8,255,970,925.00	**72.50%**

Sasaran		Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	427,000,423.00	357,068,145.00	**83.62%**
		3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19,385,300.00	16,738,805.00	**86.35%**
		4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2,072,617,850.00	1,999,651,732.00	**96.48%**
		5	Program Penanganan Bencana	182,809,351.00	165,138,000.00	**90.33%**
		6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1,983,500.00	427,000.00	**21.53%**
		7	Program Penanggulangan Bencana	1,475,117,840.00	1,453,846,675.00	**98.56%**
		8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	18,887,300.00	15,782,375.00	**83.56%**
		9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	54,878,250.00	50,687,980.00	**92.36%**
		10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75,340,200.00	70,875,750.00	**94.07%**
		11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	138,727,800.00	131,700,525.00	**94.93%**
		12	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	118,244,300.00	116,392,730.00	**98.43%**
			Subtotal	**15,972,561,604.00**	**12,634,280,642.00**	**79.10%**

Sumber : BAPPEDA dan BPKD Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian anggaran setiap program pendukung sasaran. Besarnya efisensi atau inefisiensi diperoleh dari pengurangan angka rata-rata capaian indikator kinerja persasaran terhadap angka rata-rata capaian anggaran program persasaran, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Efisiensi Pemanfaatan Anggaran yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2024

SASARAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	REALISASI (4)	CAPAIAN KINERJA(%) (5)	CAPAIAN ANGGARAN(%) (6)	EFISIENSI (7=5-6) %
S1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	12.04	12	99.67		
	2. Harapan Lama Sekolah	15.36	15.47	100.72		
Rata-Rata				100,20	90.24	9,96
S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Umur Harapan Hidup	74.44	74,48	100,05		
	4. Prevalensi Stunting	14.00	9.49	**132.21**		
Rata-Rata				116,13	70,15	45,98
S3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan	5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.44	NA	BELUM ADA NILAI	81,40	

	Perlindungan Anak							
		6.	Predikat Kota Layak Anak	Utama	NA	BELUM ADA NILAI		
			Rata-Rata					
S4.	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	7.	Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00		
		8.	Rasio Daya Saing Keolahragaan	0.20	0.5	250,00		
			Rata-Rata			175,00	85,34	89,66
S5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.	Nilai SAKIP	63.98	64.22	100.38		
		10.	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71.00	63.20	89.01		
		11.	Nilai Sistem Merit	330	NA	BELUM ADA NILAI		
		12.	Maturitas SPIP	3(3.1)	3	100.00		
		13.	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	91	94.46	103.80		
		14.	Indeks SPBE	2.95	3.16	107.12		
			Rata-Rata			100,06	94,46	5,60
S6.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	15.	LPE Sektor Perdagangan	5.21	3,98%	76.39		
		16.	LPE Sektor Pertanian	5.03	0,15%	2.98		
		17.	LPE Sektor Akomodasi Makan dan Minum	10.92	7,45%	68.22		
			Rata-Rata			49.20	96.85	(47,65)
S7.	Meningkatnya Investasi	18.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6	38,60	643,33	91,23	552,10
S8.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	19.	Tingkat Kemiskinan	4.64	5.31	85.56		
		20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.80	4.94	97.08		
			Rata-Rata			91,32	90,25	1,07
S9.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	21.	Pengeluaran Perkapita	11.328	11.840	104.52	89,53	14,99
S10.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat	22.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	74.10	66,16	89,24		
		23.	Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85.00	79,29	84,02		
			Rata-Rata			86,63	94,75	(8,12)
S11.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	100.00	100.00	99	1
S12.	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25.	Angka PPKS	4.2	3.69	112.14	92,01	20,13
S13.	Terbangunnya Insfrastruktur layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26.	IKLI KePUan	96.81	96.71	99.90	96,29	1,38

		27.	IKLI Perkim	98.56	94.56	95.94		
		28.	IKLI Perhubungan	98.00	95.22	97.16		
Rata-Rata						97,67		
S14.	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	29.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83.00	83.00	100,00	91,37	8,63
S15.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	30.	Indeks Kualitas Air	72.47	34.65	47.81		
		31.	Indeks Kualitas Udara	78.38	89.08	113.65		
		32.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.45	61.70	88.84		
Rata-Rata						83,43	79,10	4,33

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BPKD Kota Padang Panjang, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum terjadi efisiensi dalam pencapaian kinerja di Kota Padang Panjang. Dari 15 (lima belas) sasaran, 12 (dua belas) sasaran mengalami efisiensi dan 2 (dua) sasaran mengalami inefisiensi yaitu pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dan Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Adat Budaya dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat. Sedangkan 1 (satu) sasaran belum bisa diukur efisiensinya karena data kinerja belum dirilis yaitu pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas Pembantuan, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 368 ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pemberian tugas pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019;
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3.4 Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

3.5 Saran dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Instansi Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pendidikan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan ini ada 3 (tiga) yaitu :

a. Pendidikan Dasar Usia Dini;

b. Pendidikan Dasar; dan

c. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian penerapanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 direncanakan100% dengan terlayaninya pemenuhan kebutuhan dasar angka partisipasi sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Target capaian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	100 %
2 .	Pendidikan Dasar	100 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan	100 %

4.1.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100.00 % (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		*2526*	*2526*	*0*	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	62.94	62.94	0	100.00 %	
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	62.94	62.94	0	100.00 %	
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD	%	71.23	71.23	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	di S1/DIV						
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	95.11	95.11	0	**100.00 %**	
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2.8	2.8	0	**100.00 %**	
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	**100.00 %**	
	7. Indeks distribusi guru	%	0.5	0.5	0	**100.00 %**	
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	67.23	67.23	0	**100.00 %**	
	9. Proporsi PTK penggerak	%	37	37	0	**100.00 %**	
2 .	**Pendidikan Dasar**					**99.98 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		***9415***	***9415***	***0***	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**99.91 %**	
	SD						
	1. Angka partisipasi kasar	%	105.5	105.5	0	**100.00 %**	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	99.05	99.05	0	**100.00 %**	
	3. Kemampuan literasi	Nilai	89.34	89.34	0	**100.00 %**	
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	78.57	78.57	0	**100.00 %**	
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0	0	0	**100.00 %**	
	6. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0	0	0	**100.00 %**	
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	76.37	76.37	0	**100.00 %**	
	8. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75.38	75.38	0	**100.00 %**	
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.71	60.71	0	**100.00 %**	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	**100.00 %**	
	11. Indeks distribusi guru	%	95	95	0	**100.00 %**	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	100	100	0	**100.00 %**	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	37	37	0	**100.00 %**	
	SMP						
	1. Angka partisipasi kasar	%	109.31	109.31	0	**100.00 %**	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	98.53	98.53	0	**100.00 %**	
	3. Kemampuan literasi	Nilai	91.09	91.09	0	**100.00 %**	
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	86.45	86.45	0	**100.00 %**	
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0	0	0	**100.00 %**	
	6. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0	0	0	**100.00 %**	
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	73.15	73.15	0	**100.00 %**	
	8. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	74.71	74.71	0	**100.00 %**	
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.82	60.82	0	**100.00 %**	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	95	95	0	**100.00 %**	
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	**100.00 %**	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	100	100	0	**100.00 %**	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	37	37	0	**100.00 %**	
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		***437***	***437***	***0***	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00 %**	
	1. Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	**100.00 %**	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	41.63	41.63	0	**100.00 %**	
	3. Kemampuan literasi	Nilai	14.29	14.29	0	**100.00 %**	
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	28.57	28.57	0	**100.00 %**	
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0	0	0	**100.00 %**	
	6. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0	0	0	**100.00 %**	
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45	70.45	0	**100.00 %**	
	8. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	55.55	55.55	0	**100.00 %**	
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	45.84	45.84	0	**100.00 %**	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	**100.00 %**	
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	**100.00 %**	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	100	100	0	**100.00 %**	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	**100.00 %**	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673,216,682,148
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	120,444,972,934
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	34,689,546,000
	APBD	34,689,546,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	5,202,496,000
	D. APBD DAK NON FISIK	29,487,050,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.1.5 Dukungan Personil

Gambaran data kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	STATUS PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ASN	21	19	40
2	Non ASN	17	15	32
	JUMLAH	**36**	**27**	**72**

Sumber : Disdikbud Data keadaan Desember 2024

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	JENJANG	PENDIDIK	TENDIK	JUMLAH (Org)
1	PAUD	231	57	288
2	SEKOLAH DASAR	358	173	531
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	282	84	366
4	KESETARAAN	28	8	36
	JUMLAH	**899**	**322**	**1221**

Sumber : Disdikbud Data keadaan Desember 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Pendidikan ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu sumber data SPM berdasarkan rapor pendidikan;
b. Perhitungan kebutuhan yaitu pada sistem dapodik hanya mendata siswa yang terdaftar pada siswa di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan;

c. Perencanaan dan penganggaran yaitu sudah dianggarkan pada APBD pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. Pelaksanaan yaitu kegiatan peningkatan kompetensi sudah beberapa terlaksana pada triwulan 1 dan 2 2024;

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Kesehatan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan ini ada 12 (dua belas) yaitu :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehtan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100 %

4.2.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100.00 % (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	767	767	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	504	504	0	100.00 %
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	71460	71460	0	100.00 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	662	662	0	100.00 %
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	662	662	0	100.00 %
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	662	662	0	100.00 %
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	662	662	0	100.00 %
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	662	662	0	100.00 %
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	1035	1035	0	100.00 %
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	808	808	0	100.00 %
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	0	100.00 %
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	50	50	0	100.00 %
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	4	4	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	14	14	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	30	30	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	5	5	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	100.00 %
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	505	505	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)					
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***767***	***767***	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00** %
	1. Formulir Partograf	Formulir	464	464	0	**100.00** %
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	464	464	0	**100.00** %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	486	486	0	**100.00** %
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	**100.00** %
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	9	9	0	**100.00** %
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	30	30	0	**100.00** %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	22	22	0	**100.00** %
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	4	4	0	**100.00** %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	3	3	0	**100.00** %
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***775***	***775***	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	445	445	0	**100.00 %**
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	445	445	0	**100.00 %**
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	259	259	0	**100.00 %**
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	445	445	0	**100.00 %**
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	577	577	0	**100.00 %**
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	577	577	0	**100.00 %**
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	11	11	0	**100.00 %**
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	10	10	0	**100.00 %**
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	35	35	0	**100.00 %**
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	23	23	0	**100.00 %**
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	7	7	0	**100.00 %**
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	14. Kader Kesehatan	Orang	164	164	0	**100.00 %**
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***3234***	***3234***	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	3392	3392	0	**100.00 %**
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	3392	3392	0	**100.00 %**
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	2413	2413	0	**100.00 %**
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	2758	2758	0	**100.00 %**
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	3392	3392	0	**100.00 %**
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	702	702	0	**100.00 %**
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	906	906	0	**100.00 %**
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	702	702	0	**100.00 %**
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	906	906	0	**100.00 %**
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	702	702	0	**100.00 %**
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	906	906	0	**100.00 %**
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	906	906	0	**100.00 %**
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	1349	1349	0	**100.00 %**
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	74	74	0	**100.00 %**
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	6	6	0	**100.00 %**
	16. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	12	12	0	**100.00 %**
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	43	43	0	**100.00 %**
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	**100.00 %**
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	20. Guru PAUD	Orang	34	34	0	**100.00 %**
	21. Kader Kesehatan	Orang	164	164	0	**100.00 %**
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**100.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***12975***	***18479***	**-5504**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	11217	11217	0	**100.00 %**
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	11217	11217	0	**100.00 %**
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	10628	10628	0	**100.00 %**
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	4	4	0	**100.00 %**
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	4	4	0	**100.00 %**
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	28166	28166	0	**100.00 %**
	7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah	Alat	15	15	0	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	SMP/sederajat)					
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	2030	2030	0	**100.00 %**
	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	39	39	0	**100.00 %**
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	vaksin	2428	2428	0	**100.00 %**
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	12	12	0	**100.00 %**
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	24	24	0	**100.00 %**
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	22	22	0	**100.00 %**
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	4	4	0	**100.00 %**
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	8	8	0	**100.00 %**
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	7	7	0	**100.00 %**
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	95	95	0	**100.00 %**
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	48	48	0	**100.00 %**
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***21274***	***25224***	**-3950**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	18	18	0	**100.00 %**
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	38	38	0	**100.00 %**
	3. Alat : Tensimeter	Unit	30	30	0	**100.00 %**
	4. Alat : Glukometer	Unit	26	26	0	**100.00 %**
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	11	11	0	**100.00 %**
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	22617	22617	0	**100.00 %**
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	104	104	0	**100.00 %**
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	2008	2008	0	**100.00 %**
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	9	9	0	**100.00 %**
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	8116	8116	0	**100.00 %**
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	23	23	0	**100.00 %**
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	4619	4619	0	**100.00 %**
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	3500	3500	0	**100.00 %**
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	**100.00 %**
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	**100.00 %**
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	**100.00 %**
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	11	11	0	**100.00 %**
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	48	48	0	**100.00 %**
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***4695***	***4695***	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	40	40	0	**100.00 %**
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	36	36	0	**100.00 %**
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	36	36	0	**100.00 %**
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	2564	2564	0	**100.00 %**
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	2504	2504	0	**100.00 %**
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	5264	5264	0	**100.00 %**
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	0	**100.00 %**
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	12	12	0	**100.00 %**
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	32	32	0	**100.00 %**
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	29	29	0	**100.00 %**
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	4	4	0	**100.00 %**
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	10	10	0	**100.00 %**
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	54	54	0	**100.00 %**
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***4624***	***4624***	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	16	16	0	**100.00 %**
	2. Obat Hipertensi	Paket	214612	214612	0	**100.00 %**
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	30	30	0	**100.00 %**
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	2550	2550	0	**100.00 %**
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	12	12	0	**100.00 %**
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	**100.00 %**
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	**100.00 %**
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	**100.00 %**
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	**100.00 %**
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	11	11	0	**100.00 %**
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***1160***	***1261***	**-101**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	78732	78732	0	**100.00 %**
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	26	26	0	**100.00 %**
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula	Unit	10115	10115	0	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet					
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	506	506	0	**100.00 %**
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	14	14	0	**100.00 %**
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	14	14	0	**100.00 %**
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	34	34	0	**100.00 %**
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	28	0	**100.00 %**
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	**100.00 %**
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	11	11	0	**100.00 %**
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	**100.00 %**
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	8	8	0	**100.00 %**
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***123***	***139***	**-11**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	5	5	0	**100.00 %**
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	43	43	0	**100.00 %**
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	40	40	0	**100.00 %**
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	2400	2400	0	**100.00 %**
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	6	6	0	**100.00 %**
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	11	11	0	**100.00 %**
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	6	6	0	**100.00 %**
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	6	6	0	**100.00 %**
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	2	2	0	**100.00 %**
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***1400***	***1624***	**-224**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	18	18	**0**	**100.00 %**
	2. Reagen Zn TB	Kit	11	11	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	605	605	0	100.00 %
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	1806	1806	0	100.00 %
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	1400	1400	0	100.00 %
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4	4	0	100.00 %
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	4	4	0	100.00 %
	8. Tuberkulin	Vial	4	4	0	100.00 %
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	7	7	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	7	7	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	2	2	0	100.00 %
	15. Kader Kesehatan	Orang	24	24	0	100.00 %
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***1533***	***1955***	**-422**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	• **Jumah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00** %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10	10	0	100.00
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	1898	1898	0	100.00
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1498	1498	0	100.00
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	999	999	0	100.00
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	11	11	0	100.00
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	36	36	0	100.00
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	26	26	0	100.00
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	7	7	0	100.00
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	4	4	0	100.00
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	6	6	0	100.00
	JUMLAH	**3,109**	**3,109**	**0**	**900.00%**	

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673,216,682,148
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	105,341,171,936
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,716,196,700
	APBD	1,716,196,700
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	632,647,400

NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	1,083,549,300
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Keadaan SDM Kesehatan di Kota Padang Panjang
Berdasarkan Jenis Kelamin SDM Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	2	5
Kecamatan Padang Panjang Barat		
1.	HC KBS	42
2.	HC BUSUR	54
3.	IFK	3
4.	RSI IBNU SINA	98
5.	KLINIK SITI AMINAH	3
6.	KLINIK ASSYIFA	6
7.	PSC 119	14
8.	TPMD/TPMDG	8
	Total	**228**
Kecamatan Padang Panjang Timur		
1.	HC GUNUNG	47
2.	HC KOTO KATIK	39
3.	RSUD PADANG PANJANG	346
4.	KLINIK SECATA	2
5.	KLINIK POLRES	3
6.	KLINIK GUNUNG	13
7.	KLINIK LAPAS	8
8.	TPMD/TPMDG	4
	Total	**462**
	TOTAL KESELURUHAN	**690**

Sumber : Seksi SDK dan Peningkatan Mutu Tahun 2024.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Kesehatan ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu penentuan data sasaran yang awalnya menggunakan data proyeksi dimana lebih tinggi dengan sasaran yang ada sehingga ditetapkan data sasaran riil; dan

b. Pelaksanaan yaitu sasaran yang akan dilayani ada yang pindah;

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pekerjaan Umum ini ada 2 (dua) yaitu: Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.9
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100 %

4.3.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yaitu sebesar 99.55% (Tuntas Utama) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

. Tabel 4.10
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.55 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	*61559*	*61559*	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.15%
	• Jumah Mutu Barang / Jasa /SDM :		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	80.00 %
	Jaringan Perpipaan					
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	17837	17837	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	17837	17837	0	100.00 %
	Bukan Jaringan Perpipaan					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1022	1022	0	**100.00 %**
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1022	1022	0	**100.00 %**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					**99.11 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.29 %**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	Orang	***61559***	***61009***	**550**	**99.11 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.82 %**
	• **Jumah Mutu Barang / Jasa /SDM :**		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**99.10 %**
	1. kuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	17837	17677	160	**99.10 %**
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	17837	17677	160	**99.10 %**
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	17837	17677	160	**99.10 %**

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673,216,682,148
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	22,170,661,719
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	595,063,3500
	APBD	595,063,3500
	A. APBD MURNI	595,063,3500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM baik itu pemenuhan pelayanan air minum maupun pengolahan air limbah. Untuk kondisi tahun 2024 ini, terdapat 5 (lima) orang pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM dibawah koordinasi bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Tabel 4.12
Daftar Pegawai Dinas PUPR Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	SD/SMP	0
2.	SMA/SMK/STM	7
3.	D3	9
4.	S1/DIV	26
5.	S2	5
	Jumlah	**47**

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Pekerjaan Umum ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu data primer masih sangat diperlukan. Data yang tersedia saat ini masih data yang diolah dan ditambah dari tahun-tahun sebelumnya;
b. Perhitungan kebutuhan yaitu penghitungan kebutuhan data masih belum mencakup semua wilayah yang ada di Kota Padang Panjang;
c. Perencanaan dan penganggaran yaitu adanya pergeseran dan perubahan anggaran yang semula untuk kegiatan SPM, beralih menjadi kegiatan yang lain; dan
d. Pelaksanaan yaitu pelaksanaan dan perencanaan yang terlambat dari target awal;

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada

Urusan Perumahan Rakyat ini ada 2 (dua) yaitu : Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.13
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**100 %**
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**	
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
	Terjadi bencana (Lampiran SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :**	Orang	***0***	***0***	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00 %**	
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**					**100.00 %**	
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100.00 %**	
	Ada Relokasi Program Pemerintah						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :**	Orang	***0***	***0***	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00 %**	
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa /**		0	0	0	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	SDM						

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673,216,682,1480
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	32,448,327,088
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	104,960,000
	APBD	104,960,00
	A. APBD MURNI	104,960,00
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.4.5 Dukungan Personil

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disyahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat berada di bawah Bidang Perumahan dan Permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan, perumahan formal dan swadaya
b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan dan permukiman
c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program prasarana dan sarana umum kawasan permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya

   Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengembangan kawasan perumahan formal dan swadaya dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan formal dan swadaya

b. Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman

   Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian kawasan perumahan dan permukiman dalam arti menyelenggarakan validasi data dan pengembangan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

c. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.

   Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum kawasan permukiman dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum kawasan permukiman serta perbaikan sanitasi dan penyehatan lingkungan.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Perumahan Rakyat ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu belum adanya tim teknis OPD;
b. Perhitungan kebutuhan yaitu belum adanya tim teknis OPD;
c. Perencanaan dan penganggaran yaitu reforcusing dana; dan
d. Pelaksanaan yaitu belum adanya tim teknis OPD dan penanganan terhadap korban terdampak bencana banjir bandang tanggal 11 mei 2024 di Kota Padang Panjang ditangani menggunakan dana DSP (Dana Siap Pakai) dari BNPB yang di laksanakan oleh BPBD Kota Padang Panjang, sehingga untuk realisasi anggaran dan penerapan SPM tidak dapat dilaksanakan;

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121

Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota . Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 (dua) yaitu : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100 %
2 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100 %

4.5.1.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) sebesar 97.405% (Tuntas Paripurna) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) sebesar 100% (Tuntas Paripurna), dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			97.405 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					97.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	*32*	*32*	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.08 %
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	85.39 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional	Unit	663	110	553	16.59 %

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
1	**2**	**3**	**4**			**5**
	jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	2	2	0	**100.00%**
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	663	606	27	**95.73 %**
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	**100.00%**
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	1	0	**100.00%**
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	1	0	**100.00%**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			**TUNTAS PARIPURNA**			**97.73%**
2 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					**97.73 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**		***12***	***12***	**0**	**100.00 %**
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			**20.00%**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**		**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**85.39 %**
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	12	12	0	**100.00 %**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	Dokumen	5	5	0	**100.00 %**
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	Uinit	707	270	437	**38.19 %**
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	47	44	3	**93.62 %**
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	39	39	0	**100.00 %**
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	3	3	0	**100.00 %**

4.5.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673,216,682,148
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	24,595,640,605
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6,952,461,500
	APBD	6,952,461,500
	A. APBD MURNI	6,952,461,500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.5.1.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2024 pada Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang didukung oleh 176 orang personil dengan komposisi 27 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja, 11 orang PNS Pemadam Kebakaran dan 12 orang PPPK Pemadam Kebakaran, jumlah ASN tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 100 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 26 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang:

Tabel 4.19
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	3	0	3
3	SLTA	121	19	140
4	D3	2	4	6
5	S.1	19	6	25
6	S.2	0	1	1
	Jumlah total			**176**

Tabel 4.20
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	Golongan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	1	0	1
2	II	12	1	13
3	III	16	6	22
4	IV	2	0	2
5	PPPK	11	1	12
6	Honorer/ Banpol PP + Damkar	104	22	126
	Jumlah total			**176**

Karyawan/ karyawati di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 berjumlah 175 pegawai yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 134 Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.21
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut Pendidikan

NO	Pendidikan	Total
1	2	3
1	S2	1 orang
2	S1	25 orang
3	Diploma	6 orang
4	SLTA	140 orang
5	SLTP	3 orang
6	SD	1 orang

4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Dalam penerapannya SPM Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu diperlukannya pendataan ulang yang mendetail by name by address;
b. Perhitungan kebutuhan yaitu perlunya bimbingan teknis tata cara melakukan pengisian dan penghitungan kebutuhan, sehingga yang dihasilkan sesuai dengan aturan dan penghitungan kebutuhan tidak dapat diprediksi karena kejadian bersifat insidentil (tidak dapat diduga);
c. Perencanaan dan penganggaran yaitu belum terpenuhinya kebutuhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sepenuhnya karena keterbatasan anggaran;
d. Pelaksanaan yaitu pelaksanaan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang belum dilakukan secara maksimal dan belum dilirik sebagai kegiatan prioritas, sehingga terdapat kendala dalam pemenuhan dan pelaksanaan SPM tersebut terutama dalam hal anggaran; dan
e. Lain-lain yaitu pada indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, sulit untuk menentukan target karena bencana datang tidak dapat diprediksi dan perlunya bimbingan teknis terkait tata cara pelaporan pelaksanaan SPM yang sistematis, sehingga dalam pengisian form yang harus di isi terdapat persamaan persepsi.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.5.2 BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, pada Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang ada 3 (tiga) yaitu : Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).

4.5.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 4.22
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100 %

4.5.2.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Trantibumlinmas yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yaitu sebesar 100 % (Tuntas Paripurna), dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.23
Realisasi Pencapaian SPM di Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
1	2	3	4			5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**	Orang	***30,000***	***30,000***	**0**	**100.00%**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**		**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00 %**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	**100.00 %**
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1	1	0	**100.00 %**
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	3200	3200	0	**100.00 %**
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	18	18	0	**100.00 %**
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**	Orang	***1,882***	***1,882***	**0**	**100.00 %**
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**		**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00** %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	Unit	150	150	**0**	**100.00 %**
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	260	260	**0**	**100.00 %**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**					**100.00 %**
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**	Orang	***326***	***326***	**0**	**100.00 %**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2	2	0	0%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	326	326	0	0%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	2	0	0%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1	0	1	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	3	0	0%

4.5.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran Urusan Urusan Trantibumlinmas
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673,216,682,148
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	24,595,640,605
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6,952,461,500
	APBD	6,952,461,500
	A. APBD MURNI	6,952,461,500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.5.2.5 Dukungan Personil

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas : melaksanakan penanggulangan bencana secara

terintegrasi, meliputi: (a.) Pra bencana; (b.) Saat tanggap darurat; dan (c.) Pasca bencana serta yang berhubungan dengan Kesbangpoldagri dan Hubungan Antar lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai sub-urusan kebencanaan daerah, BPBD Kesbangpol dibantu oleh:

- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

  Bidang ini bertugas dalam melakukan pelayanan informasi rawan bencana dengan membuat kajian risiko bencana dan melakukan kegiatan sosialiasi, dan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) terkati dengan rawan bencana.
- Bidang Kedaruratan dan Logistik

  Bidang ini bertugas dalam melakukan reaksi cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi. Serta menyediakan semua kebutuhan logistik yang diperlukan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- PUSDALOPS

  Berada di bawah bidang kedaruratan dan logistik yang bertugas membantu dalam melakukan reaksi cepat tanggap ketika terjadi bencana. Selalu siap siaga selama 24 jam dan siap kapan saja ketika terjadi bencana. Bertugas untuk penyelamatan dan evakuasi bencana. Menerima dan memberikan informasi terkait dengan kebencanaan.
- Tim Reaksi Cepat (TRC)

  Tim gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, OPD terkait, BPBD, dan PUSDALOPS yang bertugas ketika terjadi suatu bencana.
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

  Bidang ini bertugas dalam melakukan Kajian Hitung Pasca Bencana yang fungsinya untuk memperkirakan kerugian terhadap bencana baik itu dalam bentuk jiwa ataupun materil. Selanjutnya, juga melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap rekonstruksi terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Tabel 4.25
Data Tenaga pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No	Pendidikan	Status Tenaga			Jumlah
		PNS	PPPK	THL	
1.	S2	3			3
2.	S1	14	1	4	19
3.	D III	4		3	7
4.	SMA	8	4	22	34
	Jumlah	**29**	**5**	**29**	**63**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang didukung dengan keberadaan pegawai sejumlah 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (54%) dan Non Aparatur Sipil Negara (46%).

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Trantibumlinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu diperlukannya pendataan ulang yang mendetail by name by address terkait dengan masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana;
b. Perhitungan kebutuhan yaitu perlunya bimbingan teknis tata cara melakukan pengisian dan penghitungan kebutuhan, sehingga yang dihasilkan sesuai dengan aturan dan penghitungan kebutuhan tidak dapat diprediksi karena kejadian bersifat insidentil (tidak dapat diduga);
c. Perencanaan dan penganggaran yaitu belum terpenuhinya kebutuhan anggaran BPBD Kesbangpol sepenuhnya, baru terfokus kepada penyelamatan dan evakuasi korban bencana, untuk informasi rawan bencana dan pencegahan kesiapsiagaan belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran;
d. Pelaksanaan yaitu pelaksanaan SPM sub bidang bencana belum dilakukan secara maksimal dan belum dilirik sebagai kegiatan prioritas, sehingga terdapat kendala dalam pemenuhan dan pelaksanaan SPM tersebut terutama dalam hal anggaran; dan
e. Lain-lain yaitu pada indikator SPM yang terkait dengan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sulit untuk menentukan target karena bencana datang tidak dapat diprediksi dan perlunya bimbingan teknis terkait tata cara pelaporan pelaksanaan SPM yang sistematis, sehingga dalam pengisian form yang harus di isi terdapat persamaan persepsi.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum pelaksanaan Urusan Sosial ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Sosial ini ada 3 (tiga) yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut ini digambarkan target indikator SPM di Urusan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 4.26
Target Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1	2	3
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %

4.6.3 Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi capaian SPM pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar 100% (Tuntas Paripurna) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.27
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	• JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	*330*	*330*	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	330	330	0	100.00 %	
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks	Orang	172	172	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	permakanan/orang/hari)						
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	1	1	0	**100.00 %**	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	160	160	0	**100.00 %**	
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	22	22	0	**100.00 %**	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	**100.00 %**	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	30	30	0	**100.00 %**	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	30	30	0	**100.00 %**	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	330	330	0	**100.00 %**	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	**100.00 %**	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	6	6	0	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	11	11	0	100.00 %	
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	80.00 %	
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**	Orang	***10***	***10***	**0**	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	3	3	0	100.00 %	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan	Orang	10	10	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	**100.00 %**	
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**	Orang	***355***	***355***	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00 %**	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat	Orang	355	355	0	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	2	2	0	**100.00 %**	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	185	185	0	**100.00 %**	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	351	351	0	**100.00 %**	
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	15	15	0	**100.00 %**	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	**100.00 %**	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	150	150	0	**100.00 %**	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	150	150	0	**100.00 %**	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	351	351	0	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	8	0	**100.00 %**	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	**100.00 %**	
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	• **JUMLAH YANG HARUS DILAYANI**	Orang	***9***	***9***	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	• **Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM**		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00 %**	
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5	5	0	**100.00 %**	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	3	3	0	**100.00 %**	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	8	8	0	**100.00 %**	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan	Orang	8	8	0	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	**100.00 %**	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	60	60	0	**100.00 %**	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	60	60	0	**100.00 %**	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	9	9	0	**100.00 %**	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	**100.00 %**	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	12	12	0	**100.00 %**	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	12	12	0	**100.00 %**	
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	12	12	0	**100.00 %**	
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100.00%**	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	***1037***	***1037***	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00 %**	
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	602	602	0	**100.00 %**	
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	74	74	0	**100.00 %**	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	8	8	0	**100.00 %**	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	8	8	0	**100.00 %**	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100	100	0	**100.00 %**	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM Urusan Sosial pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.28
Alokasi Anggaran Urusan Sosial

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA PADANG PANJANG	673.216.682.148
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	13.548.699.387
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2.241.884.094
	APBD	1.644.077.151

	A. APBD MURNI	1.434.577.151
	B. APBD DAU	209.500.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	597.806.943
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	25.000.000
	APBN	572.806.943
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	572.806.943
	DANA LAINNYA	0

4.6.5 Dukungan Personil

Untuk dukungan personil dalam pencapaian kinerja standar pelayanan minimal Bidang Urusan Sosial ini pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	1	1
2	SMA Sederajat	3	3	12	4	22
3	D3	1	3	1	3	8
4	S1	4	20	2	6	32
5	S2	3	2	-	-	5
Jumlah		**11**	**28**	**15**	**14**	**68**
		39		**29**		

Untuk dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan : 2 orang
- Pekerja Sosial Profesional : 1 orang
- Penyuluh Sosial Masyarakat : 92 orang
- Relawan Sosial : 24 orang
- Taruna Siaga Bencana : 28 orang
- Karang Taruna : 19 Kelompok
- LK3 Raudhah : 1 Lembaga
- Pendamping Disable : 18 orang
- Pendamping PKH : 7 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya SPM Urusan Sosial, ada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Pengumpulan data yaitu kriteria dan teknik pengumpulan data melalui kader PSM di kelurahan sering berubah sehingga mempengaruhi kepada ketersediaan data yang komprehensif dalam penyusunan/perhitungan kebutuhan SPM;

b. Perhitungan kebutuhan yaitu keterbatasan SDM dan anggaran dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan PPKS;
c. Perencanaan dan penganggaran yaitu perencanaan SPM tidak terkawal dengan baik karena kurang optimal nya dukungan stakeholder terkait pemahaman pemenuhan SPM dan tidak adanya kegiatan dan anggaran khusus dalam pemenuhan SPM urusan Sosial;
d. Pelaksanaan yaitu masih belum optimalnya koordinasi antara para stakeholder; dan
e. Lain-lain yaitu SDM lapangan belum memadai.

Solusi yang akan dilakukan yaitu akan melakukan evaluasi pada pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 4.30
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				43,515,715,579	38,763,177,446	89.08%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				43,515,715,579	38,763,177,446	89.08%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629			20,516,004,614	18,137,373,972	88.41%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	639,678,400	492,771,523	77.03%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	193,172,800	187,718,582	97.18%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	193,172,800	189,250,668	97.97%
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3,702,515,087	3,010,924,630	81.32%
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	306,430,000	239,574,500	78.18%
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	144,950,000	135,582,750	93.54%
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	193,100,000	189,337,200	98.05%
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	728,635,400	700,245,000	96.10%
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	561,195,000	525,281,300	93.60%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	771,900,000	679,597,001	88.04%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	105,565,000	99,000,000	93.78%
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0%
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	389,373,900	285,692,040	73.37%
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	2,704,489,200	2,690,378,321	99.48%
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	457,013,700	365,360,225	79.95%
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	63,621,950	48,339,840	75.98%
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	5,712,600,000	5,584,323,241	97.75%
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	35,200,000	28,200,000	80.11%
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	815,005,595	634,234,678	77.82%
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	327,119,000	237,754,755	72.68%
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	175,757,400	173,232,150	98.56%
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,400,000,000	1,069,721,527	76.41%
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	651,169,482	340,206,470	52.25%
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	51,239,900	41,060,900	80.13%
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	193,100,000	189,586,671	98.18%
	JUMLAH INDIKATOR				20,516,004,614	18,137,373,972	88.41%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			14,144,773,915	12,275,373,438	86.78%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	800,000,000	639,630,135	79.95%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	241,920,230	187,852,660	77.65%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,085,098,235	887,339,263	81.78%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	300,000,000	232,582,693	77.53%
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,515,945,000	1,177,039,220	77.64%
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,085,185,000	870,875,642	80.25%
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	300,000,000	229,682,043	76.56%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	214,678,790	160,294,847	74.67%
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	277,472,710	252,181,964	90.89%
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	559,765,429	539,606,100	96.40%
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	579,155,171	578,720,000	99.92%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	290,000,000	179,353,875	61.85%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	72,500,000	72,500,000	100.00%
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	65,000,000	59,295,300	91.22%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	207,067,000	183,913,303	88.82%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	495,105,500	342,460,185	69.17%
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,276,620,000	1,264,749,550	99.07%
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	393,165,600	265,026,575	67.41%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	34,725,700	29,107,260	83.82%
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	3,801,900,000	3,666,714,331	96.44%
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	27,999,800	21,210,000	75.75%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	18,750,000	14,985,000	79.92%
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	16,080,000	12,976,200	80.70%
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	186,639,750	183,802,350	98.48%
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	300,000,000	223,474,942	74.49%
	JUMLAH INDIKATOR				14,144,773,915	12,275,373,438	86.78%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			6,918,378,150	6,656,276,348	96.21%
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	362,744,000	353,906,860	97.56%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	50,000,000	45,941,123	91.88%
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	292,140,000	139,045,877	47.60%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	28,829,600	27,820,000	96.50%
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	53,600,000	35,000,000	65.30%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	194,812,000	189,365,020	97.20%
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	88,437,400	86,957,405	98.33%
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	3,886,100,000	3,885,950,000	100.00%
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	371,009,950	344,598,000	92.88%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	85,299,200	72,504,346	85.00%
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1,439,400,000	1,416,553,767	98.41%
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	17,010,000	16,718,100	98.28%
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	29,160,000	22,079,850	75.72%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta	Peserta didik	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Didik				
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	19,836,000	19,836,000	100.00%
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				6,918,378,150	6,656,276,348	96.21%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			1,936,558,900	1,694,153,688	87.48%
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	188,206,650	182,728,965	97.09%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	140,557,800	120,379,215	85.64%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	49,499,750	27,434,813	55.42%
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	19,999,750	11,281,750	56.41%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nonformal/Kesetaraan				
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	581,100,000	570,333,000	98.15%
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	3,719,000	3,649,700	98.14%
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	20,000,000	19,992,000	99.96%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	50,000,000	48,209,535	96.42%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	169,888,750	126,095,225	74.22%
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	50,000,000	40,975,600	81.95%
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	80,000,000	77,246,830	96.56%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	583,587,200	465,827,055	79.82%
	JUMLAH INDIKATOR				**1,936,558,900**	**1,694,153,688**	**87.48%**
	JUMLAH PROGRAM				**43,515,715,579**	**38,763,177,446**	**89.08%**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Tabel 4.31
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				1,716,196,700	1,471,538,390	85.74%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,716,196,700	1,471,538,390	85.74%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			1,716,196,700	1,471,538,390	85.74%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	137,182,350	89,719,720	65.40%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	31,439,900	21,577,500	68.63%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	35,297,550	28,447,000	80.59%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	426,434,050	350,283,880	82.14%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	153,038,300	119,485,450	78.08%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	134,572,650	121,040,000	89.94%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	339,309,700	304,954,300	89.87%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	65,993,900	57,416,500	87.00%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	108,472,900	103,389,190	95.31%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	24,545,400	23,636,100	96.30%
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	228,162,400	221,221,750	96.96%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	31,747,600	30,367,000	95.65%
	JUMLAH INDIKATOR				1,716,196,700	1,471,538,390	85.74%
	JUMLAH PROGRAM				1,716,196,700	1,471,538,390	85.74%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				595,063,350	574,628,300	96.57%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				157,960,000	156,821,000	99.28%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			157,960,000	156,821,000	99.28%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	157,960,000	156,821,000	99.28%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**157,960,000**	**156,821,000**	**99.28%**
	JUMLAH PROGRAM				**157,960,000**	**156,821,000**	**99.28%**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**437,103,350**	**417,807,300**	**95.59%**
	2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**437,103,350**	**417,807,300**	**95.59%**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		K20240327112559					
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan prasarana IPLT				
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	227,886,400	222,731,400	97.74%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M^3/Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M^3/Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	97,960,000	97,122,000	99.14%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	111,256,950	97,953,900	88.04%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				437,103,350	417,807,300	95.59%
	JUMLAH PROGRAM				437,103,350	417,807,300	95.59%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 4.43
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				104,960,000	0	0.00%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				104,960,000	0	0.00%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			0	0	0.00%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			104,960,000	0	0.00%

		K2023348					
		1	**Rehabilitasi rumah bagi korban bencana**	**Unit Rumah**	44,960,050	0	**0%**
		2	**Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		3	**Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana**	**Ha**	0	0	**0%**
		4	**Pembangunan rumah bagi korban bencana**	**Unit Rumah**	0	0	**0%**
		5	**Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	59,999,950	0	**0%**
		6	**Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0%**
		7	**Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Rumah Tangga**	0	0	**0%**
		8	**Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Rumah Tangga**	0	0	**0%**
		9	**Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0%**
		10	**Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0%**
		11	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0%**
		12	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**104,960,000**	**0**	**0.00%**
	JUMLAH PROGRAM				**104,960,000**	**0**	**0.00%**
KEGIATAN LAINNYA							
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.7.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.44
Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				8,773,168,140	8,662,069,503	98.73%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				5,428,411,300	5,378,932,442	99.09%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			4,986,053,300	4,942,838,778	99.13%
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	213,333,000	207,518,664	97.27%
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	302,132,900	297,663,230	98.52%
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	512,211,800	482,646,750	94.23%
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	3,729,350,600	3,726,435,134	99.92%
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	0	0	0%
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	229,025,000	228,575,000	99.80%
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,986,053,300	4,942,838,778	99.13%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			229,025,000	228,575,000	99.80%
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	225,325,000	224,875,000	99.80%
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	2,700,000	2,700,000	100.00%
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	1,000,000	1,000,000	100.00%
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				229,025,000	228,575,000	99.80%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			213,333,000	207,518,664	97.27%
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	213,333,000	207,518,664	97.27%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				213,333,000	207,518,664	97.27%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH PROGRAM				**5,428,411,300**	**5,378,932,442**	**99.09%**
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**1,486,723,840**	**1,453,846,675**	**97.79%**
	4	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456**			**260,000,000**	**259,837,050**	**99.94%**
		1	**Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	260,000,000	259,837,050	**99.94%**
		2	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)**	**Orang**	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**260,000,000**	**259,837,050**	**99.94%**
	5	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443**			**924,815,100**	**905,853,355**	**97.95%**
		1	**Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		2	**Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	44,293,000	44,005,350	**99.35%**
		3	**Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	830,564,000	813,968,005	**98.00%**
		4	**Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Unit**	49,958,100	47,880,000	**95.84%**
		5	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Kawasan**	0	0	**0%**
		6	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**Kawasan**	0	0	**0%**
		7	**Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota**	**-**	0	0	**0%**
		8	**Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0%**
		9	**Penyusunan rencana kontijensi**	**Dokumen**	0	0	**0%**
		10	**Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Orang**	0	0	**0%**
		11	**Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana**	**Dokumen**	0	0	**0%**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				924,815,100	905,853,355	97.95%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			65,521,000	61,696,550	94.16%
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	65,521,000	61,696,550	94.16%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				65,521,000	61,696,550	94.16%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			236,387,740	226,459,720	95.80%
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	236,387,740	226,459,720	95.80%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				236,387,740	226,459,720	95.80%
	JUMLAH PROGRAM				1,486,723,840	1,453,846,675	97.79%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN				1,858,033,000	1,829,290,386	98.45%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)						
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			1,797,639,700	1,773,265,236	98.64%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	53,949,300	49,586,100	91.91%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,037,646,400	1,028,429,136	99.11%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	6,444,000	5,850,000	90.78%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	325,900,000	320,800,000	98.44%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	325,900,000	320,800,000	98.44%
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam	Orang	47,800,000	47,800,000	100.00%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,797,639,700	1,773,265,236	98.64%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			0	0	0.00%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			53,949,300	49,586,100	91.91%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	16,541,700	15,430,000	93.28%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	30,007,600	26,756,100	89.16%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	7,400,000	7,400,000	100.00%
	JUMLAH INDIKATOR				53,949,300	49,586,100	91.91%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			6,444,000	6,439,050	99.92%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	6,444,000	6,439,050	99.92%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				6,444,000	6,439,050	99.92%
	JUMLAH PROGRAM				1,858,033,000	1,829,290,386	98.45%
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.7.6 URUSAN SOSIAL

Tabel 4.45
Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PADANG PANJANG				1,422,980,351	1,350,109,110	94.88%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				539,997,500	517,816,640	95.89%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			511,387,500	492,033,690	96.22%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	145,731,900	144,729,544	99.31%
		2	Penyediaan sandang	Orang	219,877,200	216,659,600	98.54%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	65,073,200	62,906,500	96.67%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	37,222,000	25,683,796	69.00%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	43,483,200	42,054,250	96.71%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				511,387,500	492,033,690	96.22%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			28,610,000	25,782,950	90.12%
		1	Penyediaan makanan	Orang	17,730,000	15,218,950	85.84%
		2	Penyediaan sandang	Orang	6,308,000	6,096,000	96.64%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4,572,000	4,468,000	97.73%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH INDIKATOR				28,610,000	25,782,950	90.12%
	JUMLAH PROGRAM				539,997,500	517,816,640	95.89%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		320,102,400	308,927,117	96.51%
		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		408,681,100	384,015,303	93.96%
		3	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		154,199,351	139,350,050	90.37%

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud nyata adanya hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara aplikatif menjadi wahana dan sarana bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2024. Sehingga dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Padang Panjang mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024, dalam konteks tatanan manajemen pemerintahan daerah merupakan pengaktualisasian prinsip konsepsi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini merupakan suatu proses komitmen dan *politicall will* dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar stakeholder terkait dalam mewujudkan *Good Local Governance*.

Pada akhirnya kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Sumatera Barat akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya.